

**FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA MARGASATWA MUARA ANGKE
OLEH SEKSI KONSERVASI WILAYAH III
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

Metta Miftahul Jannah

6661110776

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2017**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan :

Nama : Metta Miftahul Jannah

NIM : 6661110776

Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan telah melaksanakan kegiatan penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta” secara orisinil. Apabila suatu saat diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat atau hasil penjiplakan dari skripsi lain, maka gelar yang diperoleh peneliti dapat dicabut sesuai dengan ketentuan.

Serang, Mei 2017



METTA MIFTAHUL JANNAH

NIM. 6661110776

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Metta Miftahul Jannah
NIM : 6661110776
Judul Skripsi : FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA MARGASATWA MUARA ANGKE
OLEH SEKSI KONSERVASI WILAYAH III BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA.

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang,
tanggal 04 bulan Mei tahun 2017 dan dinyatakan LULUS.

Serang, Mei 2017

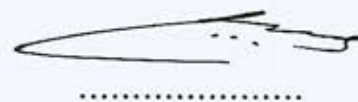
Ketua Penguji :

Anis Fuad, S.sos., M.Si
NIP. 198009082006041002



Anggota :

Drs. Attoullah, M.Si
NIP. 196603062002121001



Anggota :

Titi Stiawati, S.sos., M.Si
NIP. 197011252005012001



Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta


Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : METTA MIFTAHUL JANNAH

NIM : 6661110776

Judul Skripsi : FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA MARGASATWA MUARA ANGKE
OLEH SEKSI KONSERVASI WILAYAH III BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA

Serang, Mei 2017

Skripsi ini telah disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Suwaib Amirudin, M.Si

NIP. 197405012005011000

Pembimbing II,



Titi Stiawati, S.Sos, M.Si

NIP. 197011252005012001

Mengetahui,

Dekan Fisiologi Untirta



Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si

NIP. 197108242005011002

“Barang Siapa Ingin Mutiara , Harus Berani Terjun

Di Lautan Yang Dalam” (Ir. Soekarno)

“If You Want Get to Know Someone,

so Get to Know Yourself First”

Skripsi Ini Aku Persembahkan untuk

Alm.Papah, Mamah, Kakak, Adik dan Keponakanku

Terima Kasih Atas Doa dan Kasih Sayang yang Diberikan

ABSTRAK

Metta Miftahul Jannah. 6661110776. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I : Dr. Suwaib Amirudin M.Si. Dosen Pembimbing II : Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta penyangga kehidupan. di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke terdapat beberapa permasalahan diantaranya terlambatnya penyusunan rencana pengelolaan, sumber daya manusia kurang memadai, jumlah pengunjung lebih sedikit dan kondisi sarana prasarana kurang terjaga dengan baik. Manajemen mengacu pada proses pelaksanaan aktivitas melalui pemanfaatan sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi manajemen dalam pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke. Penelitian ini menggunakan teori George Terry dalam Hasibuan (2011), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pengarahannya dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pemilihan informan, peneliti menentukan secara purposive. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep analisis data menurut Miles dan Huberman dan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi dan membercheck. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke belum optimal disebabkan oleh keterlambatan penyusunan rencana pengelolaan, minimnya sumber daya manusia dengan keahlian khusus dalam mengelola, sosialisasi kawasan kurang berkembang sehingga peneliti dapat memberi saran meliputi peningkatan kompetensi pengelola, pelatihan dan pembinaan petugas pengelola serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan pihak ketiga agar kawasan dapat dikelola secara bersama-sama.

Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Suaka Margasatwa Muara Angke.

ABSTRACT

Metta Miftahul Jannah. 6661110776. Management Functions of Muara Angke Conservation Management Area by Regional III Conservative Department and Association of Natural-Resources Conservations DKI Jakarta. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. First Adviser: Dr. Suwaib Amirudin, M.Si and Second Adviser: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

The Muara Angke Conservation Area is a regions with specific characteristics both of land or water area which has a main functions as an area of preserving plants and animals as well as a life suspension. In the Muara Angke Conservation Area there are few problems including delayed preparation of management planning, inadequate human resources, fewer visitors and the conditions of tools and infrastructure is unwell. The management are refers to the process of the implementation of activities through the used of other resources in order to objectives achieve. The purpose of this research is to find out the Management Functions of Muara Angke Conservation Management Areas. This research uses the theory of George Terry in Hasibuan (2011), that is planning, organizational, movement/briefing, and control. The method used is descriptive method with a qualitative approach. In the selection of informants, researchers determine by purposive. In this research, researchers use data analysis model developed by Milles and Hubberman and the examination for validity data is use for triangulasi and member check. The research result is showing the management in Muara Angke Conservative Area is not optimal due to delayed preparation of management planning, inadequate human resources with special expertise in managing, regions socialization is not developed because of that, researcher advice include improving the competence of administrator, training and coaching all of administrator officer and increase cooperation with the third optional side so that the area can be managed together.

Key Words: Management Functions, Muara Angke Conservation Area.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kasih karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta”**. Adapun penyusunan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat melakukan penelitian dalam meraih gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua, keluarga serta sahabat yang membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca dalam membuat karya lebih baik lagi dan bermanfaat kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi pengajaran, dorongan serta bantuan sebagai motivasi bagi penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Bapak Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si selaku Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan serta membimbing peneliti dalam proses penyusunan Skripsi.
9. Ibu Titi Stiawati, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II Skripsi. Terima kasih atas arahan serta pembelajaran bagi peneliti melalui bimbingan dengan saran dan kritik yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi.
10. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta dukungan selama masa perkuliahan.

11. Kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
12. Para staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.
13. Ibu Ida Herawati, S.Hut., M.Eng, Selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta yang telah memberikan informasi serta data terkait mengenai pengelolaan kawasan suaka margsatwa.
14. Pihak petugas BKSDA DKI Jakarta yang telah memberikan izin penelitian, dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta waktu yang diluangkan untuk melakukan wawancara.
15. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memberikan informasi serta data terkait dengan penelitian serta waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara.
16. Kedua Orang Tuaku tersayang, Alm. Papah tersayang dan Mamah tercinta terima kasih atas segala doa dan restunya serta dukungan baik moril dan materil kepada peneliti dalam melakukan penelitian. serta untuk kakak, adik dan keponakanku terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan.
17. Bima Yudha Saputra, S.Sos., yang dengan tulus membantu dan menemani peneliti selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih untuk doa dan semangat yang diberikan.

18. Teman-teman seperjuanganku Nurul Fitri Sugiharto, Rizki Parhani, Ika Dewi Safitri, Dita Marsela, Fitri Maliani, Resty Yustini, Ayu Fitri Lestari, Ita, Nella Hani Rosa, Anita, Vero, Abdillah Luthfi A yang saling mendoakan dan memberikan semangat. Untuk sahabat kecilku Resti Fauziah Kurniawan, Ratna Fitriana, Desviari Intan, Anisa Rara dan Ratna Kusuma yang tidak terlupakan.
19. Teman-teman Administrasi Negara 2011 yang memberikan kesan, kenangan dan solidaritas selama masa perkuliahan.
20. UKM KSR PMI UPT UNTIRTA yang telah memberikan pertemanan selama perkuliahan.
21. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini karena keterbatasan penulis, oleh karenanya penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin.

Serang, Mei 2017

Metta Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	18

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1 Deskripsi Teori	23
2.1.1 Pengertian Manajemen	23
2.1.2 Kegunaan Manajemen	25
2.1.3 Unsur-unsur Manajemen	26
2.1.4 Prinsip-prinsip Manajemen	26
2.1.5 Fungsi-fungsi Manajemen	28
2.1.5.1 Fungsi Perencanaan	32
2.1.5.2 Fungsi Pengorganisasian	36
2.1.5.3 Fungsi Pergerakan	41
2.1.5.4 Fungsi Pengawasan	42
2.1.6 Pengertian Pengelolaan	46
2.1.7 Pengertian Suaka Margasatwa	48
2.2 Penelitian Terdahulu	50
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	52
2.4 Asumsi Dasar	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	57
3.2 Fokus Penelitian	58
3.3 Lokasi Penelitian	59

3.4 Fenomena yang Diamati	59
3.4.1 Definisi Konsep	59
3.4.2 Definisi Operasional	60
3.5 Instrumen Penelitian	63
3.6 Informan Penelitian	69
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
3.8 Jadwal Penelitian	74

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	75
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Jakarta Utara	75
4.1.2 Gambaran Umum BKSDA DKI Jakarta	79
4.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA DKI Jakarta	81
4.1.2.2 Struktur Organisasi Seksi Konservasi Wilayah III ..	82
4.1.2.3 SDM Seksi Konservasi Wilayah III	84
4.1.3 Deskripsi Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke	86
4.1.3.1 Batas Administratif dan Geografis	86
4.1.3.2 Sejarah dan Batas Pengukuhan	86
4.1.3.3 Potensi Kawasan	88
4.2 Deskripsi Data	89
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	89
4.2.2 Informan Penelitian	90
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	92

4.3.1	<i>Planning</i> (Perencanaan)	93
4.3.2	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	104
4.3.3	<i>Actuating</i> (Pergerakan)	113
4.3.4	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	126
4.4	Pembahasan dan Temuan Lapangan	138

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	153
5.2	Saran	155

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pengunjung Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke	7
Tabel 1.2 Kawasan dan Jasa Lingkungan DKI Jakarta	8
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Seksi Konservasi Wilayah III	11
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara	65
Tabel 3.2 Tabel Informan	70
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	74
Tabel 4.1 Nama dan Jabatan Petugas Seksi Konservasi Wilayah III	84
Tabel 4.2 Daftar Informan	91
Tabel 4.4 Pembahasan dan Hasil Penelitian	151

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	55
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data.....	71
Gambar 4.1 Peta Jakarta Utara	76
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Penjaringan	78
Gambar 4.3 Bagan Struktur BKSDA DKI Jakarta	80
Gambar 4.4 Bagan Struktur Seksi Konservasi Wilayah III	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Mencari Data Penelitian dari FISIP

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Data

Lampiran 5 Member Check

Lampiran 6 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Konservasi Wilayah III

Lampiran 7 Potensi Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Lampiran 8 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011

Lampiran 9 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dengan lingkungan memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Manusia bergantung pada lingkungan yang memberikan sumber daya alam untuk bertahan hidup, hal tersebut tentunya diikuti dengan peran manusia yang harus memperhatikan kelestarian lingkungannya agar fungsi-fungsi lingkungan tersebut masih dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia secara berkala. Namun melihat pada kondisi sekarang di kota-kota besar melalui kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dengan pemanfaatan sumber daya alam tentunya akan memiliki dampak positif maupun negatif bagi kualitas lingkungan. Untuk mempertahankan kualitas tersebut, maka dibentuk suatu kawasan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan jenis tumbuhan dan satwa didalamnya.

Kawasan yang dibangun tidak begitu saja berjalan dengan sendirinya, diperlukan adanya tata kelola yang mengatur keberlangsungan kawasan agar tetap ada dan tidak mengubah fungsi didalamnya. Kawasan tersebut akan terlihat nilai dan fungsinya apabila dalam penanganan yang baik dan benar oleh pihak-pihak terkait

yang mengelolanya. Untuk menjadikan pembangunan yang berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi maka Pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia membentuk Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang konservasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Manajemen mengacu pada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan melalui pemanfaatan sumber daya lain dalam rangka pencapaian tujuan. Manajemen merupakan bagian dari administrasi. Administrasi bersifat konsep menentukan tujuan dan kebijakan secara menyeluruh sedangkan manajemen merupakan sub konsep yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tingkat administrasi. Sebagai penggerak dari jalannya administrasi manajemen adalah proses melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, hingga evaluasi dari kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain manajemen sebagai rangkaian terpadu untuk menjalankan suatu organisasi dalam kegiatan tertentu untuk berkembang ke arah suatu tujuan.

Manajemen sebagai sebuah proses yang berjalan secara sistematis yakni secara terus menerus dan teratur dilakukan. Manajemen bukan tanpa tujuan melainkan ada tujuan yang ingin dicapai dan jika tujuan telah dicapai bukan berarti proses manajemen berhenti begitu saja, karena dalam proses manajemen apabila suatu tujuan telah dicapai maka akan dilanjutkan dengan tujuan lain berikutnya.

Hutan konservasi atau kawasan konservasi merupakan kawasan dilindungi yang berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Bab I Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

Fungsi kawasan konservasi selain untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, kawasan ini biasanya berupa hamparan lahan yang luas juga memiliki fungsi penyangga kehidupan yang secara tidak langsung dampaknya dapat dirasakan untuk menjaga kestabilan tanah, mengatur tata air tanah, dan sebagai filter terhadap polusi udara. Disadari bahwa dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada kurangnya kepedulian baik dalam sektor pemerintahan, swasta maupun masyarakat lokal yang sudah seharusnya dalam mengelola lingkungan hidup dilakukan secara bersama-sama dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana agar dapat menjamin kelangsungan dan kesinambungan persediaannya agar tetap terpelihara dan terjaga kualitas nilai kawasan hutan dan keanekaragaman didalamnya.

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas berupa daratan sekitar 661,52 Km² dan berupa lautan sekitar 6.977,5 Km². Provinsi DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 1978 dimana wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam 5 wilayah kota dan 1 kabupaten yang setingkat dengan kotamadya daerah tingkat II dan berada langsung di bawah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada bidang kehutanan meliputi pemeliharaan hutan alam yang sudah ada dan pengembalian fungsi lahan kedalam rencana tata ruang yang sudah ada. Namun dari keempat jenis peruntukan/fungsi utama hutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta hanyalah 2 jenis kawasan hutan yakni hutan lindung dan hutan konservasi. Luas kawasan hutan lindung pada tahun 2013 adalah 44,76 Ha sedangkan kawasan hutan konservasi pada tahun 2013 luasnya mencapai 227,34 Ha (Statistik Lingkungan Hidup 2014).

Kawasan konservasi darat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Sebagian besar kawasan hutan di DKI Jakarta khususnya dipesisir utara Jakarta didominasi oleh tumbuhan mangrove. Jumlah luas kawasan hutan mangrove DKI Jakarta pada tahun 2011 dan 2012 adalah 430,45 Ha. Pada tahun 2011 tercatat dengan kondisi baik sebesar 81% dan rusak sebesar 19%. Sedangkan pada tahun 2012 tercatat dengan kondisi baik sebesar 81,5% dan rusak sebesar 18,5% (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, 2014). Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2011 maka pada tahun 2012 tingkat kerusakan pada hutan mangrove berkurang 5% dari kerusakan tahun sebelumnya. Ekosistem mangrove di pesisir teluk Jakarta terdapat di daerah hutan wisata kamal, suaka margasatwa muara angke, hutan lindung angke kapuk dan sekitarnya.

Kota Jakarta Utara merupakan salah satu kota administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta utara sendiri terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan, 431 RW dan 5.072 RT. salah satu kecamatan di kota Jakarta Utara yakni kecamatan penjaringan dimana potensi yang ada di kecamatan penjaringan sendiri meliputi hutan yakni terdapat Hutan Lindung, Hutan Wisata Alam dan Hutan Marga Satwa (Jakarta Utara Dalam Angka 2014).

Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Hutan Raya (Tahura). Setiap kawasan tersebut memiliki definisi, kriteria dan fungsi yang berbeda. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Begitu pula dengan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA) di Kota Jakarta Utara. Kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, Bab I Pasal I Bagian ketiga yang menyebutkan bahwa : “pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian”.

Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke pertama kali ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 seluas 15,4 Ha. Pada tahun 1977 ditetapkan kembali oleh Menteri Pertanian sesuai SK. No. 16/Um/6/1977 tanggal 10 Juni 1977, hingga akhirnya status Cagar Alam diubah menjadi Suaka Margasatwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 755/Kpts-II/98 dengan luas 25,02 Ha. Komponen utama vegetasi di Suaka Margasatwa Muara Angke adalah hutan mangrove. adapun satwa yang ada di kawasan ini didominasi oleh jenis burung-burung air dan monyet ekor panjang (Ensiklopedia Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta 2014).

Pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA) tercatat tiga tahun terakhir pada tahun 2013, tahun 2014 dan 2015 terbagi dalam jenis kunjungannya. Begitu pula dengan kawasan Suaka Margasatwa Lain yakni Suaka Margasatwa Pulau Rambut. Jumlah pengunjung kedua kawasan konservasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut

Tahun	Jumlah Pengunjung	
	Kawasan SMMA	Kawasan SM.P.Rambut
2013	804 orang	602 orang
2014	667 orang	1457 orang
2015	748 orang	327 orang
Total	2.219 orang	2.386 orang

(Sumber : Laporan Tahunan Seksi Konservasi Wilayah III)

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengunjung selama tiga tahun terakhir, kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke jumlahnya mengalami peningkatan dan penurunan, ada pula peningkatan maupun penurunan bagi pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut. Akan tetapi jika dibandingkan total keseluruhan pengunjung maka jumlah pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke masih lebih sedikit dibandingkan dengan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut.

Kawasan ini memiliki jasa lingkungan yang dihasilkan oleh suatu ekosistem (lingkungan), yang manfaatnya secara ekologi maupun ekonomi dapat dirasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan jasa lingkungan mengacu pada tiga prinsip yang saling terkait yaitu efisiensi, keadilan dan kelestarian. Terdapat dua jenis jasa lingkungan yang berpotensi dan sedang dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta meliputi Jasa Penyedia Keanekaragaman Hayati dan Jasa Penyedia Keindahan Bentang Alam / Wisata Alam. Berikut jenis jasa lingkungan yang ada di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 1.2 Nama Kawasan dan Jasa Lingkungan DKI Jakarta

No.	Fungsi / Nama Kawasan	Kabupaten / Kota	Jenis Jasa Lingkungan	Pengelola
Pemanfaatan Komersial				
1.	TN. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu	Wisata Alam	BTN. Kepulauan Seribu dan Swasta
2.	CA. Pulau Bokor	Jakarta Utara	Wisata Alam	BKSDA DKI Jakarta
3.	SM. Pulau Rambut	Jakarta Utara	Wisata Alam	BKSDA DKI Jakarta
4.	SM. Muara Angke	Jakarta Utara	Wisata Alam	BKSDA DKI Jakarta

5.	TWA. Angke Kapuk	Jakarta Utara	Wisata Alam	BKSDA DKI Jakarta
Pemanfaatan Non Komersial				
	Hutan Kota	Lingkup. DKI Jakarta	Wisata	Pemerintah dan Swasta

(Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, BKSDA DKI Jakarta dan BTN. Kepulauan Seribu Tahun 2014).

Dari sekian nama kawasan tersebut, pengelolaan suaka margasatwa muara angke diarahkan pada pemanfaatan kawasan ini sebagai pusat pendidikan lahan basah di Jakarta. Suaka Margasatwa Muara Angke dapat menjadi media pembelajaran pengetahuan tentang hutan mangrove dan lingkungan hidup. Kawasan SMMA dikelilingi oleh berbagai aktivitas manusia karena letaknya di wilayah ibu kota negara sehingga dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang tinggi membuat kawasan ini mendapatkan berbagai tekanan yang dapat mengancam kelangsungan ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. kawasan konservasi di wilayah kerja BKSDA DKI Jakarta meliputi : Cagar Alam Pulau Bokor seluas 18,00 ha, Suaka Margasatwa Muara Angke seluas 25,02 ha, Suaka Margasatwa Pulau Rambut seluas 90,00 ha dan satu kawasan pelestarian alam yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 99,82 ha. (Ensiklopedia Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta

2014). Tugas pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan diampu oleh Polisi Hutan di kawasan konservasi.

Jasa lingkungan merupakan manfaat dari kawasan konservasi yang tergolong dalam *intangibile benefits* atau manfaat tidak langsung. Suaka Margasatwa Muara Angke yang ada di DKI Jakarta yang juga memberikan jasa lingkungan kepada masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jasa lingkungan tersebut berupa pengatur hidrologis, penyumbang O₂ dan penyerap CO₂ (stabilitas iklim), jasa penyedia keanekaragaman hayati, dan jasa keindahan bentang alam untuk ekowisata. Namun, kondisi saat ini di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa masih terdapat beberapa masalah yang terkait dengan proses manajemen pengelolaan kawasan yakni :

Pertama, dalam hal perencanaan yakni terlambatnya penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang akan berpengaruh terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengelola di masa yang akan datang, rencana yang dimuat salah satunya yakni penataan blok-blok kawasan sesuai dengan zonasinya sebagai salah satu perencanaan Kawasan Suaka Alam. Sebelumnya kegiatan perencanaan yang dijalankan hanya berupa kegiatan pengelolaan tahunan saja.

Kedua, dalam hal pengorganisasian untuk mengelola kawasan terkait dengan sumber daya manusia, dalam lingkup kerja seksi konservasi wilayah III BKSDA DKI Jakarta tercatat jumlah personil kerja tahun 2014 sebanyak 25 orang yang terdiri dari :

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia Seksi Konservasi Wilayah III

No	Jabatan	Jumlah	Wilayah Kerja
1	Jabatan Struktural	1 orang	Seksi Konservasi Wilayah III
2	Jabatan Fungsional Umum	8 orang	Seksi Konservasi Wilayah III
3	Jabatan Fungsional Polhut	11 orang	Seksi Konservasi Wilayah III, Tj Priok
4	Jabatan Fungsional PEH	4 orang	Seksi Konservasi Wilayah III
5	Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan	1 orang	Seksi Konservasi Wilayah III
Total		25 orang	

(Sumber : Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta)

Berdasarkan data diatas bahwa Jabatan Struktural berjumlah 1 orang, Jabatan Fungsional Umum berjumlah 8 orang, Jabatan Fungsional Polhut berjumlah 11 orang, serta Jabatan Penyuluhan Kehutanan berjumlah 5 orang. Dari total pegawai seksi konservasi wilayah III BKSDA DKI Jakarta bahwa masih terdapat kekurangan petugas lapangan Polisi Kehutanan, Idealnya sumber daya Polhut di setiap kawasan adalah dua orang atau lebih serta satu orang petugas penyuluh kehutanan. Tetapi pada kenyataanya ada dua kawasan konservasi yang letaknya sejalur ditugaskan pada satu orang polisi hutan yang mengakibatkan adanya beban tugas berlebih. Hal tersebut

akan berpengaruh juga terhadap fungsi pengawasan yang mengalami kendala pada pengawasan yang dilakukan di malam hari karena kurangnya jumlah petugas tersebut.

Ketiga, dalam hal pergerakan/pengarahan, selain kegiatan rutin yang dilakukan, BKSDA DKI Jakarta juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perangkat kerja kelurahan serta melakukan sosialisasi kawasan dengan mengikuti pameran. Saat ini hanya 1 LSM yang terikat kerja dengan BKSDA yakni Inisiasi Alam Rehabilitasi (IAR) sedangkan beberapa LSM lain yang sifatnya *incidental*/sementara saja seperti Kemangteer DKI Jakarta. Namun, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan jumlah pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke serta jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan Suaka Margasatwa Lain. Seperti wawancara peneliti dengan ketua LSM Kemangteer DKI Jakarta bahwa sejauh yang mereka lakukan untuk dapat mempromosikan Suaka Margasatwa Muara Angke adalah dengan cara bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, lewat media sosial, dan mereka mengumpulkan data mengenai isi kawasan yang nantinya dijadikan buku atau brosur (wawancara dengan Bapak Agung pada tanggal 24 mei 2015 pukul 16.10 WIB).

Keempat, Fasilitas sarana dan prasarana yang ada didalam Suaka Margasatwa Muara Angke berupa bangunan fisik dalam kondisi yang kurang baik, tercatat tahun 2014, sarana dan prasarana yang ada di Suaka Margasatwa Muara Angke meliputi : Pos Jaga, Menara Pandang, Boardwalk, Speedboat, Birdwatching, Papan Informasi dengan kondisi yang kurang baik dan kotor tersebut membuat kawasan SMMA ini

terkesan seram dan mengurangi nilai estetika dari yang seharusnya menjadi asri dan sejuk. Selain itu pengunjung yang ingin memasuki kawasan harus menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi atau biasa disebut dengan SIMAKSI sebagai bukti legalitas orang melakukan aktivitas di kawasan tertentu.

Dalam pengelolaan kawasan tersebut diperlukan adanya suatu manajemen sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui tindakan-tindakan perencanaan sebagai tahap awal mematangkan konsep untuk merencanakan kebutuhan suatu organisasi. suatu rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai hasil penyelenggaraan fungsi organik yang dilaksanakan dalam satuan-satuan kerja yang merupakan bagian dari organisasi. adanya pergerakan merupakan implementasi dari suatu perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan organisasi tersebut bekerjasama dalam mewujudkan tujuan. sedangkan pengawasan merupakan proses pengawasan dari semua kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan agar output yang dihasilkan dapat dilihat perkembangannya secara berkala dan dapat memberikan hasil yang efektif dan tepat guna demi terselenggaranya *Good Governance*.

Dari beberapa permasalahan yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola kawasan, peneliti tertarik mengambil judul tersebut dengan alasan bahwa kawasan konservasi yang terletak di muara angke sebagian besar tergenang oleh air payau ini merupakan sisa hutan terakhir di daratan Jakarta, lokasi kawasan sangat strategis dan mudah dijangkau karena letaknya dipinggir jalan raya, namun kawasan tersebut bersinggungan langsung dengan kegiatan manusia, dikelilingi oleh perumahan serta perkantoran, sehingga kawasan ini mengalami tekanan yang cukup tinggi untuk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai kawasan konservasi yang lestari. Disamping itu, kawasan tersebut juga dapat sebagai media pembelajaran mengenai pendidikan lingkungan dan wisata alam terbatas serta sebagai penyeimbang dengan kawasan lain yang minim ruang terbuka hijau.

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk melihat sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi di DKI Jakarta maka perlu penelitian tentang **Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA) oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang untuk Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.
2. Sumber daya manusia yang kurang memadai khususnya petugas lapangan Polisi Kehutanan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.
3. Jumlah pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke lebih sedikit dibanding dengan kawasan Suaka Margasatwa lain.
4. Kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kurang terjaga dengan baik sehingga banyak diantaranya yang rusak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dari permasalahan yang ada diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini guna lebih mempersempit masalah yang akan diteliti. Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti akan membatasi permasalahan penelitian dengan memfokuskan pada masalah mengenai Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara

Angke Jakarta Utara oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah terkait manajemen pegelolaan melalui fungsi didalamnya sebagai berikut :

“Bagaimana Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi manajemen dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai manajemen pengelolaan kawasan konservasi suaka margasatwa muara angke di Jakarta Utara dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Masukan bagi Pemerintah Daerah dan perangkatnya untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi di DKI Jakarta.
- b) Memberi alternatif solusi bagi permasalahan yang ada mengenai manajemen pengelolaan kawasan suaka margasatwa dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat serta selaras dengan pembangunan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.7 Sistematika Penulisan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sampai ke dalam masalah yang paling spesifik dan menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian atau dengan masalah. Untuk mengidentifikasi masalah peneliti biasanya melakukan observasi terlebih dahulu.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan dan rumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling berkaitan dengan judul penelitian dan berbentuk dalam kalimat pertanyaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud tujuan penelitian dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Pada bab ini terdapat deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan asumsi dasar. Deskripsi teori mengkaji tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan. Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan bagi penelitian yang berlangsung saat ini. Kerangka berpikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam penelitian, sedangkan asumsi dasar adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat penelitian dilaksanakan serta alasan memilih lokus tersebut.

3.4 Fenomena yang Diamati

Memberikan penjelasan tentang suatu konsep yang menjadi inti dalam pembahasan yang akan diteliti.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang digunakan, sumber data yang diperoleh melalui pengamatan/observasi, wawancara, dokumentasi dll dan teknik pengumpulan data.

3.6 Informan Penelitian

Menjelaskan tentang penentuan narasumber yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan tentang teknik yang digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil temuan dilapangan. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi dan membercheck.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan mengenai objek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel (dalam penelitian ini menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan data penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil penelitian.

4.4 Temuan Lapangan

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

5.2 Saran

Memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

LAMPIRAN

Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

BAB II

DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu teori manajemen dan teori pengelolaan.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata .

Menurut M. Manullang (2012:3) sesuai literturnya manajemen mempunyai tiga pengertian, yaitu (1) manajemen sebagai proses, (2) manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan manajemen, (3) manajemen sebagai suatu seni, (4) manajemen sebagai ilmu.

Selanjutnya pengertian manajemen menurut Sikula dalam Hasibuan (2011:2) sebagai berikut:

“Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the variable resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product service”.

Artinya :

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa:

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.”

Artinya :

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sedangkan menurut Stoner (2006:15) “ Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan pengertian tentang manajemen yang telah dikemukakan diatas, maka dapat juga disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan aktivitas yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan

pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya manajemen maka berfungsi untuk mengatur dalam pembagian pekerjaan, tugas serta tanggungjawab dan membentuk kerjasama dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

2.1.2 Kegunaan Manajemen

Secara ilmiah, uraian tentang kegunaan manajemen dapat dibagi dua macam, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis adalah manfaat yang diberikan oleh manajemen sebagai ilmu kepada seluruh unsur organisasi. Kegunaan tersebut baik dalam bentuk perusahaan maupun struktur organisasi lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat. Teori-teori yang terdapat dalam manajemen dapat dijadikan referensi untuk menilai realitas manajerial yang terdapat di masyarakat. Adapun kegunaan praktisnya bahwa teori itu berguna untuk diterapkan ke dalam aktivitas yang sesungguhnya. Suatu organisasi dapat mempraktikkan fungsi-fungsi manajemen dan aliran-alirannya. Demikian pula, dengan menerapkan asas-asas manajemen menjadi bagian dari sistem yang berlaku dalam suatu organisasi. Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis tidak dapat dipisahkan, terutama dilihat dari hubungan fungsional dan hubungan timbal baliknya (Athoillah, 2010). Dengan demikian, dapat dilihat pada masing-masing dari kegunaan manajemen yang ada bahwa suatu organisasi dapat diteliti dengan suatu pendekatan sehingga melahirkan teori lalu dari teori-teori tersebut dapat dipraktikkan secara langsung pada berbagai kegiatan yang ada dan berhubungan dengan organisasi tersebut.

2.1.3 Unsur-unsur Manajemen

Hasibuan (2011:20-21) mengatakan bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari *men, money, method, materials, machines and market* atau yang disingkat dengan 6M yaitu :

- 1) *Men.* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- 2) *Money.* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) *Methods.* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- 4) *Materials.* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 5) *Machines.* yaitu mesin / alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 6) *Market.* yaitu pasar untuk menjual barang / jasa yang dihasilkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka diperlukan alat-alat sarana yang merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Unsur-unsur manajemen menjadi hal yang mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah suatu perusahaan/organisasi dalam melakukan kegiatan.

2.1.4 Prinsip-prinsip Manajemen

Athoillah (2010:43-44) mengatakan bahwa dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman umum atau pegangan utama pelaksanaan aktivitas manajerial. roda organisasi dipacu dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang berprinsip pada prinsip yang umum dalam manajemen. Prinsip-prinsip umum manajemen (*general principle of management*), seperti dikemukakan oleh Hasibuan sebagai berikut :

- 1) *Division of work* (asas pembagian kerja)
Asas pembagian kerja sangat penting dalam manajemen karena setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan setiap lapangan kerja membutuhkan tenaga kerja ahli yang berbeda-beda sesuai bidangnya.
- 2) *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
Pembagian wewenang dan tanggungjawab harus diterapkan secara proporsional agar pelaksanaan kegiatan perusahaan/organisasi tidak tumpang tindih.
- 3) *Discipline* (asas disiplin)
Disiplin berakar pada prinsip proporsionalitas antara wewenang dan tanggungjawab yang dipikul oleh seluruh anggota organisasi. semua anggota baik atasan maupun bawahan wajib patuh terhadap peraturan organisasi yang telah disepakati.
- 4) *Unity of command* (asas kesatuan perintah)
Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Bawahan hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah atasannya dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada atasan secara langsung.
- 5) *Unity of direction* (asas kesatuan arah)
Kesatuan arah dan tujuan, meskipun dalam organisasi selalu terdiri dari berbagai bidang, dengan wewenang masing-masing, seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi.
- 6) *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi)
Kepentingan organisasi harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kesuksesan organisasi akan berdampak positif bagi kehidupan pribadi baik sebagai atasan maupun bawahan.
- 7) *Order* (asas keteraturan)
Asas ketertiban atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku di dalam organisasi.
- 8) *Equity* (asas keadilan)
Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa karena dalam organisasi terdapat wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda terkait apresiasi atas prestasi kerja dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dari prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan ini terkait dengan penelitian mengenai fungsi manajemen dalam pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke, dilihat dari prinsip pembagian kerja adalah bagaimana bentuk setiap pekerjaan dibagi sesuai keahlian tiap-tiap pengelola di bidang perencanaan dan pelaksanaan baik itu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya prinsip wewenang dan tanggung jawab menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang telah dibagi kepada setiap pengurus, maka ia memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan memberikan hasil yang akan dipertanggungjawabkan nantinya apakah maksimal atau tidak.

Kedua prinsip tersebut akan berjalan dengan baik jika menerapkan prinsip disiplin terhadap peraturan atau prosedur yang ada di dalam organisasi yang dijalankan. Prinsip kesatuan perintah dan kesatuan arah menjelaskan bahwa setiap tugas yang diberi harus berpegang teguh pada satu komando yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam pemberian peraturan dan ketentuan serta dapat menjunjung tinggi kepentingan umum dengan menerapkan prinsip keteraturan dan keadilan agar tidak terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan terhadap kawasan konservasi.

2.1.5 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer/pimpinan organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. fungsi-fungsi manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar bertindak. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-

orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik para manajer (Siagian 2005:32).

Athoillah (2010:95) mengatakan bahwa banyak ahli manajemen mengutarakan fungsi-fungsi manajemen sehingga seolah-olah tidak ada pembatasan yang jelas tentang fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Akan tetapi, apabila diperhatikan semua penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli memiliki substansi yang sama, terutama dilihat dari tujuan manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Beberapa konsep fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu POAC yang terdiri dari :
 1. *Planning* (Perencanaan) : suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya (Handyaningrat, 2001:25).
 2. *Organizing* (Pengorganisasian) : menentukan, mengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Handyaningrat, 2001:25).
 3. *Actuating* (Pergerakkan) : usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (*planning*) dan usaha pengorganisasiannya (Handyaningrat, 2001:25).
 4. *Controlling* (Pengawasan) : proses penentuan apa yang harus diselesaikan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar (Handyaningrat, 2001:25).

- 2) Fungsi manajemen menurut Henry Fayol yaitu POC 3 yang terdiri dari :
 1. *Planning* (Perencanaan) : proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan atau tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang (Hasibuan, 2009:40).
 2. *Organizing* (Pengorganisasian) : proses menciptakan hubungan antara fungsi-fungsi personalia dan faktor fisik agar kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama (Hasibuan, 2009:40).
 3. *Commanding* (Perintah) : fungsi yang mengatur tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan (Hasibuan, 2009:40).
 4. *Coordinating* (Koordinasi) : suatu usaha yang terkoordinir dimana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah dan diintegrasikan menuju tujuan bersama (Hasibuan, 2009:40).
 5. *Controlling* (Pengawasan) : fungsi yang mengatur kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana (Hasibuan, 2009:40).

- 3) Fungsi manajemen menurut Harold Koontz yaitu POSDiC yang terdiri dari :
 1. *Planning* (Perencanaan) : fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada (Hasibuan, 2011:40).
 2. *Organizing* (Pengorganisasian) : penentuan penggolongan kegiatan yang diperlukan untuk tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya (Hasibuan, 2011:119).
 3. *Staffing* (Personalia) : salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
 4. *Directing* (Pengarahan) : mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
 5. *Controlling* (Pengawasan) : pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggara (Hasibuan, 2011:41).

- 4) Fungsi manajemen menurut Luther Gullich yaitu POSDiCRB terdiri dari :
 1. *Planning* (Perencanaan) : perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu (Handyaningrat, 2001:24).
 2. *Organizing* (Pengorganisasian) : menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Handyaningrat, 2001:24).

3. *Staffing* (Personalia) : keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan (Handayaniingrat, 2001:24).
 4. *Directing* (Pengarahan) : merupakan tugas yang terus-menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha atau organisasi (Handayaniingrat, 2001:24).
 5. *Coordinating* (Koordinasi) : merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan daripada pekerjaan (Handayaniingrat, 2001:24).
 6. *Reporting* (Pelaporan) : dalam hal ini pimpinan bertanggung jawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi (Handayaniingrat, 2001:24).
 7. *Budgeting* (Pembiayaan) : semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran (Handayaniingrat, 2001:24).
- 5) Fungsi manajemen menurut William H. Newman yaitu POADC terdiri dari :
1. *Planning* : perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan (Handayaniingrat, 2001:20).
 2. *Organizing* : pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya di dalam setiap unit (Handayaniingrat, 2001:20).
 3. *Assembling Resource* : pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang atau kapital, alat-alat atau fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana (Handayaniingrat, 2001:20).
 4. *Supervising* : pengendalian kerja ialah bimbingan daripada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi agar mereka secara sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi daripada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan (Handayaniingrat, 2001:20).
 5. *Controlling* : pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar dan bila perlu mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang daripada rencana (Handayaniingrat, 2001:20).

- 6) Fungsi manajemen menurut The Liang Gie yaitu PDDCCI terdiri dari :
1. *Planning* : menggambarkan di muka, hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Liang Gie, 1983:160).
 2. *Decesion Making* : melakukan pemilihan dari berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan keragu-raguan yang timbul dalam proses penyelenggaraan usaha kerjasama (Liang Gie, 1983:160).
 3. *Directing* : memerintah, mengusahakan, memberi arah dan menuntun bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan (Liang Gie, 1983:160).
 4. *Coordinating* : menghubungkan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga berlangsung secara tertib dan seirama menuju arah tercapainya tujuan (Liang Gie, 1983:160).
 5. *Controlling* : memeriksa, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (Liang Gie, 1983:160).
 6. *Improving* : memperbaiki kekurangan-kekurangan yang timbul pada struktur organisasi dan tata kerja sewaktu berlangsungnya proses penyelenggaraan usaha kerjasama (Liang Gie, 1983:160).

George Terry mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terbagi dalam beberapa item sebagai berikut :

2.1.5.1 Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning atau perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan tidak bersangkutan paut dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak yang akan datang dari keputusan-keputusan yang sekarang (2010:43-44). Terry dalam Hasibuan (2011:91) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut :

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results”.

Artinya :

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Mengapa perlu adanya perencanaan karena untuk mencari fakta-fakta, menentukan jalan kegiatan yang akan diikuti, dan memperkirakan waktu, tenaga dan bahan yang diperlukan dengan sendirinya merupakan kekuatan-kekuatan positif menuju manajemen yang baik. Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana.

Terry (2008:46) mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan perencanaan (*planning*) merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi berbagai problema di masa yang akan datang dan mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan di masa mendatang dan *Planning* menjembatani jurang pemisah antara posisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai.

a) Aspek Rencana

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Rudy Kipling dalam Athoillah (2010:106) mengatakan bahwa cara-cara terbaik dalam membuat perencanaan adalah mengawalinya dengan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) *What*, apa yang akan direncanakan ?
- 2) *When*, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan ?
- 3) *Where*, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan ?
- 4) *How*, bagaimana cara melaksanakan rencana yang dimaksudkan ?
- 5) *Who*, siapa yang akan melaksanakan rencana bersangkutan ?

Sedangkan langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
Langkah ini berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan yang handak dicapai. Dalam penentuan tujuan, disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana.
- 2) Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang
Situasi sekarang perlu diperhatikan sebelum perencanaan dibuat, kemudian ukur menurut kemampuan organisasi dari seluruh komponen yang ada secara sistematis.
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
Memperkuat semua faktor yang mendukung terlaksananya perencanaan dan meminimalisasikan semua faktor yang akan menghambat. Demikian pula dengan antisipasi terhadap gangguan yang datang secara tidak terduga.
- 4) Mengembangkan rencana dan menjabarkannya
Pengembangan rencana dan penjabarannya harus dipahami oleh seluruh pelaksana kegiatan sehingga memudahkan tercapainya tujuan.

b) Tujuan Rencana

Menurut Husaini Usman (2011:65), Perencanaan dilakukan bertujuan untuk :

- 1) Standar Pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya,
- 2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan,
- 3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasi maupun kuantitasnya,
- 4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan,
- 5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu,
- 6) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan,
- 7) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan,
- 8) Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui, dan
- 9) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

c) **Jenis-jenis Perencanaan**

Perencanaan dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan kebutuhan dari setiap organisasi atau perusahaan. Menurut Anton Athoillah (2010:102) membaginya sebagai berikut :

- 1) Jenis *planning* menurut penggunaannya :
 - a. *Single use planning*, yaitu perencanaan untuk satu kali pakai. Jika pelaksanaan telah selesai, perencanaan tersebut tidak dipakai kembali.
 - b. *Repeats planning*, yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang. Rencana ini terus-menerus atau berulang dipergunakan sehingga bersifat permanen.
- 2) Jenis *planning* menurut jangka waktunya :
 - a. *Long range planning* (LRP), yaitu suatu perencanaan jangka panjang yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam pelaksanaannya. Perencanaan ini biasanya memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun.
 - b. *Intermediate planning* (perencanaan jangka menengah), yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu “pemasangan”. Perencanaan ini biasanya memerlukan waktu lima tahun.
 - c. *Short range planning* (SRP), yaitu perencanaan yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa dan mendadak karena dianggap penting dan waktu yang tersedia sangat sempit. Biasanya pelaksanaannya memerlukan waktu kurang dari satu tahun.
- 3) Jenis *planning* menurut materinya :
 - a. *Personel planning*, yaitu suatu perencanaan mengenai masalah-masalah kepegawaian. Masalah pegawai ditinjau dan dibahas dari berbagai segi secara mendalam dan mendetail.
 - b. *Financial planning*, yaitu suatu perencanaan mengenai masalah-masalah keuangan atau permodalan secara menyeluruh dan mendetail dari suatu kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan.
 - c. *Industrial planning*, yaitu perencanaan yang menyangkut kegiatan industry yang direncanakan sedemikian rupa agar terhindar dari hambatan dan rintangan dalam pencapaian tujuan.
 - d. *Educational planning*, yaitu suatu perencanaan dalam kegiatan pendidikan

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, kapan kegiatan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan mengapa dilakukan. Jadi, perencanaan merupakan usaha konkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasarnya telah ditetapkan dalam strategi organisasi.

Suatu rencana tidak akan timbul dengan sendirinya melainkan lahir sebagai hasil pemikiran yang bersumber pada individu atau kelompok yang memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala resikonya didalam penyusunan rencana. Orientasi suatu rencana ialah masa depan walaupun perjalanan organisasi merupakan suatu kontinum yang artinya masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi merupakan kelanjutan dari masa sekarang dan masa sekarang merupakan kelanjutan dari masa lalu. Hal tersebut tentunya dijadikan bahan pemikiran dalam menentukan arah dimasa yang akan datang. Serta rencana harus mempunyai makna untuk mempermudah usaha yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan.

2.1.5.2 Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata “*organize*” yang berarti menciptakan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya (Hasibuan 2011:118). Sedangkan menurut T Hani Handoko (2013:167) mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan

organisasi, sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.

Dengan kata lain bahwa *Organizing* atau pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggungjawab sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terry dalam Hasibuan (2011:119) mendefinisikan pengorganisasian sebagai berikut :

“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective”.

Artinya :

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penyelenggaraan fungsi pengorganisasian terdapat beberapa pertanyaan yang mencakup : “siapa melakukan apa ?, siapa bertanggungjawab kepada siapa ?, siapa yang berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa ?, saluran komunikasi apa yang terdapat dalam organisasi ?, dan jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi ?”(Siagian 2005:60).

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan dan keterampilan yang dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasi bukan saja untuk diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan, keterampilan dan juga pengetahuan (Terry, 2008:74).

a) Macam dan Ciri Organisasi

Organisasi memiliki berbagai jenis sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Menurut M. Manullang (2012:61), Organisasi formal merupakan suatu sistem kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dikoordinasikan dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan organisasi informal merupakan kumpulan hubungan antarperorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tidak disadari itu untuk tujuan bersama. Ciri organisasi menurut Manullang terbagi menjadi tiga yakni : a) sekelompok orang, b) kerja sama atau pembagian pekerjaan, c) tujuan bersama.

Dalam organisasi formal ketiga ciri tersebut ada dimana hubungan-hubungan dan tujuan bersama ditetapkan secara rasional. Sedangkan dalam organisasi informal ketiga ciri tersebut ada namun hubungan-hubungan tersebut dipengaruhi oleh perasaan dan tujuan bersama yang belum atau tidak jelas.

b) Komponen Pengorganisasian

Terry (2008:86) mengatakan bahwa ada empat komponen nyata dari pengorganisasian yakni sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan. Fungsi-fungsi yang akan dijalankan berasal dari tujuan-tujuan yang dinyatakan. Fungsi-fungsi tersebut dipisahkan kedalam sub-sub fungsi karena : (a) pembagian pekerjaan di kalangan sebuah kelompok menghendaki bahwa pekerjaan itu harusdibagi-bagi dan (b) spealisasi pekerjaan mengharuskan satuan tugas yang kecil-kecil. Dari berbagai fungsi ini, kelompok kegiatan kerja dibentuk atas dasar persamaan pekerjaan maupun efisiensi.
- 2) Pegawai-pegawai. Penugasan kepada seorang perorangan biasanya terdiri atas suatu bagian dari pekerjaan suatu unit kerja organisasi yang meliputi semua pekerjaan dari kesatuan itu.
- 3) Hubungan-hubungan. Hubungan seorang pegawai dengan pekerjaan, interaksi seorang pegawai dengan yang lain dan dari satuan unit pekerjaan dengan unit pekerjaan lain. Keselarasan dan kesatuan usaha mungkin hanya kalau hubungan-hubungan ini baik.
- 4) Lingkungan. Komponen nyata terakhir dari pengorganisasian mencakup alat-alat fisik dan iklim umum. Lingkungan mempunyai dampak yang berarti kepada hasil-hasil yang diperoleh dari pengorganisasian.

c) Prinsip-prinsip Organisasi

Siagian (2005:69) mengatakan bahwa cara lain yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pengorganisasian ialah dengan mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi. Hasil penyelenggaraan fungsi pengorganisasian adalah terciptanya suatu organisasi yang bentuk, struktur, dan bagian-bagiannya diselesaikan dengan kebutuhan sekelompok orang yang terikat secara formal dan berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan. fungsi pengorganisasian juga berkaitan erat dengan sikap dan perilaku para anggotanya dalam pemanfaatan organisasi tersebut. Pemahaman tersebut dapat terwujud dengan lima belas prinsip organisasi berikut :

- 1) kejelasan tujuan yang ingin dicapai;
- 2) pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi;
- 3) penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi;
- 4) kesatuan arah;
- 5) kesatuan perintah;
- 6) fungsionalisasi;
- 7) delinasi berbagai tugas;
- 8) keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab;
- 9) pembagian tugas;
- 10) kesederhanaan struktur;
- 11) pola dasar organisasi yang relatif permanen;
- 12) adanya pola pendelegasian wewenang;
- 13) rentang pengawasan;
- 14) jaminan pekerjaan; dan
- 15) keseimbangan antara jasa dan imbalan. (Siagian,2005).

Memerhatikan dan menerapkan kelima belas prinsip organisasi tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakan dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktifitas yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi bersangkutan.

Dengan demikian fungsi pengorganisasian ialah untuk membagi tugas, wewenang, dan tanggungjawab demi kepentingan koordinasi dan sinkronisasi satuan kerja organisasi, oleh karenanya perlu kejelasan tentang hal tersebut karena jika tidak akan berakibat pada tumpang tindih pekerjaan dan duplikasi kegiatan yang akan menimbulkan berbagai jenis pemborosan nantinya. Dan dengan adanya prinsip-prinsip didalam organisasi akan menciptakan integritas kerja antara satu dengan lainnya.

2.1.5.3 Fungsi Pergerakan (*Actuating*)

Terry dalam Handayani (2001:25) mengatakan bahwa pergerakan merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (*planning*) dan usaha pengorganisasiannya. Terry dalam Hasibuan (2011:41) mendefinisikan pergerakan/pengarahannya sebagai berikut :

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”.

Artinya :

Pengarahannya adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Manusia merupakan unsur terpenting dari seluruh proses administrasi dan manajemen dan fungsi pergerakan merupakan fungsi manajerial yang secara langsung berkaitan dengan manusia, segala jenis kepentingan, dan kebutuhannya. Rencana dan program kerja yang telah disusun dan ditetapkan diselenggarakan demi kepentingan manusia juga, baik mereka yang menjadi anggota organisasi, khususnya mereka yang dikenal sebagai *stakeholders*, yaitu berbagai pihak yang mempertaruhkan sesuatu demi keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Dengan demikian dalam *actuating* terdapat hal-hal sebagai berikut :

- 1) penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja;
- 2) pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan;
- 3) pemberian motivasi para pekerja untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- 4) pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja;
- 5) pembinaan para pekerja;
- 6) peningkatan mutu dan kualitas kerja;
- 7) pengawasan kinerja dan moralitas pekerja (Athoillah, 2010:116).

Agar pergerakan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat megerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang ditetapkan dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi dengan meningkatkan sikap dan moralitas setiap anggota kelompok organisasi.

2.1.5.4 Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan merupakan pengarahan seluruh potensi organisasi yang terlibat dalam melakukan kegiatan agar tidak melakukan penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Terry dalam Hasibuan (2011:242) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut :

“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard”.

Artinya :

Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Agar kegiatan pengawasan dapat membuahkan hasil yang diharapkan maka dibutuhkan juga berbagai dasar pemikiran yang sifatnya fundamental seperti orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi, orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas, orientasi ketiga dalam mengusahakan kegiatan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya serta dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

a) Bentuk – bentuk Pengawasan

Athoillah (2010:114) mengatakan bahwa pengawasan dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) pengawasan yang bersifat *top down*. Yakni pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung kepada bawahan.
- 2) Pengawasan yang bersifat *bottom up*. Yakni pengawasan yang dilakukan dari bawahan kepada atasan.
- 3) Pengawasan yang bersifat melekat. Yakni pengawasan yang termasuk kepada *self control* dimana atasan maupun bawahan senantiasa mengawasi dirinya sendiri.

Pengawasan yang lebih baik adalah dalam arti pembinaan dan pemberdayaan, sehingga dengan menjalankan fungsi pengawasan, seluruh personalia organisasi memiliki rasa pengabdian, komitmen, dan loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan organisasi tempatnya bekerja.

b) Ciri - ciri Pengawasan yang Efektif

Siagian (2005:130) mengatakan bahwa pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut :

- 1) Pengawasan harus merefleksasikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
- 2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi rencana.

- 3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis.
- 4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
- 5) Keluwesan pengawasan.
- 6) Pengawasan harus memperhitungkan pada dasar organisasi.
- 7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- 8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
- 9) Pengawasan mencari apa yang tidak beres.
- 10) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Sistem pengawasan yang efektif menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan dengan cara yang menuju pada tercapainya tujuan organisasi. Ciri pengawasan tersebut berhubungan pada terciptanya kesesuaian dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan, tujuan dan sasaran serta cara untuk mencapainya ditentukan. Dalam pengawasan, kemajuan (*progress*) menuju tercapainya tujuan diukur, sedangkan penyimpangan yang terjadi diidentifikasi dan jika perlu dilakukan koreksi baik kegiatannya maupun rencananya (Kertonegoro,1994:157).

Dengan demikian pengawasan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi. pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial dalam organisasi.

Dari fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry ini terkait dengan penelitian mengenai fungsi manajemen dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yaitu dilihat dari fungsi perencanaannya adalah seperti apa bentuk perencanaan yang dibuat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dalam memberikan petunjuk berupa peraturan dan ketentuan kepada pengurus di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Dilihat dari fungsi pengorganisasiannya adalah bagaimana pihak terkait yaitu BKSDA DKI Jakarta dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan teknis dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan yang mengacu pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dilihat dari fungsi pergerakannya adalah bagaimana pemimpin yakni Kepala BKSDA DKI Jakarta mengkoordinasikan para anggota dan pengurus di bidang perlindungan hutan dan konservasi wilayah agar dapat bekerja dengan optimal dengan satu tujuan dari apa yang direncanakan. Dilihat dari fungsi pengawasannya adalah bagaimana cara BKSDA DKI Jakarta dalam melakukan penilaian secara teknis terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang sedang berjalan dan dapat mengevaluasi dari jalannya kegiatan tersebut secara berkala.

2.1.6 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pengelolaan yakni : 1) proses, cara, perbuatan mengelola; 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

a) Prinsip-prinsip Pengelolaan dalam Manajemen

Athoillah (2010:91-93) mengatakan bahwa di dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- 1) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Titik tolak pelaksanaan manajemen dalam organisasi semaksimal mungkin memanfaatkan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Fungsi manajemen dioperasionalkan dengan mempertimbangkan sarana prasarana sejalan dengan keadaan dan kemampuan organisasi. artinya dengan menghemat biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan tetapi memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Prinsip Pengelolaan
Perencanaan yang dilakukan berpijak pada visi dan misi yang jelas sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara hierarkis atau sistematis dan mendahulukan skala prioritas sebagaimana mengatur dan menjadwalkan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Program jangka pendek dilaksanakan sekaligus sebagai bagian dari awal dari program jangka menengah, sedangkan pelaksanaan program jangka menengah dilaksanakan sebagai awal menuju program jangka panjang. Dengan demikian, semua pelaksanaan program terdapat saling mempengaruhi dan menunjang dalam mencapai target.
- 3) Prinsip Pengutamaan Tugas Pengelolaan
Pimpinan adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Internal artinya melaksanakan proses pengadministrasian semua aktivitas organisasi yang merupakan tugas utama pimpinan, sedangkan eksternal adalah pelayanan manajerial terhadap semua kepentingan publik yang berkaitan dengan aktivitas manajemen diluar kelembagaan.
- 4) Prinsip Kepemimpinan yang Efektif
Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan menghemat waktu, artinya tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Ia wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua anggotanya, cerdas merealisasikan *human relationship*.
- 5) Prinsip Kerja Sama
Prinsip kerja sama didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban pimpinan tidak diborong oleh satu orang, tetapi dikerjakan menurut keahlian dan tugasnya masing-masing, sehingga beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab seharusnya dipolarisasi berdasarkan prinsip profesionalitas sehingga kerja sama yang dibangun tidak berbelit-belit. Kerja sama diantara anggota berjalan sinergis dan mempermudah pelaksanaan tugas organisasi.

2.1.7 Pengertian Kawasan Suaka Margasatwa

Indonesia mengenal istilah kawasan dilindungi dengan kawasan konservasi atau kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Taufik, 2014:14).

Secara umum kebijakan pengelolaan Suaka Margasatwa Muara Angke didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konservasi, kehutanan dan lingkungan. Kebijakan konservasi sumberdaya alam di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diantaranya mengamankan penetapan kawasan konservasi dalam bentuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Aturan pelaksanaan pengelolaan KSA dan KPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011. Berikut definisi KSA dan KPA yakni sebagai berikut:

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terbagi menjadi dua lingkup kawasan yaitu Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Sedangkan Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011:2).

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a.) Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b.) Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c.) Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d.) Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e.) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f.) Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a.) Merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah;
- b.) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c.) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu; dan/atau
- d.) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkolerasi maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal sebagai bahan rujukan yang pembahasannya memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka berpikir dalam melakukan kajian. Berikut adalah bahan rujukan penelitian terdahulu diantaranya :

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan” ditulis oleh Evan Qurni Ardiana mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dipakai untuk menggambarkan keadaan tempat pembuangan akhir sampah yang masih terkendala lahan serta ketersediaan sarana prasarana yang kurang mendukung di lapangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari G.R Terry yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Hasil penelitian ini adalah belum maksimalnya proses revitalisasi tempat pembuangan akhir / TPA Cipeucang karena keterbatasan anggaran selain itu masih terkendala pembebasan

lahan TPA oleh pemerintah dengan warga di sekitar TPA Cipeucang serta kurangnya akses penghubung jalan untuk ke TPA sehingga menyulitkan operasi kendaraan pengangkut kerja.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yakni menggunakan teori yang sama milik G.R Terry dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yakni pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang melengkapi kegiatan tersebut serta lokus penelitian masing-masing.

Penelitian kedua adalah skripsi yang berjudul “Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove pada Kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” ditulis oleh Rizky Alfira mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekowisata, menganalisis kesesuaian ekowisata dan menentukan strategi pengembangan ekowisata mangrove di kawasan suaka margasatwa mampie. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua metode penelitian yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dari Rangkuti dan Saloso. Hasil penelitian ini adalah potensi ekowisata di ekosistem mangrove mampie adalah adanya berbagai satwa dalam jenis burung, strategi pengembangan ekowisata mangrove pada kawasan suaka margasatwa mampie adalah peningkatan sumber daya manusia, penanaman jenis mangrove penahan

abrasi secara berkala, pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan wisata dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yakni pada pembahasan kawasan suaka margasatwa dan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada analisis data menggunakan analisis SWOT dan perbedaan fokus penelitian yakni untuk melakukan pengembangan ekowisata mangrove di kawasan suaka margasatwa mampie.

Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah konsep manajemen dan objek suaka margasatwa. Namun fokus yang dikaji dalam penelitian ini berbeda, penelitian ini berfokus pada fungsi manajemen pengelolaan secara teknis dilapangan dengan mengambil konsep yang sama mengenai manajemen pengelolaan dan suaka margasatwa dari kedua penelitian terdahulu.

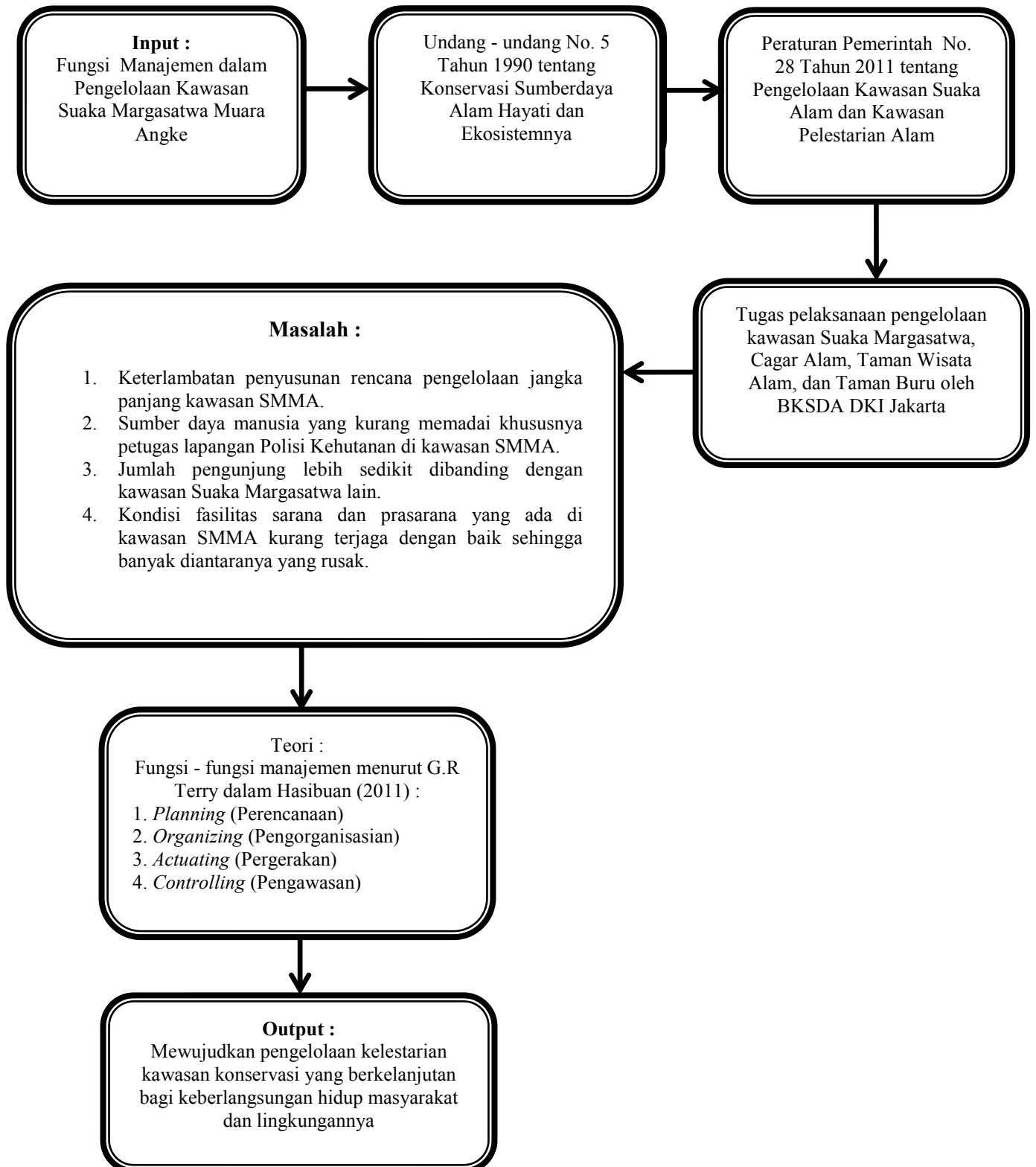
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir merupakan konsep mengenai hubungan teori dengan faktor-faktor yang dikaji yang merupakan permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan antar variabel. Kerangka berpikir merupakan proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karena dalam proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti dan bagaimana urutan penelitian itu dilakukan. Kawasan konservasi merupakan kawasan dilindungi yang memiliki

fungsi penyangga kehidupan yang secara tidak langsung dampaknya dapat dirasakan untuk menjaga kestabilan tanah, mengatur tata air, dan sebagai filter terhadap polusi udara. Pengelolaan kawasan suaka margasatwa serta kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa diperlukan adanya suatu manajemen. manajemen yang berfungsi untuk mengatur dalam membagi pekerjaan, tugas dan tanggungjawab serta membentuk kerjasama dalam suatu organisasi demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa oleh penyelenggara Negara / satuan perangkat daerah terkait dibidang kehutanan yang ada di Muara Angke - Jakarta Utara. Dari hasil pengamatan / observasi yang dilakukan peneliti di lokus penelitian, masih ditemui masalah-masalah terkait perencanaan dan pelaksanaan teknis yang diantaranya adalah keterlambatan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang untuk kawasan SMMA, pendayagunaan sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas, jumlah pengunjung kawasan SMMA lebih sedikit dibanding kawasan konservasi lainnya, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang baik sehingga menghambat proses pengelolaan itu sendiri.

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari observasi awal serta landasan teori yang dibahas sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori manajemen untuk mengetahui bagaimana peran serta upaya Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke di Jakarta Utara. peneliti cenderung berpedoman pada pendapat George R. Terry. adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat fungsi manajemen kedalam tahap-tahap meliputi : perencanaan yakni suatu proses memutuskan tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang dan melakukan sesuatu agar tujuan tersebut dapat tercapai, pengorganisasian yakni menciptakan bagian yang dapat diintegrasikan sehingga terikat hubungan satu sama lain secara keseluruhan, pergerakan yakni usaha dan teknik untuk mendorong anggota organisasi agar mau bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan dan pengawasan yakni pengerahan seluruh potensi organisasi yang terlibat dalam melakukan kegiatan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil refleksi dari penelitian berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar pada argumentasi. Pada penelitian ini membahas mengenai fungsi manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dilakukan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan yang sedang berlangsung di lokus penelitian.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Berdasarkan observasi ke lokasi penelitian bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan kawasan SMMA yang melihat pada empat fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan jangka panjang mengenai pengelolaan kawasan, pengorganisasian perangkat kerja dalam pembagian tugas dan tanggungjawab, pergerakan untuk mensosialisasikan kawasan, kerjasama dengan pihak ketiga, perawatan sarana prasarana yang ada di kawasan serta bentuk pengawasan yang dilakukan di kawasan SMMA. Jika salah satu fungsi mengalami kendala dan menghambatnya maka akan mempengaruhi fungsi fungsi lainnya.

Dari berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas, sehingga peneliti berasumsi bahwa dalam manajemen pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke di Jakarta Utara belum dilakukan secara optimal karena masih ditemui beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini berupaya memahami fungsi manajemen pengelolaan kawasan konservasi oleh perangkat pemerintah sebagai penyelenggara Peraturan Pemerintah yang diterapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan kawasan konservasi kepada sumber yang terkait dengan penelitian.

Metodelogi kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2012:4), yakni metodelogi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan Penelitian Kualitatif menurut Djunaidi dan Fauzan (2012:25) adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

Jadi, penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian data deskriptif berupa kata tertulis/lisan dari perilaku orang yang diamati. Serta dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa yang didalamnya menerapkan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yakni Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Fungsi Manajemen Pengelolaan Suaka Margasatwa dan Objek dilakukan di Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA) - Jakarta Utara.

3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Untuk menjawab permasalahan berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Adapun definisi konsep dalam penelitian mengenai Fungsi Manajemen Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke - Jakarta Utara yakni meliputi :

1) Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri, manajemen membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni yang melibatkan bimbingan dan pengarahan ke arah-arah tertentu demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

3.4.2 Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konsep penelitian, maka peneliti menggunakan teori Fungsi Manajemen menurut George R. Terry yaitu POAC yang terdiri dari : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pergerakan / Pengarahan), dan *Controlling* (Pengawasan), adapun indikator penilaian fungsi tersebut meliputi :

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan tidak bersangkut paut dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak akan datang dari keputusan-keputusan yang sekarang. Indikator penilaian dalam fungsi perencanaan adalah :

- a) Tujuan, merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
- b) Rencana Kegiatan, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan yang diharapkan.
- c) Pihak yang terlibat dalam Pengelolaan, yaitu sejumlah orang dengan kepentingan yang sama dalam melakukan pengelolaan.

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Indikator penilaian dalam fungsi pengorganisasian adalah :

- a) Struktur Organisasi, yaitu susunan unit-unit kerja yang membentuk kerangka kerja formal di dalam organisasi.
- b) Pembagian Tugas dan Tanggungjawab, yaitu suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dan hasilnya akan dipertanggungjawabkan nantinya.
- c) Hubungan Kerja, yaitu kegiatan pengerahan jasa seseorang secara teratur yang timbul dari kesepakatan bersama untuk jangka waktu tertentu.
- d) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, yaitu suatu pencapaian tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan.

3) Fungsi Pergerakan/Pengarahan (*Actuating*)

Pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Agar pergerakan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan fasilitas. Indikator penilaian dalam fungsi pergerakan adalah :

- a) Kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi/pemberian contoh oleh pemimpin kepada anggota organisasi.

- b) Komunikasi, yaitu interaksi secara lisan/tulisan antar anggota organisasi maupun luar organisasi.
- c) Kerjasama, yaitu suatu usaha yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang bersama.
- d) Sarana Prasarana, yaitu segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- e) Partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Indikator penilaian dalam fungsi pengawasan adalah :

- a) Bentuk Pengawasan, yaitu aplikasi kegiatan pengawasan yang dilakukan di lapangan.
- b) Laporan Pengawasan, yaitu hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan di lapangan.
- c) Perizinan Kawasan, yaitu proses/tahap memasuki kawasan konservasi.
- d) Evaluasi, yaitu penilaian hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif ini berdasarkan pada konteks masalah yang dikaji mengenai manajemen pengelolaan kawasan suaka margasatwa, peneliti sebagai instrument utama. Menurut Nasution dalam Prastowo (2011:43) peneliti adalah *key instrument* atau alat penelitian utama. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera dan lainnya.

Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian. Oleh karenanya peneliti dituntut harus mampu dan siap melakukan penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Sehingga yang dapat melakukan uji pada data di lapangan dan mengevaluasinya yaitu peneliti yang bersangkutan. Bila dilihat berdasarkan data maka dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 2 data yaitu :

3.5.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh adalah dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2012:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam merupakan teknik pengolahan data dengan pengumpulan data melalui percakapan secara intensif dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan tujuan tertentu dalam penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan seperti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- b) Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- c) Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan.

Tabel 3.1
Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Dimensi	Sub Dimensi	Deskripsi Pertanyaan	Informan
Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke Oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta	<i>Planning</i> (Perencanaan)	a. Apa tujuan rencana pengelolaan kawasan SMMA? b. Apa saja program dan kegiatan untuk kawasan SMMA ? c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan SMMA ?	I ₁ , I ₂ , I ₅
	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	a. Bagaimana struktur organisasi BKSDA DKI Jakarta dan SKW III ? b. Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab personil yang bertindak sebagai pengelola kawasan SMMA ? c. Seperti apa hubungan kerja antar anggota organisasi ? d. Apakah jumlah SDM dalam mengelola kawasan SMMA sudah cukup ?	I ₁ , I ₂
	<i>Actuating</i> (Pergerakan)	a. Seperti apa arahan pimpinan kepada anggota organisasi dalam	I ₁ , I ₂ , I ₄ , I ₅ , I ₆ , I ₇ , I ₈

		<p>pengelolaan kawasan SMMA ?</p> <p>b. Bagaimana interaksi yang dilakukan dalam mengenalkan kawasan SMMA ?</p> <p>c. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan SMMA ?</p> <p>d. Bagaimana cara melakukan perawatan sarana prasarana di kawasan SMMA ?</p> <p>e. Seperti apa dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kawasan SMMA ?</p>	
	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	<p>a. Seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan SMMA ?</p> <p>b. Bagaimana pelaporan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan ?</p> <p>c. Bagaimana proses perizinan masuk kawasan konservasi ?</p>	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄ , I ₆

		d. Bagaimana evaluasi dari hasil pengawasan yang dilakukan ?	
--	--	--	--

(Sumber : Peneliti, 2016)

2) Pengamatan / Observasi

Sutrisno Hadi dalam Satori (2010:105) mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, yakni memperhatikan secara akurat, mencatat yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut yang dilakukan guna untuk mengamati dan mencatat kondisi objek.

Pemahaman observasi yang dikemukakan oleh faisal dalam sugiyono (2009:227-228) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu :

- a) Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b) Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and concert observation*), dan
- c) Observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).

Adapun proses pelaksana observasi yang dilakukan dalam penelitian yakni observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Namun dalam pengambilan data observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga peneliti tidak

terlibat langsung dilapangan penelitian dan hanya menjadi pengamat yang independen.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:240) Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi literatur atau kepustakaan, dimana pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Studi dokumentasi, dimana pengumpulan data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan dihimpun dan dianalisis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber data penelitian tersebut. Untuk mempersempit fokus penelitian maka peneliti melakukan batasan penelitian dan menggunakan sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2009:215) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel dari yang diambil dari populasi itu. Penelitian mengenai Fungsi Manajemen Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, penentuan informan bersifat *purposive*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Jadi, penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informan penelitian sebagai sumber data bagi peneliti, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Informan dalam penelitian

No	Kode Informan	Status/Jabatan Informan	Keterangan
1	I_1	Kepala Seksi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta	<i>Key Informan</i>
2	I_2	Penyuluh Kehutanan Seksi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta	<i>Key Informan</i>
3	I_3	Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Kawasan	<i>Key Informan</i>
4	$I_{4.1}-I_{4.n}$	Polisi Kehutanan Kawasan SMMA	<i>Key Informan</i>
5	I_5	Lembaga Swadaya Masyarakat	<i>Secondary Data</i>
6	$I_{6.1}-I_{6.n}$	Peneliti Kawasan SMMA	<i>Secondary Data</i>
7	$I_{7.1}-I_{7.n}$	Pelajar dan Pengunjung Kawasan SMMA	<i>Secondary Data</i>
8	I_8	Masyarakat sekitar Kawasan SMMA	<i>Secondary Data</i>

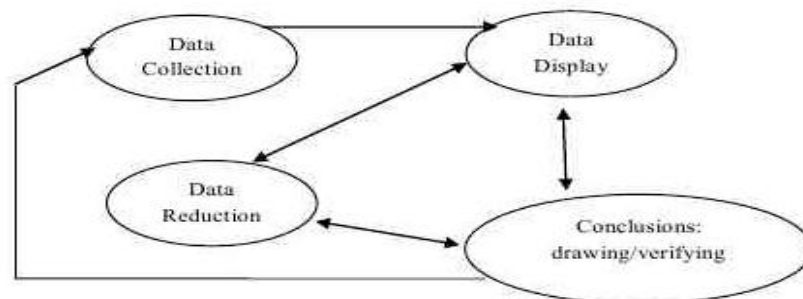
(Sumber : peneliti 2016)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009:224).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,

2009:225), menurut kedua tokoh tersebut, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dengan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh. Selama dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan tiga kepentingan diantaranya : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Komponen dalam analisis data

1) Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap.

2) Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data peneliti lakukan dalam bentuk teks narasi.

Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan dalam penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Tahapan selanjutnya yang merupakan tahap ketiga yaitu tahap analisis interaktif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu Triangulasi dan Member Check.

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan dengan pengecekan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2009:241). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari lapangan dengan beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data dengan lokasi yang sama tetapi waktu yang berbeda.

Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika berdasarkan kedua teknik tersebut menghasilkan temuan yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

2) Membercheck

Member Check adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada informan. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data dari apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2009:172). Selain itu *membercheck* yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tanda tangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*.

3.8 Jadwal Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.3
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu 2015-2016												
		Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016	Jul 2016	Aug 2016	Sep 2016	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016
1	Pengajuan judul	■	■											
2	Perizinan dan observasi awal		■	■	■									
3	Proses Bimbingan Bab I, II, III			■	■	■	■	■						
4	Seminar proposal Skripsi								■					
5	Proses pencarian data di lapangan								■	■	■			
6	Pengolahan data									■	■	■		
7	Proses Bimbingan Bab IV, V									■	■	■	■	
8	Sidang laporan Skripsi												■	■
9	Revisi laporan Skripsi												■	■

(Sumber : Peneliti 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum mengenai Kota Administrasi Jakarta Utara, gambaran umum mengenai Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta serta gambaran umum mengenai Suaka Margasatwa Muara Angke. hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Jakarta Utara

Kota Jakarta Utara merupakan salah satu kota administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. wilayah kota administrasi Jakarta Utara memiliki luas 146,66 km². Secara geografis terletak posisi koordinat antara 106⁰ 20' 00'' BT – 06⁰ 10' 00'' LS. Kota Jakarta Utara membentang pantai Laut Jawa dari Barat sampai ke Timur sepanjang sekitar 35 km, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, disebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Jakarta Barat dan Tangerang Provinsi Banten.

Kondisi wilayah Jakarta Utara sendiri yang merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Kota administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kec. Penjaringan, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Koja, Kec. Kelapa Gading serta Kec. Cilingcing dan 31 kelurahan, 446 RW dan 5.197 RT membuat wilayah ini rentan akan bencana banjir yang bisa datang kapan saja.

Gambar 4.1 Peta Jakarta Utara

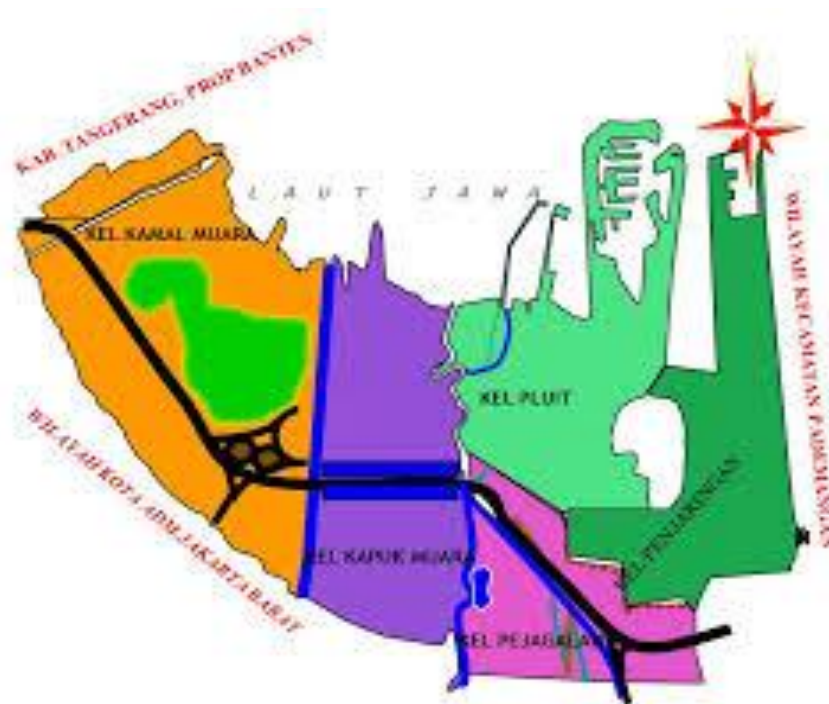


(Sumber : www.jakartautara.go.id)

Penduduk kota Jakarta Utara tahun 2015 adalah sebanyak 1.747.315 meningkat 17.871 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian membuat angka urbanisasi tinggi sehingga tingkat kepadatan penduduk terus meningkat dan rata rata tingkat kepadatan penduduk Jakarta Utara tahun 2015 sebanyak 11.914 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kec. Koja sebesar 24.950 per km², sedangkan yang terendah adalah Kec. Penjaringan 7.331 jiwa per km². Jika dirinci berdasarkan bahwa sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kec. Cilincing sebesar 403.287 jiwa (23,08%), Kec. Tanjung Priok sebesar 388.184 jiwa (22,22%), dan Kec. Penjaringan sebesar 332.864 jiwa (19,05%), serta Kec. Koja sebesar 305.479 jiwa (17,50%), sementara penduduk di Kec. Kelapa Gading dan Pademangan masing-masing kurang dari 10 persen.

Kecamatan Penjaringan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang berbatasan dengan Laut Jawa. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 171 tahun 2007 luas Kecamatan Penjaringan mencapai 45,4057 km². secara administrasi wilayah ini terbagi dalam lima kelurahan dengan luas masing-masing kelurahan yakni Kelurahan Kamal Muara dengan luas 10,5340 km², Kelurahan Kapuk Muara dengan luas 10,0550 km², Kelurahan Pejagalan dengan luas 3,2318 km², Kelurahan Penjaringan dengan luas 3,9543 km², serta Kelurahan Pluit dengan luas 7,7119 km².

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Penjaringan



Secara geografis Kecamatan Penjaringan terletak pada koordinat $05^{\circ} 10'$ – $05^{\circ} 15'$ LS dan $106^{\circ} 07'$ – $106^{\circ} 21'$ BT. Batas – batas wilayah Kecamatan Penjaringan adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Jl. Tubagus Angke , Kapuk Kamal Irigasi Rawa
Bebek Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sebelah Barat : Sungai Berok Pintu air, Kayu Besar Kelurahan
Dadap Kabupaten Tangerang Banten
- Sebelah Timur : Kali Opak sepanjang pelabuhan Sunda Kelapa dan
rel kereta api jurusan Kota atau Kelurahan Ancol

4.1.2 Gambaran Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah III DKI Jakarta

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta adalah organisasi pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan klasifikasi tipologi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta termasuk Tipe A dengan lima jabatan struktural terdiri dari : satu jabatan struktural yaitu Jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta berkedudukan di kantor Balai dan empat jabatan struktural masing-masing adalah : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I dan Seksi Konservasi Wilayah III berkedudukan di Kantor Balai, sedangkan Seksi Konservasi Wilayah II berkedudukan di Tegal Alur. Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta termasuk tipe A terdiri dari :

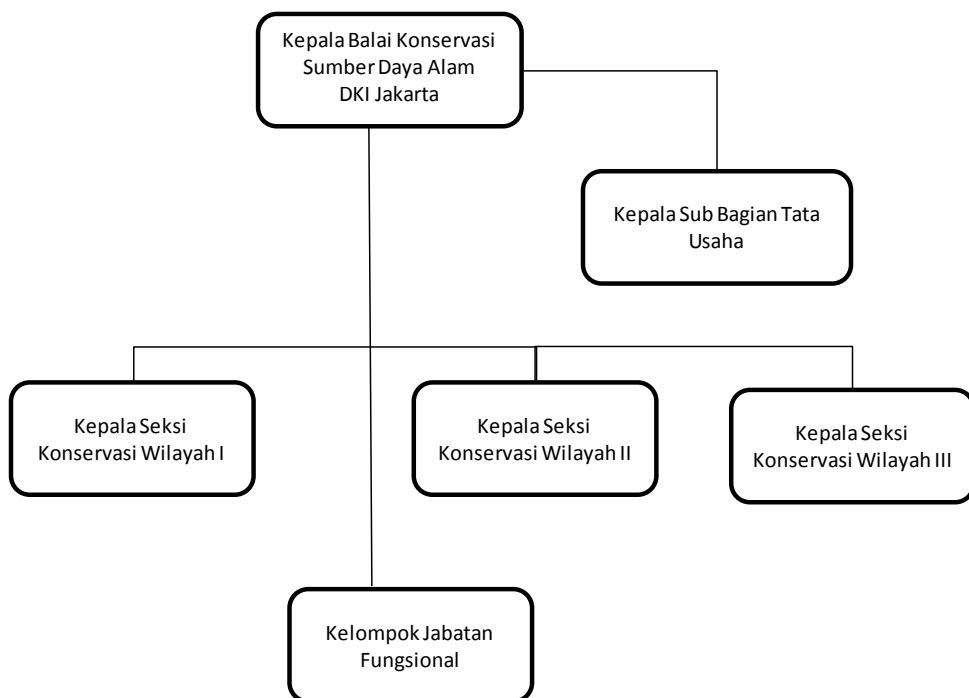
- a. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi konservasi Wilayah I
- d. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II
- e. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (POLHUT dan PEH, Penyuluh dan Pranata Komputer).

Bagan Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3

Bagan Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI

Jakarta



4.1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya

Alam DKI Jakarta

a.) Tugas Pokok

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKSDA DKI Jakarta mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi.
- e. Pengendalian kebakaran hutan.

- f. Promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- h. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
- k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

4.1.2.2 Struktur Organisasi Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI

Jakarta

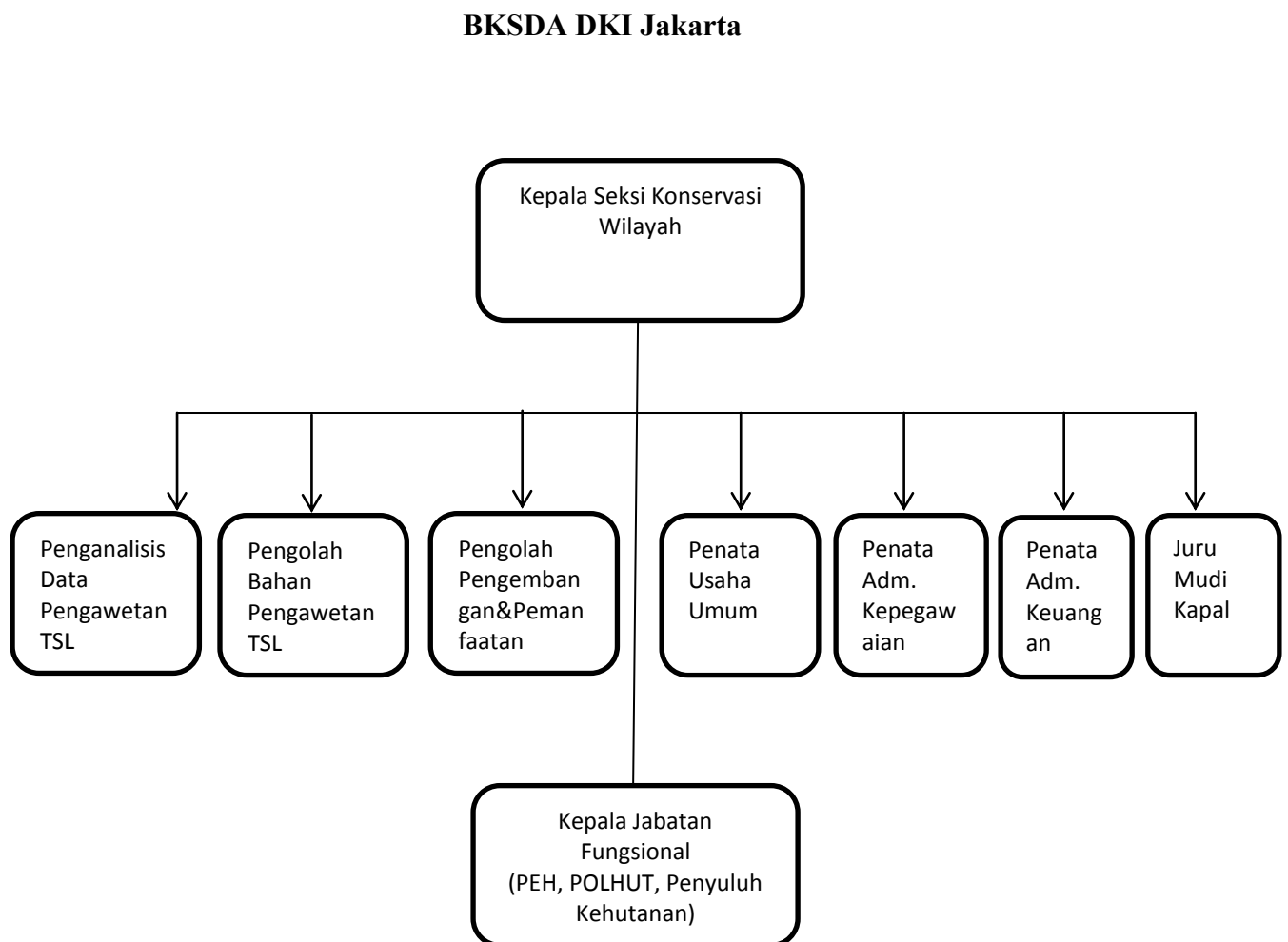
Seksi Konservasi Wilayah III merupakan perpanjangan tangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKSDA DKI Jakarta di wilayah Jakarta Utara, yang terdapat kawasan konservasi Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Suaka Margasatwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk.

Seksi Konservasi Wilayah III adalah jabatan struktural yang membawahi 7 (tujuh) jabatan non struktural yang terdiri dari : Penganalisis Data Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, Pengolah Bahan Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar di Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor, Pengolah Bahan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem, Penata Usaha Umum, Penata Administrasi Kepegawaian, Penata administrasi Keuangan, dan Juru Mudi Kapal.

Selain itu terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan Kepala unit serta Koordinator Wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Seksi Konservasi Wilayah III



4.1.2.3 Sumber Daya Manusia Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI

Jakarta

Jumlah SDM pada Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta tercatat sampai dengan tahun 2014 berjumlah sebanyak 25 pegawai yang bertugas sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing. Berikut adalah rincian nama pegawai pada lingkup Seksi Konservasi Wilayah III :

Tabel 4.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja
JABATAN STRUKTURAL			
1	Ida Harwati , S.Hut., M. Eng	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III	SKW III
JABATAN FUNGSIONAL UMUM			
1	Choirunisak, S.Hut	Penganalisis Data Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar	SKW III
2	Warsa Jaya	Pengolah Bahan Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dari kawasan SM P. Rambut dan CA P. Bokor	SKW III
3	Rianur Sagala	Pengolah Bahan Pengembangan dan Pemanfaatan SDAH & E	SKW III
4	Suharti	Penata Usaha Umum	SKW III
5	Marpiah	Penata Administrasi Kepegawaian	SKW III
6	Lasnam Sitorus	Penata Administrasi Keuangan	SKW III
7	Budi Kusuma Wardana	Juru Mudi Kapal di Kawasan SM. P. Rambut & CA. P. Bokor	SKW III
8	Aripin	Juru Mudi Kapal di Kawasan SM. Muara Angke &TWA Angke Kapuk	SKW III
JABATAN FUNGSIONAL POLHUT			
1	Darma Osra, S.Pi	Polhut Muda Kepala Unit SKW III	SKW III
2	Resijati Wasito	Polhut Penyelia Kawasan SM. Muara Angke dan TWA Angke Kapuk	SKW III
3	Tanton Sumartono	Polhut Pelaksana Kawasan SM. P. Rambut dan CA. P. Bokor	SKW III

4	Wawan Gunawan	Polhut Penyelia	Korwil Tj, Priok 1 & Jakut
5	Fachrizal Mansur	Polhut Pelaksana Lanjutan	Anggota Tj. Priok 1 & Jakut
6	Mohamad Rohman	Polhut Pelaksana	Anggota Tj. Priok 1
7	Dani Handrian	Polhut Pelaksana	Anggota Tj. Priok 1
8	Nandang Sunandar	Polhut Penyelia	Korwil Tj. Priok 2 & Jakut
9	Sukarman	Polhut Pelaksana Lanjutan	Anggota Tj. Priok 2 & Jakut
10	Najib Rahman	Polhut Pelaksana	Anggota Tj. Priok 2
11	Suwarto	Polhut Pelaksana	Anggota Tj. Priok 2
JABATAN FUNGSIONAL PEH			
1	Nani Rahayu, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Muda Koordinator PEH	SKW III
2	Elpramit Sumartanto, S.Hut	Calon Pengendali Ekosistem Hutan	SKW III
3	Dede Fauzi	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	SKW III
4	Isep Kristiadi	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	SKW III
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KEHUTANAN			
1	Rizki Prima, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama Koordinator Penyuluh Kehutanan	SKW III

(Sumber: Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta Tahun 2014)

4.1.3 Deskripsi Wilayah Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

4.1.3.1 Batas Administratif dan Geografis

Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke masuk wilayah Kelurahan Kapuk Muara dan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta seluas 25,02 Ha, secara geografis terletak pada $106^{\circ}43''$ - $106^{\circ}48''$ BT dan $6^{\circ}06''$ - $6^{\circ}10''$ LS, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Hutan Lindung Angke Kapuk
- Timur : Sungai Angke dan perkampungan nelayan Muara Angke
- Selatan : Pantai Indah Kapuk (PT. Mandara Permai)
- Utara : Laut Jawa

4.1.3.2 Sejarah dan Batas Pengukuhan

Suaka Margasatwa Muara Angke ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (GHB) Nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 seluas 15,40 Ha. Pada tahun 1977, Menteri Pertanian melalui Keputusan Nomor 161/Kpts/Um/6/1977 tanggal 10 Juni menetapkan kembali peruntukan kawasan Tegal Alur - Angke Kapuk sebagai :

- a) Hutan Lindung, 5 Km sepanjang pantai dengan lebar 100 m
- b) Cagar Alam Muara Angke
- c) Hutan Wisata;
- d) Kebun Pembibitan Kehutanan; dan
- e) Lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LDTI).

Pada tahun 1988, terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 097/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 yang menetapkan bahwa kawasan hutan yang dipertahankan adalah seluas 333,50 Ha. Namun berdasarkan hasil tata batas di lapangan dan Berita Acara Tata Batas yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 1994 oleh Panitia Tata Batas yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta Nomor 924 tahun 1989 tanggal 12 Juli 1989 diketahui bahwa hutan yang dipertahankan adalah seluas 327,70 Ha. Sehubungan dengan itu, Menteri Kehutanan menetapkan kembali peruntukan dan fungsi kelompok Hutan Angke Kapuk seluas 327,70 Ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1995 tanggal 15 Desember 1995 sebagai :

- a) Hutan Lindung 44,76 Ha;
- b) Hutan Wisata 99,82 Ha;
- c) Cagar Alam Muara Angke 25,02 Ha; dan
- d) Lahan Dengan Tujuan Istimewa (LDTI) : 1) Kebun Pembibitan 10,51 Ha; 2) Transmisi PLN 23,70 Ha; 3) Cengkareng Drain 28,39 Ha; dan 4) Jalan tol dan Jalur Hijau 95,50 Ha.

Selanjutnya Cagar Alam Muara Angke dikukuhkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 755/Kpts-II/1998 tanggal 26 Nopember 1998 dengan luas areal 25,02 Ha. Kemudian pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000, Suaka Margasatwa Muara Angke seluas 25,02 Ha menjadi salah satu kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Propinsi DKI Jakarta.

4.1.3.3 Potensi Kawasan

a) Potensi Fisik (Non Hayati)

Kawasan SMMA merupakan dataran rendah dengan topografi datar mendekati pantai. Ketinggian tempatnya hingga 2 m, jenis tanah di sebelah Utara dan Tenggara pantai adalah alluvial kelabu tua dengan tekstur lempung liat berhumus rendah, sebelah Selatan termasuk tanah regosol coklat yang terbentuk dari endapan pasir. Iklim SMMA termasuk ke dalam tipe A (Schmidt dan Ferguson). Suhu maksimum udara rata-rata harian berkisar sebesar 27,3°C, suhu minimum sebesar 25,9°C. Sedimen dasar perairan merupakan habitat bagi jenis bentos, sekaligus juga mengakumulasi berbagai bahan pencemar yang mengendap terutama logam-logam berat.

b) Potensi Biotik (Hayati)

Kawasan SMMA memiliki 4 (empat) tapak berbeda, yaitu dominasi *Rhizophora* sebelah Barat kawasan sebanyak 6 (enam) jenis, dominasi rumput dan semak belukar merupakan daerah terluas di kawasan SMMA sebanyak 15 jenis, dominasi peralihan rumput dijumpai dekat tanah merah sebanyak 10 jenis dan dapat dijumpai asosiasi jenis pidada (*Sonneratia caseolaris*). Tapak tanah kering (semak belukar) dapat dijumpai di sebelah Barat sepanjang Sungai Angke yang memiliki ciri khas tumbuhan pembeda dengan tapak lainnya seperti ketapang (*Terminalia catappa*), akasia (*Acacia auriculiformis*), kelapa (*Cocos nucifera*), dan lain-lain (Hasil Analisis Vegetasi LPPM-RPSMMA, 2000).

Sementara jenis fauna Mamalia yang ada di kawasan SMMA hanya dijumpai monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Potensi jenis Aves di kawasan SMMA yang berdekatan dengan Hutan Lindung sekitar 17 individu jenis yang dilindungi, 10 jenis burung migran, dan 50 jenis burung menetap. Jenis Reptil yang dapat dijumpai adalah kura-kura, biawak (*Varanus salvator*), ular welang (*Bungarus fasciatus*), ular daun (*Dryopis sp.*), dan lain-lain (Hasil Inventarisasi Satwa Liar LPPM-RPSMMA, 2000). Biota perairan di kawasan SMMA dijumpai jenis ikan sapu-sapu (*Hypotamus sp.*), gabus (*Ophiocephalus striatus*), dan lain-lain yang jumlahnya sudah sangat sedikit (KP2L Pemda DKI 1998 dalam LPPM-RPSMMA 2000).

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian lapangan. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai manajemen pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke oleh seksi konservasi wilayah III BKSDA DKI Jakarta. penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut George Terry. Teori tersebut memberikan penjelasan mengenai kegunaan manajemen, tujuan dan fungsi manajemen, serta prinsip yang ada di dalam manajemen. Dalam pemaparannya manajemen dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta sampai pada tahap pengawasan yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke. dalam hal ini pihak pihak yang terkait

antara lain Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat sekitar kawasan suaka margasatwa muara angke.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sehingga data yang peneliti dapatkan lebih banyak data berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui proses wawancara dan hasil observasi dilapangan. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah catatan berupa catatan lapangan peneliti seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapat dari BKSDA DKI Jakarta. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto dilapangan yang merupakan foto kegiatan yang menggambarkan suasana di Objek Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

4.2.2 Informan Penelitian

Seperti yang peneliti jelaskan pada bab 3 sebelumnya, bahwa pengumpulan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu suatu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tetentu dari pihak peneliti yang memahami objek dan fokus penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan fokus penelitian ini, subjek yang dijadikan informan utama antara lain petugas pada Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelajar/Peneliti kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan

Suaka Margasatwa Muara Angke tersebut. adapun informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Informan

No.	Kode Informan	Nama	Keterangan / Jabatan	Gol	Jenis Kelamin	Umur
<i>Key Informan</i>						
1.	I _{1.1}	Ida Harwati, S.Hut., M. Eng	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III	III/d	Perempuan	38 Tahun
2.	I ₂	Rizky Prima, S.Hut	Penyuluh Kehutanan	III/b	Laki-laki	31 Tahun
3.	I ₃	Benediktus Sarpumpwain	Pengolah Bahan dan Pelayanan Kawasan	II/a	Laki-laki	40 Tahun
4.	I _{4.1}	Resijati Wasito	Polisi Kehutanan Kawasan SMMA	III/c	Laki-laki	57 Tahun
5.	I _{4.2}	Aripin	Staff dan Jurumudi Kapal Kawasan SMMA	II/b	Laki-laki	38 Tahun
<i>Secondary Data</i>						
6.	I ₅	Merryana Elmyta	LSM Inisiasi Alam Rehabilitasi (IAR)	-	Perempuan	25 Tahun
7.	I _{6.1}	Watri	Peneliti	-	Laki-laki	26 Tahun
8.	I _{6.2}	Novi	Peneliti	-	Perempuan	21 Tahun
9.	I _{7.1}	Dina Rizky	Pelajar	-	Perempuan	17 Tahun
10.	I _{7.2}	Rosyid A	Pelajar	-	Laki-laki	17 Tahun
11.	I _{7.3}	Iman	Guru	-	Laki-laki	36 Tahun
12.	I ₈	Ratna	Masyarakat	-	Perempuan	32 Tahun

(Sumber: Peneliti, 2016)

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori manajemen menurut George Terry dalam Hasibuan (2011), dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan manajemen pengelolaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dikelola oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Penelitian mengenai manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini menggunakan teori fungsi manajemen menurut George Terry yang meliputi *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pergerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Dalam deskripsi hasil penelitian ini akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan dengan masing-masing fungsi manajemen menurut George Terry.

4.3.1 *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam manajemen. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan tidak bersangkut paut dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak yang akan datang dari keputusan-keputusan sekarang (Hasibuan, 2011:91). Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta, menentukan jalan kegiatan yang akan diikuti, dan memperkirakan waktu, tenaga dan bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Tujuan dari adanya perencanaan adalah menetapkan suatu kegiatan, tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan dapat memberikan arah dalam melakukan kegiatan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan menyangkut beberapa unsur diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam suatu waktu tertentu (Usman, 2011:66). Dengan kata lain perencanaan merupakan proses pemikiran secara utuh dan matang dengan penetapan tujuan yang akan dicapai dengan pemilihan usaha-usaha yang dapat dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, maka pengelolaan kawasan konservasi didasarkan atas perencanaan jangka panjang yang kemudian dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Dalam merencanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke bahwa rencana strategis pengelolaan ditetapkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diturunkan melalui Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta yang disesuaikan dengan keadaan di masing-masing kawasan konservasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida Harwati (I₁) selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

“Mengenai perencanaan pengelolaan kawasan konservasi sendiri disusun secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang didalamnya itu terdapat rencana pengelolaan yang dilakukan untuk mengelola kawasan suaka alam melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pengendalian (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan terkait Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

dengan teknis pengelolaan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pengendalian.

Rencana pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke didasarkan pada rencana pengelolaan kawasan konservasi, peraturan perundangan terkait serta kebijakan pemanfaatannya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta telah membuat Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Muara Angke periode 2016-2025 selama 10 tahun yang sebelumnya memuat rencana kerja dengan kegiatan selama satu tahun. Terkait tujuan pengelolaannya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida Harwati (I₁) selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

“Jadi rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa disusun berdasarkan aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. dengan melakukan upaya perlindungan dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu rencana pengelolaan suaka margasatwa ini juga sebagai pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan juga untuk keperluan wisata alam terbatas (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Selasa, 23 Agustus 2016 pukul 15.16 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa rencana pengelolaan untuk kawasan Suaka Margasatwa Mauara Angke dikaji sesuai dengan unsur lingkungan dan sosial yang mengarah pada kelestarian kawasan, dan kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai media belajar dan berbagi informasi mengenai kawasan konservasi, selain itu dapat digunakan sebagai penunjang ilmu pengetahuan dengan wisata alam terbatas yang disediakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) Selaku Penyuluh Kehutanan yang menyatakan bahwa :

“Arah pengelolaan suaka margasatwa muara angke itu adalah menjadikan suaka margasatwa muara angke ini sebagai pusat pendidikan konservasi terutama pada mangrove dan lahan basah di Jakarta, kawasan dapat menjadi media edukasi mengenai konservasi bagi kepentingan penelitian serta pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Jakarta. Selain itu kawasan ini bisa digunakan untuk wisata alam terbatas sehingga tidak menghilangkan fungsi dan status kawasannya walaupun jika dilihat kondisinya sekarang mengalami kendala dari faktor alam seperti banjir, faktor manusia seperti membuang sampah, dan polusi dari kegiatan pembangunan disekitar kawasan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa arah dan tujuan pengelolaan kawasan Suka Margasatwa Muara Angke untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dilakukan di kawasan-kawasan konservasi. dengan berupaya menjadikan kawasan sesuai dengan fungsinya walaupun masih terkendala oleh faktor fisik maupun non fisik yang berakibat manfaatnya tidak optimal dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan kedua informan tersebut maka dapat diketahui bahwa rencana pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke mengarah pada terciptanya kawasan sebagai pusat pendidikan lingkungan yang ada di pesisir Jakarta agar dapat berkesinambungan dengan pembangunan di sekitarnya mengingat letak kawasan dekat dengan pemukiman, dengan beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan, dan dengan pemanfaatan kawasan untuk wisata alam terbatas yang bertujuan agar tetap terjaga sesuai statusnya sebagai Kawasan Suaka Alam.

Dalam menunjang pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, rencana kegiatan dibuat untuk memberikan arah dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan dari penyusunan rencana pengelolaan yang telah dibuat. Terkait dengan rencana kegiatan yang telah disusun dalam rencana pengelolaan maka Ibu Ida (I₁) menjelaskan sebagai berikut :

“Rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke sekarang berdasarkan blok blok kawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya dimana setiap kawasan konservasi itu harus dibagi kedalam blok-blok pengelolaan mulai dari penyusunan dan pemetaan, pematangan batas blok sampai dengan sosialisasi blok, blok-blok pengelolaan itu tujuannya untuk memudahkan pengelolaan juga untuk membatasi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan. Untuk kajian pengelolaan diterapkan melalui analisis swot dengan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan keadaan kawasan mulai dari perumusan visi dan misi yang dilanjutkan dengan pembuatan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi tersebut (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Selasa, 23 Agustus 2016 pukul 15.16 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu ida, dapat diketahui bahwa Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Muara Angke untuk waktu 10 tahun kedepan yakni berdasarkan blok-blok kawasan yang sebelumnya ditetapkan dengan tujuan mempermudah Seksi Konservasi Wilayah III dalam mengelola kawasan. Dengan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari visi dan misi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kawasan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) mengenai rencana kegiatan dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke adalah sebagai berikut :

“Dalam pedoman rencana pengelolaan kawasan suaka marga satwa muara angke untuk jangka waktu 10 tahun kedepan itu sebelumnya ada penetapan blok kawasan, baru setelah itu dibuat rencana pengelolaan dengan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misinya. Adapun program yang menjadi prioritasnya terdiri dari program paket pendidikan lingkungan, selain itu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana, pengawetan keanekaragaman hayati, pemanfaatan wisata alam terbatas, pengembangan koordinasi pengelolaan sampai dengan pengolahan data base potensi kawasan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Selasa, 23 Agustus 2016 pukul 15.44 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke memiliki rencana pengelolaan yang memuat program dengan kegiatan pendukungnya yang diharapkan berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan kedua wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa penataan blok-blok kawasan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke guna menjamin kelestarian dan fungsi kawasan itu sendiri. Saat ini Suaka Margasatwa Muara Angke terbagi menjadi empat blok pengelolaan yang terdiri dari blok perlindungan seluas 9,49 Ha (38%), blok pemanfaatan seluas 10,79 Ha (43%), blok rehabilitasi 3,71 Ha (15%) dan blok khusus seluas 1,03 Ha (4,11%).

Dengan rencana pengelolaan jangka panjang selama 10 tahun maka dibuat tujuh program dengan kegiatan pendukung sesuai dengan visi pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai pusat pendidikan lingkungan dan suaka burung air.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke telah disusun demi menjawab kebutuhan kawasan dalam kurun waktu selama sepuluh tahun kedepan, tetapi dalam prosesnya pembuatan RPJP mengalami keterlambatan dari yang seharusnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku, hal ini dijelaskan oleh Ibu Ida (I₁) sebagai berikut :

“kita memang terlambat untuk menyusun rencana pengelolaan harusnya begitu kawasan ditetapkan maka segera disusun rencana pengelolaan tetapi kita terlambat, jadi kita selama ini sebelum ada rencana pengelolaan pekerjaannya tidak fokus karena tidak tahu apa yang menjadi visi Suaka Margasatwa Muara Angke, dari tahun 2011 memang sudah ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan KSA dan KPA yang harus dibuat rencana pengelolaannya tapi terlambat jadi pengelolaan yang kemarin tidak tahu arahnya kemana, nah karena sekarang sudah ada rencana pengelolaan yang terbentuk jadi memiliki goal untuk 10 tahun lagi kawasan akan seperti apa, apa yang ingin dicapai dan step-step nya akan lebih jelas (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Selasa, 23 Agustus 2016 pukul 15.16 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa proses penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang untuk Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke mengalami keterlambatan dan membuat beberapa kegiatan tidak memiliki konsep matang sehingga pengelolaan menjadi tidak tentu arah. Rencana pengelolaan harusnya sudah dibentuk sesuai dengan peraturan yang menaunginya yakni peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan yang dilakukan

sebelumnya berjangka pendek selama setahun dan hasilnya berupa Laporan Tahunan Kegiatan. Tetapi sekarang sudah terbentuk rencana pengelolaan untuk jangka panjang dengan bertahap menyusun kegiatan untuk 10 tahun kedepan sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Potensi merupakan kemampuan atau kekuatan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi kawasan berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi kawasan tersebut maupun sekitarnya. Potensi kawasan merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. terkait potensi dominan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke Ibu Ida (I₁) menyatakan sebagai berikut :

“Potensi dominan yang ada di kawasan adalah mangrove itu sendiri karena letak kawasan dekat dengan perairan laut dan sungai tentunya kawasan ini memiliki peran penting sebagai pencegah banjir untuk daerah sekitar kawasan dan sumber kehidupan bagi nelayan yang mencari nafkah di perairan sekitar kawasan dan sebagai habitat satwa yang memang disekitar mangrove itu sendiri (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky (I₂) sebagai berikut :

“Potensi dominan yang ada di suaka margasatwa muara angke adalah kesatu lokasinya strategis mudah untuk diakses secara fisik, kalau secara ekologi bisa dibilang sangat potensial untuk studi riset karena tinggal itu saja yang statusnya kawasan konservasi di Jakarta, selanjutnya masih banyak jenis satwa yang ada di kawasan terutama burung dan monyet, suasana di kawasan juga terasa nyaman dan tenang dapat dilihat bahwa viewnya itu berbeda seperti tidak berada di Jakarta (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Begitu pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bene (I₃) adalah :

“Rata-rata yang kekawasan itu biasanya untuk penelitian kalau yang komersil kayanya gak ada, saat ini memang untuk pendidikan konservasi saja, anak-anak sekolah biasanya datang untuk observasi terkait tugas sekolah mereka. potensi lebih ada di mangrovenya untuk mencegah abrasi dari pantai utara Jakarta (Sumber: Wawancara dengan Bapak Bene, hari Senin, 18 April 2016 pukul WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Suaka Margasatwa Muara Angke memiliki potensi dominan terutama pada tumbuhan mangrove yang dimana tumbuhan mangrove sendiri memiliki fungsi sebagai pencegah abrasi pantai dan tempat bertelurnya ikan sehingga secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi kehidupan nelayan yang ada disekitar kawasan serta jenis satwa burung dan monyet yang ada didalamnya, selain itu suasana di dalam kawasan terlihat masih asri dan tenang sehingga pengunjung dapat merasakan suasana yang berbeda dari wilayah Jakarta.

Dalam manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang ikut terlibat berasal dari beberapa lapisan elemen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas, Kelurahan serta masyarakat, terkait dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan yakni seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida (I₁) adalah sebagai berikut :

“Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat ada yang bersifat insidental seperti pendidikan lingkungan, penanaman, dan bersih sampah. Selain itu yang rutin turut serta mengelola mengenai monitoring satwa monyet ekor panjang adalah LSM IAR. Kami juga bekerjasama dengan pihak kelurahan Angke dan juga beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”. ”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan kawasan, pihak BKSDA DKI Jakarta dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam monitoring satwa di kawasan yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan jumlah satwa yang ada sampai saat ini, selain itu turut melibatkan pihak kelurahan dalam sosialisasi kepada masyarakat serta berkontribusi dengan beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Senada dengan yang dinyatakan oleh Bapak Rizky (I₂) mengenai pengelolaan Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai berikut :

“Kalau pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke ya sudah pasti pihak Balai KSDA DKI Jakarta, kalau eksternalnya ada masyarakat, dari kelurahan ada Pak Lurah yang mengkoordinir untuk melaksanakan tugas kebersihan setiap minggu di suaka margasatwa muara angke, yang kedua ada dari LSM IAR yang melaksanakan program mitigasi konflik satwa, selain itu dari pihak swasta juga ada yakni perusahaan untuk penguatan fungsi suaka margasatwa muara angke, ia banyak membantu dalam alat alat kebersihan, untuk masyarakat sekitar kalau kita mengadakan kegiatan kita selalu mengundang masyarakat untuk hadir, terus masyarakat yang lain diluar suaka margasatwa muara angke juga ada seperti komunitas-komunitas biasanya, ada komunitas Transformasi Hijau Indonesia mereka sering mengadakan kegiatan di suaka margasatwa muara angke ada juga Forum Komunikasi Kader Konservasi kegiatannya adalah pengamatan burung dan bersih sampah (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan baik dari BKSDA DKI Jakarta maupun lembaga masyarakat dapat memberikan manfaat kepada masing-masing pihak yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Hal serupa diungkapkan oleh Merry (I₅) sebagai anggota LSM IAR adalah :

“Bentuk kerja yang dilakukan IAR secara teknis melakukan sendiri, kegiatannya meliputi pengambilan data, hasil dan laporan kegiatan yang berlangsung di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, kalau BKSDA bertindak sebatas perizinan untuk mengadakan kegiatan di Kawasan (Sumber: Wawancara dengan Merry, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 13.02 WIB di Kawasan Ekowisata Mangrove Jakarta Utara).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Merry, dapat diketahui bahwa peran LSM dalam membantu pengelolaan kawasan konservasi cukup penting karena dapat menunjang data bagi kawasan yang hasilnya akan dilaporkan kepada BKSDA DKI Jakarta, begitu pula dengan hasil yang akan didapat oleh LSM IAR sesuai dengan kebutuhan organisasinya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan yang dilakukan baik secara internal ataupun eksternal dengan tujuan yang sama maka setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh hasil dan timbal balik bagi organisasinya sekaligus sebagai ajang pembinaan mitra kerja dengan pihak yang terlibat dalam melakukan pengelolaan serta dapat meningkatkan koneksi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

4.3.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tindakan yang mengusahakan hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2011:119).

Dengan adanya pengorganisasian akan membantu pembagian tugas sesuai dengan keadaan organisasi.

Dalam organisasi dan manajemen Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan pasal 22 ayat 2, Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestrai, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan dan satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, kerjasama di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, kerjasama di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, serta kerjasama di bidang rehabilitasi satwa liar di wilayah kerjanya.

Setiap organisasi harus memiliki tujuan, dimana tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan penerimaan dan pemahaman tujuan yang hendak dicapai melalui daya upaya kerja sama yang teratur dan terus-menerus antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini akan mengarah kepada struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggungjawab, pola hubungan kerja serta sumber daya manusia. Dalam Manajemen Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke mengenai struktur organisasi yang dimiliki oleh BKSDA DKI Jakarta yang terdiri dari tiga seksi konservasi dengan beban dan tanggungjawab pengelolaan kawasan di masing-masing wilayah kerjanya, Ibu Ida (I₁) menyatakan sebagai berikut :

“Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta didalamnya membawahi tiga seksi konservasi wilayah, kalau seksi konservasi wilayah I itu wilayah kerjanya meliputi wilayah Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, seksi konservasi wilayah II meliputi wilayah Tangerang dan Jakarta Barat, dan seksi konservasi wilayah III itu meliputi wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu. Dan Suaka Margasatwa Muara Angke ada di daratan Jakarta Utara (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa setiap seksi konservasi wilayah memiliki wilayah kerja dengan masing-masing kawasan konservasi yang dikelola dan kawasan suaka margasatwa muara angke terdapat dalam wilayah kerja seksi konservasi wilayah III dimana letak kawasan tersebut dilewati oleh perairan sungai angke dan dikelilingi oleh perumahan membuat kawasan ini bersentuhan dengan aktivitas masyarakat disekitarnya.

Pendapat lain dengan pembahasan yang sama diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) sebagai berikut :

“Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dibagi dalam tiga seksi pengelolaan, seksi konservasi wilayah namanya, nah suaka margasatwa muara angke ini terdapat dalam lingkup seksi konservasi wilayah III termasuk cagar alam pulau bokor, suaka margasatwa pulau rambut dan taman wisata angke kapuk juga, kebetulan seksi wilayah III sebagian jatah empat kawasan konservasi dalam pengelolaannya (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa terdapat empat kawasan konservasi dikelola oleh Seksi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta yang tertampung pada wilayah kerjanya sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan sumber daya yang maksimal untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan oleh seksi konservasi wilayah III.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut maka dapat diketahui bahwa struktur organisasi BKSDA DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yakni Kepala Balai yang membawahi tiga seksi wilayah konservasi (SKW) dengan masing-masing fungsinya, kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke terdapat dalam lingkup pengelolaan oleh Seksi Konservasi Wilayah III dimana letak kawasan berada di sepanjang aliran sungai angke.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia akan dikerahkan pada pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pembagian tugas yang sesuai maka setiap pembagian tugas pengelolaan kepada petugas dalam lingkup Seksi Konservasi Wilayah III, Ibu Ida (I₁) menyatakan sebagai berikut :

“Setiap personel petugas yang ada pada seksi konservasi wilayah III sudah memiliki tugasnya masing-masing, ada yang bertindak merencanakan kegiatan di kawasan, ada yang bertugas pengamanan di kawasan ada yang melakukan pendataan isi kawasan seperti satwa dan tumbuhan yang nantinya akan dibahas bersama sama di kantor untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi kawasan sampai dengan pada tahap evaluasi dan pelaporan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa Seksi Konservasi Wilayah III memiliki sumber daya manusia dalam lingkup kerja yang sudah diberikan tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan merupakan konsekuensi dari beban tugas yang sudah diterima yang nantinya akan di pertanggungjawabkan hasilnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) terkait prosedur dalam melakukan pengelolaan adalah sebagai berikut :

“Setiap kegiatan yang berhubungan dengan kawasan konservasi sudah ada standarnya masing-masing yang diberi nama Norma Standar Pelaksanaan Kegiatan dan itu dibagi-bagi secara spesifik tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan untuk kawasan konservasi sudah memiliki standar pelaksanaan kegiatan sendiri yang dibagi kedalam rincian spesifik mengenai tugas yang akan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap petugas pengelola sudah memiliki bagian tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan kegiatannya. Penentuan norma standar kegiatan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Dalam pelaksanaan tugasnya Seksi Konservasi Wilayah III tidak terlepas dari lingkungan luar dan wilayah kerja yang lain, hal ini juga dapat menggabungkan koordinasi yang menjadikan kesatuan arah dalam lingkaran pengelolaan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Ibu Ida (I₁) menjelaskan sebagai berikut :

“Kegiatan internal dari pihak BKSDA DKI Jakarta yakni seperti polisi kehutanan melakukan patroli kawasan dan bersih sampah , kalau dengan pak lurah melakukan kegiatan penanaman serta sosialisasi kawasan kepada masyarakat, sedangkan dengan lembaga swadaya masyarakat itu kegiatannya monitoring dan pendataan kawasan lalu dengan pihak pengembang perumahan pantai indah kapuk (PIK) adalah pemasangan atribut yang berhubungan dengan kawasan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan kawasan pihak BKSDA DKI Jakarta pada seksi konservasi wilayah III melakukan hubungan kerjasama baik dari segi pemerintah, swasta, lsm sampai dengan masyarakat dengan tujuan menjaga kawasan agar tetap lestari karena baik secara langsung ataupun tidak langsung, kawasan tersebut akan memberikan dampak bagi kehidupan manusia dan sekitarnya.

Begitu pula pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rizky (I₂) terkait bagaimana hubungan kerja pada setiap seksi wilayah konservasi yang terlibat yakni :

“Hubungan kerja dilihat dari struktur organisasi, masing-masing seksi itu berjalan sendiri, anggaran dari balai, kepala balai yang mengatur anggaran dan perencanaan, untuk pelaksanaan seksi konservasi tergantung daerahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika seksi wilayah III kekurangan sumber daya itu bisa menarik lagi dari seksi yang lain seperti jabatan fungsional yang gak terbatas sama wilayah kerja karena sistemnya keahlian. Fungsional khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan ada tiga yang dibina yakni Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan secara administratif diberikan kewenangan pada setiap seksi, akan tetapi dalam hal pengaplikasian di lapangannya dapat bekerjasama dengan seksi wilayah lain terutama pada orang yang memiliki keahlian khusus sehingga dapat bekerja secara fleksibel.

Berdasarkan wawancara dengan kedua informan tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap seksi konservasi wilayah masing-masing dapat saling mendukung baik dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. dengan demikian dalam hal ini mengenai pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke setiap seksi konservasi wilayah memahami adanya kesatuan arah dalam pengelolaan yang mengintegrasikan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.

Dalam melakukan sebuah kegiatan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas secara mutu karena penggerak dari jalan atau tidaknya sebuah kegiatan karena adanya sumber daya manusia yang dapat mengaplikasikan kegiatan tersebut secara nyata. Tidak mudah menentukan kecukupan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini seksi konservasi wilayah III terkait bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki, Ibu Ida (I₁), memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Jumlah sumber daya manusia di BKSDA DKI Jakarta terutama pada seksi wilayah III sebenarnya masih belum cukup, terlebih lagi dengan adanya rangkap jabatan dari polisi kehutanan. Jumlah SDM polhut di kawasan SMMA saat ini hanya ada 2 orang padahal idealnya dalam satu kawasan minimal ada 4 orang yang terdiri dari 2 orang polisi kehutanan 1 orang PEH dan 1 orang penyuluh kehutanan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada dilingkup kerja seksi konservasi wilayah III terbilang masih belum cukup dan masih belum memenuhi karakter idealnya, jumlah petugas yang masih kurang membuat adanya peran rangkap jabatan yang memungkinkan dapat terjadi kesalahan dalam melakukan tugas dan juga masih memerlukan petugas dengan sistem keahlian khusus dibidangnya.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) sebagai berikut :

“BKSDA DKI Jakarta kekurangan sumber daya manusia dilapangan baik secara kualitas dan kuantitas ya, perhitungannya untuk wilayah DKI Jakarta, pengelolaan BKSDA itu kan satu wilayah DKI Jakarta itu kurang lebih hanya 130 orang dan harus dibagi-bagi untuk satu wilayah DKI Jakarta, sementara kebijakan dari Menpan sendiri adanya moratorium PNS, jadi di BKSDA DKI Jakarta masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi kepada pegawai yang ada (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa jumlah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta khususnya pada seksi konservasi wilayah III masih kurang dan belum ideal secara ketentuan sehingga memungkinkan terjadinya rangkap jabatan dalam pengelolaan dan belum optimalnya pelatihan kepada aparat kehutanan yang bertugas.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Jati (I_{4.1}) mengenai jumlah petugas di kawasan adalah sebagai berikut :

“Kalau kendala sebenarnya banyak misalnya gak ada temennya kalau mau patroli malam, terus anggota kami sedikit, ini satu kawasan ini minimal enam orang termasuk petugas kebersihan, jadi kalau petugasnya banyak saya bisa melakukan shift tiga kali bisa pagi, siang dan malam , makanya sepintar-pintarnya kami membagi petugas di lapangan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Jati, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.12 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tersebut maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam proses manajemen pengelolaan kawasan baik secara kuantitas maupun kualitas dan dengan adanya pelatihan yang kontinu akan memberikan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat di praktikan secara langsung dengan optimal. Sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan. Hal ini dibentuk sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

Saat ini sudah ada perencanaan untuk penambahan personil pengamanan kawasan hutan yang dilakukan oleh pengelola, namun mengingat adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah yang mengakibatkan perekrutan menjadi terbatas, sebagai alternatif lain dari dampak tersebut maka Seksi Konservasi Wilayah III merekrut relawan yang merupakan Kader Konservasi dan kelompok Pecinta Alam. Untuk kader konservasi direkrut melalui kegiatan pembentukan kader konservasi dengan memberikan kartu anggota kader konservasi. Demikian pula dengan kelompok pecinta alam yang direkrut dengan status pelajar ataupun mahasiswa. Ada pula Bakti Rimbawan yang merupakan program Kementerian Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan dan untuk mengembangkan profesi di bidang kehutanan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma, Sarjana serta program Magang dalam rangka melaksanakan pengabdian pada Negara khususnya pembangunan kehutanan. Dengan adanya relawan-relawan tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan pengelolaan yang dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Selain itu untuk mengoptimalkan petugas yang sudah ada maka diberikan pelatihan berupa Diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diantaranya meliputi Diklat pengamanan kawasan hutan, Diklat aplikasi GPS untuk pemetaan, Diklat pengelolaan hutan mangrove dan lainnya.

4.3.3 *Actuating* (Pergerakan)

Proses manajemen terjadi karena adanya faktor manusia sebagai pelaksana dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Unsur manusia menjadi terpenting dari seluruh proses administrasi dan manajemen, karena pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Fungsi *actuating* lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pergerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah Kepemimpinan karena mempunyai peranan penting dalam menggerakkan personel petugas dalam melaksanakan program kerjanya. Seperti penjelasan dari Ibu Ida (I₁) adalah sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan kawasan sendiri dimulai dengan menyusun rencana kegiatan dengan berbagai masalah yang dihadapi kawasan, saya memberikan pengarahan melalui rapat dengan petugas di seksi III dengan harapan bahwa semua pekerjaan dapat berjalan baik sesuai rencana. tidak jarang juga lembaga swadaya masyarakat yang memiliki ikatan kerja dengan kami akan dilibatkan untuk dapat membantu kami dalam proses pengelolaan di lapangan, selain itu kami juga mensosialisasikan kepada kelurahan agar dapat secara langsung mengikuti kegiatan yang kami adakan di kawasan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengarahan, pimpinan yang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Konservasi Wilayah III memberikan pengarahan kepada bawahannya melalui rapat kerja yang tidak jarang melibatkan pihak eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelurahan. Hal tersebut dapat menjadi sarana komunikasi dalam penyampaian arahan kepada petugas sehingga dapat tercipta kerjasama secara terpadu satu dengan lainnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rizky (I₂) mengenai pengarahan yang diberikan oleh kepala seksi adalah sebagai berikut :

“Bentuk pengarahannya biasanya memang melalui rapat kerja, dalam rapat tersebut kami berkomunikasi mengenai hal yang berkaitan dengan tugas kami di masing-masing jabatan yang dimiliki. Seperti saya selaku penyuluh kehuatanan itu jabatannya fungsional khusus, atasan langsung saya adalah Kepala Seksi yang nantinya saya diberi semacam kontrak kerja yang disepakati bersama dan target yang harus saya capai dalam satu tahun, melalui standar kinerja pegawai atau SKP dan nantinya akan dievaluasi (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa upaya Seksi Konservasi Wilayah III dalam melakukan pengarahan adalah melalui rapat dan pemberian kontrak kerja dengan target yang harus dicapai kepada petugas dan hasilnya akan dievaluasi oleh atasan langsung untuk mengetahui apa yang sudah terlaksana dan belum dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa peran pemimpin dapat berpengaruh terhadap kinerja petugas dalam melaksanakan kegiatan dengan pencapaian target atau sasaran yang telah ditentukan, melalui rapat kerja pimpinan akan berkomunikasi kepada petugas untuk mengarahkannya kepada kegiatan yang ingin dilaksanakan, dengan hal tersebut pimpinan dapat mengevaluasi hasil yang telah dikerjakan oleh petugas mengenai hal apa saja yang telah dicapai dan belum dicapai akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Terkait dengan jumlah pengunjung kawasan yang mengalami peningkatan serta penurunan tiap tahunnya di latarbelakangi oleh fungsi kawasan dan juga kegiatan yang dilakukan. Mengingat bahwa kawasan Suaka Margasatwa merupakan kawasan konservasi dengan kegiatan yang terbatas pada kegiatan pendidikan dan penelitian. Berbeda dengan taman wisata yang fungsi utamanya adalah wisata yaitu wisata massal. Pihak pengelola tidak bisa memaksa pelajar atau mahasiswa untuk mengadakan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke terkait minat atau topik yang akan diteliti. Begitu pula dengan penurunan volume pengunjung yang terjadi pada kawasan Suaka Margasatwa lain di Pulau Rambut yang berkaitan dengan minat pelajar atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan penelitian karena kawasan suaka margasatwa tidak diberlakukan untuk kegiatan wisata massal sehingga kenaikan ataupun penurunan jumlah kunjungan yang terjadi bukan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan kawasan. Bagi pengelola terjaganya kawasan secara alami lebih menjadi prioritas pengelolaan. Disamping hal tersebut, tidak menutup akses bagi

Seksi Konservasi wilayah III untuk mensosialisasikan kawasan kepada masyarakat agar mau membantu dalam pengelolaan dengan kegiatan yang menunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dalam mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kepada khalayak umum, seksi konservasi wilayah III melakukan upaya-upaya yang dapat mengkomunikasikan atau memberikan informasi mengenai kawasan agar lebih dikenal secara luas oleh masyarakat baik yang tinggal di wilayah DKI Jakarta maupun diluar DKI Jakarta. Seperti penjelasan Ibu Ida (I₁) sebagai berikut :

“Selain kami bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, kami mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini dengan mengikuti pameran lingkungan dan liputan-liputan di media televisi, kami juga membuat buku mengenai profil kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, brosur kawasan dan stiker kawasan konservasi yang nantinya dapat kami jadikan media komunikasi kepada masyarakat. Selain itu kami juga mengikuti acara-acara seminar yang diadakan oleh pusat untuk dapat saling berbagi informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Begitu juga dengan pernyataan Bapak Rizky (I₂) sebagai berikut :

“Cara mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kepada masyarakat dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk memberitahu kalau masih ada kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta dan bagaimana kita menjaga kawasan tersebut, kalau untuk brosur dan stiker itu biasanya digunakan pada saat pameran, liputan berita dll (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kepada masyarakat secara luas, pihak BKSDA DKI Jakarta mengenalkannya dengan cara mengikuti acara pameran lingkungan yang terdapat brosur dan stiker kawasan konservasi, selain itu BKSDA DKI Jakarta membuat buku mengenai

flora dan fauna yang ada di kawasan dimana pengumpulan datanya dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau peneliti dari beberapa Perguruan Tinggi, liputan di media televisi, pembuatan film yang mengambil latar di kawasan hingga foto-foto secara komersial dan mengikuti seminar dengan tujuan saling bertukar informasi untuk mengelola kawasan di masing-masing wilayah yang dikelola. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta.

Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh BKSDA DKI Jakarta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat IAR seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ida (I₁) adalah sebagai berikut :

“Kami melakukan kegiatan kerjasama dengan LSM inisiasi alam rehabilitasi (IAR) yang dimana kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke mengenai mitigasi satwa monyet ekor panjang serta hubungan timbal baliknya bagi masyarakat sekitar kawasan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Hal sama juga diungkapkan oleh Merry mengenai tugas LSM IAR (I₅) adalah sebagai berikut :

“Hubungan kerjasama BKSDA DKI Jakarta dengan IAR memang ada, kami diberi tugas untuk mitigasi monyet ekor panjang, jadi kawasan konservasi ini bersebelahan dengan permukiman penduduk, karena di kawasan ini terdapat monyet ekor panjang jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan monyet ekor panjang ini keluar dari kawasan masuk ke permukiman penduduk. Ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat sekitar dan pemerintah, karena monyet ekor panjang bisa mengganggu masyarakat sekitar, bisa mengambil sampah-sampah makanan di sekitar perumahan masyarakat, atau bisa menyakiti masyarakat sendiri. Jadi tugas kami disini membantu penanganan konflik monyet ekor panjang dengan

manusia atau masyarakat sekitar kawasan (Sumber: Wawancara dengan Merry, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 13.02. WIB di Kawasan Ekowisata Mangrove Jakarta Utara).”

Berdasarkan wawancara peneliti kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara BKSDA DKI Jakarta dengan LSM IAR adalah untuk menangani konflik antara satwa yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dengan lingkungan sekitar terkait dengan keberadaan kawasan yang terletak di tengah-tengah pembangunan Ibu Kota seperti perumahan, kantor serta jalan raya ini tentunya akan memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, hal ini dapat tercermin dari perubahan perilaku satwa yang ada di kawasan dalam hal mencari makan dengan masuk kedalam perumahan warga yang nantinya akan menimbulkan konflik secara tidak langsung bagi keduanya, oleh karena itu tugas kedua belah pihak adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat hidup secara berdampingan dengan kawasan yang dihuni oleh satwa dan tumbuhan didalamnya dan mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian kawasan karena masyarakat juga dapat memperoleh manfaat secara tidak langsung dari keberadaan kawasan tersebut. selain itu terjalin kerjasama antara BKSDA DKI Jakarta dengan Perusahaan PT. Indo Kreasi Lestari dalam penguatan fungsi Suaka Margasatwa Muara Angke serta optimalisasi kegiatan CSR dengan mitra/swasta.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses pengelolaan. Dengan sarana dan prasarana akan melengkapi visi pengelolaan. Seperti halnya sarana dan prasarana yang ada dikawasan saat ini dijelaskan oleh Bapak Rizky (I₂) sebagai berikut :

“Kalau untuk fasilitas pengunjung sebenarnya kan SM. Muara Angke bukan tempat wisata dan kita tidak mengarah kesitu. Karena kalau aturannya kan harus pakai simaksi berapa orang yang ke kawasan tujuannya harus jelas, tapi kalau ditanya fasilitas untuk wisata dengan status kawasan konservasi saya rasa cukup (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Merry (I₅) sebagai anggota LSM IAR sebagai berikut :

“Fasilitas yang ada di kawasan Suaka Margasatwa sendiri setiap tahunnya pasti ada perbaikan tergantung dana yang disediakan oleh pusatnya. Yang paling utamanya ada pada boardwalk / jembatan karena untuk pengunjung dapat melihat dan menyusuri kawasan selain itu ada pos jaga untuk petugas melakukan penjagaan kawasan tetapi masih kurang nyaman kalau dilihat tetapi mungkin kalau sudah terbiasa ya gak jadi masalah besar (Sumber: Wawancara dengan Merry, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 13.02. WIB di Kawasan Ekowisata Mangrove Jakarta Utara).”

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Jati (I_{4.1}) selaku Polisi Kehutanan sebagai berikut :

“Sarpras disini sebetulnya dilengkapi cuma kadang kadang begini ya kita sudah mengajukan tapi dananya dari sana gak ada, kalau saya minta bantuan ke perumahan saya koordinasi dalam pembuatan papan-papan dipinggir jalan tentang kawasan SM. Muara Angke, terus untuk penanaman dikawasan saya ngumpulin LSM atau anak-anak sekolah yang mau menanam kita sediakan lokasinya dan pembayarannya tetap dilakukan dikantor jadi tugas saya seperti menyalurkan dan membina untuk kepentingan kawasan dan lingkungan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Jati, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.12 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Lain halnya dengan pendapat peneliti di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (I_{6.1}) sebagai berikut :

“Jembatan pengamatan masih sangat kurang. Akses hanya setengah dari keseluruhan jembatan dan tidak adanya pengaman di kanan dan kiri jembatan. Karena hal tersebut menjadikan kawasan ini tidak aman untuk dikunjungi oleh anak-anak bahkan orang dewasa (Sumber: Wawancara dengan Watri, hari Minggu, 18 September 2016 pukul 13.00 WIB).”

Begitu pula dengan pendapat pengunjung Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (I_{7.3}) sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana menurut saya sudah lumayan baik di banding tahun sebelumnya sudah ada beberapa perbaikan jembatan-jembatan yang bisa dilalui oleh pengunjung yang ingin observasi ke kawasan ini. selain itu sarana lain masih bisa dikembangkan seharusnya seperti papan-papan informasi mengenai isi dari kawasan konservasi itu sendiri contohnya jenis-jenis satwa, tanaman, dan burung-burung (Sumber: Wawancara dengan Bapak Iman, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 16.05 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di kawasan memang terbatas mengingat kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke merupakan kawasan konservasi dan dengan wisata terbatasnya, kawasan ini lebih banyak digunakan untuk studi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, akan tetapi fasilitas tersebut juga perlu dirawat dengan baik agar terlihat lebih nyaman bagi pengunjung yang datang, seperti fasilitas utama bagi pengunjung yakni jembatan kayu / *boardwalk* berada dalam kondisi yang kurang baik mengingat tidak ada pengaman di masing-masing sisi jembatan dan beberapa papan informasi mengenai isi kawasan juga tidak lengkap karena ada yang kosong dan rusak, oleh karena itu petugas di lapangan menjalin hubungan baik dengan pihak

pengembang perumahan untuk ikut membantu dalam membuat kelengkapan yang diperlukan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke agar baik petugas dan pengunjung dapat merasakan kenyamanan berada di dalam kawasan. Terkait dengan bagaimana kenyamanan pengunjung ataupun peneliti yang datang ke kawasan seperti yang diungkapkan oleh Novi (I_{6.2}) sebagai peneliti adalah sebagai berikut :

“Nyaman sih, saya neliti disini kurang lebih 3 bulan dan hampir 2 bulan saya disini gak ngalamin kejadian yang merugikan saya, saya bisa keliling kawasan tanpa didampingi lagi karena satwanya juga udah kaya kenal sama saya (Sumber: Wawancara dengan Novi, hari Jumat, 22 April 2016 pukul 11.20 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh 2 pengunjung yakni Dina (I_{7.1}) dan Rosyid (I_{7.2}) yang berstatus sebagai pelajar sebagai berikut :

“Agak kurang nyaman, karena kondisi disini yang saya bayangkan masih suasana alam tapi kenyataannya banyak sekali perubahan dari fungsi asli suaka margasatwa yang seharusnya (Sumber: Wawancara dengan Dina, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.41 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

“Kalo disini agak kurang nyaman yah soalnya kecium bau gak sedap dari sampah yang ada disini dari airnya yang kotor (Sumber: Wawancara dengan Rosyid, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.48 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengunjung yang merasa nyaman berada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke karena berstatus sebagai peneliti yang harus mengamati satwa yang ada di dalam kawasan selain itu peneliti juga mendiami kawasan dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menjadi terbiasa dengan keadaan kawasan, akan tetapi berbeda dengan pengunjung lainnya yang mengatakan merasa kurang nyaman melihat suasana yang sudah berbeda dengan

aslinya, kawasan terlihat kotor dan ada bau yang ditimbulkan dari sampah yang masuk kedalam kawasan. Kedua hal berbeda ini dapat tercermin dari seberapa intens pengunjung datang ke kawasan sehingga ada yang nyaman karena terbiasa ada pula yang kurang nyaman karena pertama kali datang ke kawasan. Tanggapan Pengunjung selanjutnya mengenai fisik kawasan dan kondisi sekitarnya seperti yang diungkapkan oleh Dina (I_{7.1}) dan Rosyid (I_{7.2}) adalah sebagai berikut :

“Kalo untuk suaka margasatwa di daerah DKI Jakarta kondisinya bisa dikatakan banyak mengalami perubahan dari kondisi alaminya, dan mengalami pencemaran lingkungan di sekitar kawasan suaka margasatwanya dan keadaan sekitar banyak permukiman-permukiman kumuh nelayan yang letaknya disebrang sungai padahal ini merupakan kawasan konservasi seharusnya harus bersih dari hal-hal itu takut mengganggu satwa-satwa yang ada di kawasan Suaka Margasatwa ini. (Sumber: Wawancara dengan Dina, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.41 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

“Kalau dibilang bagus aslinya bagus ya ka, cuma kalau dari depan itu kaya tempat ini terpencil gitu kurang terlihat aja gitu, padahal kita lihat banyak gedung megah tapi gak terpikir gitu ada Suaka Margasatwa dan disini sampah disekitarnya masih banyak juga jadi kelihatan lingkungannya kurang terjaga (Sumber: Wawancara dengan Rosyid, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.48 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Iman (I_{7.3}) dan Ibu Ratna (I₈)

sebagai berikut :

“Kondisi saat ini saya melihat sebenarnya bagus masih ada tempat seperti ini, walaupun menurut saya masih kurang banyak keberadaan kawasan suaka margasatwa di daerah DKI Jakarta. Apalagi kawasan ini cukup baik karena adanya hutan-hutan bakau, apalagi Jakarta mempunyai masalah mengenai banjir dan hutan bakau ini mempunyai peran dalam sirkulasi air, dan menghalau air laut agar tidak terjadi abrasi dan apabila ada banjir bisa diatasi oleh hutan bakau (Sumber: Wawancara dengan Bapak Iman, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 16.05 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

“Kawasannya kelihatan seperti hutan saja, pohonnya lebat ada binatangnya juga kadang suka banyak monyet kalau mau sore, monyetnya pada turun nyari makan, suami saya kalau nyari ikan ini ya disekitaran sungai angke terus sampe ke laut (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ratna, hari Selasa, 18 Mei 2016 pukul 14.25 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa pendapat pengunjung mengenai keberadaan kawasan dimana posisi kawasan yang kurang terlihat dari jalan raya, selain itu di dalamnya kawasan terlihat sudah tercemar dengan sampah yang terbawa pada saat banjir ataupun yang membuang secara sembarangan dan kawasan mengalami perubahan kondisi alamiahnya karena dengan pencemaran yang terjadi membawa dampak negatif bagi kondisi tumbuhan dan perilaku satwa yang ada, pendapat lain mengatakan bahwa masih kurangnya kawasan konservasi di DKI Jakarta mengingat pembangunan disekitar terus-menerus berlangsung dan jika terjadi bencana banjir maka kawasan tersebut berperan aktif dalam mencegah abrasi yang ditimbulkan, akan tetapi keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke juga dapat memberikan keuntungan bagi nelayan yang bertempat tinggal di seberang sungai angke karena pohon-pohon disekitar kawasan khususnya pohon bakau yang merupakan tempat bersarangnya ikan sehingga nelayan masih dapat mencari ikan disekitar kawasan yakni di sepanjang aliran sungai.

Dampak positif dan negatif untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke akan selalu ada karena tidak terlepas dari adanya aktivitas manusia disekitarnya. Terkait dengan bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kawasan dijelaskan oleh Ibu Ida (I₁) sebagai berikut :

“Biasanya sekolah atau lsm mengikuti kegiatan berupa penanaman tumbuhan kegiatan bersih sampah sampai pada sosialisasi dengan pihak kelurahan, selain itu biasanya perusahaan ikut turut serta dalam pengadaan perlengkapan yang menyangkut kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2)”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa masyarakat turut serta dalam kegiatan penanaman tumbuhan dan melakukan bersih sampah dengan dibantu oleh pihak kelurahan dalam sosialisasi kepada masyarakat, disamping itu beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan ikut membantu dalam menyediakan perlengkapan yang berhubungan dengan kebutuhan kawasan.

Begitu pula yang diungkapkan oleh peneliti (I_{6.1}) dan (I_{6.2}) di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai berikut :

“ Bentuk partisipasi yang saya lakukan yakni ikut membantu menjaga kebersihan kawasan dan kebetulan saya didaulat untuk menjadi duta konservasi kawasan mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke (Sumber: Wawancara dengan Watri, hari Minggu, 18 September 2016 pukul 13.00 WIB).”

“Saya sebagai peneliti di kawasan ini tugas saya mengamati perilaku satwa yang saya teliti, keadaan sekitarnya seperti apa dan kalau laporan saya selesai mungkin bisa berguna juga buat data di balai, selama saya neliti disini saya bantu-bantu petugas dalam kebersihan disini (Sumber: Wawancara dengan Novi, hari Jumat, 22 April 2016 pukul 11.20 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi peneliti dalam melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke adalah untuk menambah data informasi bagi kawasan dan membantu Balai dalam memberikan masukan dalam

pengelolaan kawasan selain itu peneliti juga ikut menjaga kebersihan di dalam kawasan.

Lain halnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Jati (I_{4.1}) sebagai berikut :

“Penyuluhan untuk bersih sampah biasanya koordinasi sama kelurahan kalau untuk masyarakat sekitar kawasan agak susah soalnya kan samping-samping kawasan ini perumahan elite dan susah ketemu sama yang punya rumah paling ada asisten rumah tangganya aja, malah yang bisa diajak ngumpul ya nelayan sekitar kawasan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Jati, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.12 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Jati, dapat diketahui bahwa penyuluhan dilakukan bersama-sama oleh pihak kelurahan, tetapi menurut Polisi Kehutanan yang lebih sering mengikuti penyuluhan dan mudah diajak berbicara adalah nelayan sekitar kawasan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perumahan elite karena sibuk bekerja sehingga menjadi sulit untuk ditemui.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi lebih banyak dilakukan dalam hal menjaga kebersihan seperti sampah yang ada di dalam dan sekitar kawasan, ada juga kegiatan penanaman tumbuhan dan penyediaan perlengkapan di kawasan, hal tersebut dilakukan apabila lembaga terkait mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kawasan, selain itu bagi yang mengadakan penelitian di kawasan dapat memberikan hasil penelitiannya berupa data yang mungkin dapat membantu pihak Balai dalam mengelola kawasan lebih baik lagi sehingga dukungan bagi keberlangsungan kawasan dapat lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama.

4.3.4 Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan merupakan pengarahannya seluruh potensi organisasi yang terlibat dalam melakukan kegiatan agar tidak melakukan penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses (Hasibuan, 2011:242). Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi dari keseluruhan pengawasan tersebut merupakan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana serta berkoordinasi agar terwujudnya kepuasan dari apa yang telah dilaksanakan.

Pengawasan dilakukan untuk menilai pelaksanaan jika terdapat perbaikan sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke seperti penjelasan oleh Ibu Ida (I₁) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan rutin dilakukan setiap jam kerja oleh Polisi Kehutanan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, sedangkan pihak Balai melakukan pengawasan setiap sebulan sekali terlebih jika ada kegiatan operasi maka tidak hanya Balai, pihak lain seperti TNI AL dan Polisi juga turut serta dalam melakukan pengawasan di kawasan untuk mencegah terjadinya pencurian dan penyelundupan satwa dan tumbuhan secara ilegal (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala dimana pelaksanaan tugas secara rutin diampu oleh Polisi Kehutanan yang bertugas di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sedangkan pengawasan secara berkala dilakukan oleh pihak Balai agar dapat melihat kondisi langsung di lapangan. Selain pengawasan rutin, pihak BKSDA DKI Jakarta juga bekerjasama dengan TNI dan Polisi jika ada kegiatan operasi dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk menangani kasus yang melibatkan Lembaga Hukum, tujuan adanya kerjasama dalam melakukan pengawasan tersebut guna mengintegrasikan pihak yang bertugas untuk menjaga keamanan kawasan dan sekitarnya.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) mengenai bentuk pengawasn di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai berikut :

“Kegiatan pengawasan di kami itu ada yang namanya patroli, patroli dilakukan setiap hari oleh polisi kehutanan yang laporannya ditulis setiap hari dan diserahkan ke kantor, ada juga operasi yang itu biasanya kalau ada kasus di suaka margasatwa kita kerjanya gabungan. nah kalau perbedaan antara patroli dan operasi, kalau patroli itu tanpa target operasi seperti jalan menyusuri kawasan mengambil data, kalau operasi dari setiap laporan patroli ditemukan beberapa kendala atau masalah maka operasi itu berupa tindakannya (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke itu terbagi dalam dua kegiatan yakni patroli kawasan dan operasi kawasan dimana kedua kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang saling berhubungan dimana patroli dilakukan setiap hari dan jika dalam melakukan kegiatan patroli ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan atau yang sifatnya merusak maka segera dilakukan tindakan secara nyata dengan kegiatan operasi agar tidak berdampak negatif untuk kawasan.

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang bertugas di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke terkait dengan bagaimana bentuknya dijelaskan oleh Bapak Jati (I_{4.1}) sebagai berikut :

“Patroli kawasan saya lakukan tidak mengenal waktu bisa siang bisa malam, kalau jam operasionalnya dari senin sampai jumat, kadang saya masih nemuin orang-orang yang mancing atau mengambil ikan secara liar di malam hari di kawasan SM. Muara Angke makanya malam hari saya juga patroli untuk menghindari adanya kejahatan-kejahatan lainnya dan Saya patroli itu minimal lima kali bahkan sabtu minggu walaupun tidak ada kaitan kerja alias libur, saya tetap patroli karena pada hari-hari libur itu banyak orang yang suka masuk ke kawasan tanpa izin, nah kalau patroli itu kewajiban kita sehari-hari kalau kawasannya ingin bagus dan tidak dijamah orang maka harus patroli, kalau operasi itu dilakukan secara mendadak sesuai laporan jika ada pelanggar yang masuk kedalam kawasan SM. Muara Angke tanpa izin maka kegiatan itu akan kita sapu dan langsung kita tangkap (Sumber: Wawancara dengan Bapak Jati, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.12 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Jati, dapat diketahui bahwa peran Polisi Kehutanan adalah sebagai upaya pengamanan yang dilakukan secara represif dengan tujuan mengembalikan keserasian kawasan sebagai penyeimbang lingkungan. Dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan waktu yang tidak ditentukan bisa siang hari ataupun malam hari bahkan dalam keadaan libur sekalipun sesuai dengan kondisi dan ancaman terhadap kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Senada dengan penjelasan Bapak Aco (I_{4.2}) mengenai kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

“Untuk pengaman kawasan sendiri ada patroli kawasan, patroli ada dua jalur bisa melalui jalur darat yaitu jalan di sepanjang boardwalk terus kalau jalur air naik speedboat, seperti itu patroli harian yang saya lakukan di kawasan ini, Setiap hari kerja dari hari senin sampai jumat jamnya dari jam 08.00 sampai jam 16.00 tugasnya yaitu patroli, penyuluhan, koordinasi dan juga pelaporan kegiatan pengawasan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Aco, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 16.03 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Aco, dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur darat dan jalur air. Dengan fasilitas yang ada dikawasan seperti boardwalk sepanjang 850m dan speedboat dapat membantu pekerjaan Polisi Kehutanan dalam melakukan tugasnya untuk pengaman kawasan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke berupa patroli yang dilakukan secara rutin dan operasi yang dilakukan berdasarkan laporan patroli jika menemukan pelanggar atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kegiatan tersebut dapat dilalui oleh jalur darat dengan boardwalk sepanjang 850m dan jalur air menggunakan speedboat. Kegiatan patroli dilakukan oleh Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta sedangkan kegiatan operasi dilakukan secara gabungan yang melibatkan TNI dan Polisi. Mengingat keberadaan Polisi Kehutanan sangat penting dalam upaya pengamanan hutan. Jumlah Polisi Kehutanan yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat minim dibandingkan dengan luas kawasan yang harus diawasi mengingat masih banyak gangguan keamanan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terlebih dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada malam hari hal tersebut dapat berjalan jika ada komitmen tinggi dari petugas yang memiliki kesungguhan dalam menjaga kawasan agar tetap aman dan kondusif. Dan perekrutan tenaga pengamanan hutan yang khusus melakukan pengamanan kawasan di malam hari sudah tertuang dalam perencanaan pengelolaan untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kawasan.

Hasil dari pengawasan berupa laporan yang berisi pemberian keterangan, penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang telah dilakukan, hal tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi atau Kepala Balai dalam menerima laporan sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan. Terkait dengan bagaimana proses pelaporan hasil pengawasan dijelaskan oleh Ibu Ida (I₁) sebagai berikut :

“Setiap hari petugas yang bekerja melaporkan kegiatannya ke kantor selama berjaga dikawasan sampai dengan satu bulan aktivitasnya di kawasan sampai dengan bulan-bulan berikutnya, setelah itu laporan dibuat setiap bulannya secara tertulis yang nantinya akan dilaporkan kepada saya selaku kepala seksi, lalu nantinya laporan tersebut akan diperiksa oleh kepala balai baru setelah itu kita adakan rapat evaluasi (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa laporan pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan yakni Polisi Kehutanan akan dilaporkan kepada Kepala Seksi Wilayah III yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Balai untuk diperiksa, jika ditemukan beberapa kendala maka akan diadakan rapat evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang timbul di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Hal serupa mengenai pelaporan hasil pengawasan dijelaskan oleh Bapak Jati (I_{4.1}) sebagai berikut :

“Laporan saya buat langsung kepada Kepala Seksi, setiap bulan kita buat laporan untuk kejadian apa-apanya kita tulis, yang masuk ke kawasan SM. Muara Angke berapa orang nanti kita laporkan ke kantor, laporannya bulanan dibuat secara tertulis kita fotoin juga ada foto-fotonya kalau untuk laporan mengenai pelanggar yang masuk kawasan tanpa izin itu biasanya kita

diberitahu oleh petugas keamanan setempat jadi kita bekerjasama untuk menindak orang-orang yang melanggar (Sumber: Wawancara dengan Bapak Jati, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 15.12 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Jati, dapat diketahui bahwa proses pelaporan dari pengawasan yang dilakukan di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kepada Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta bisa dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. pelaporan secara tertulis berupa data-data berisi kegiatan selama satu bulan di serahkan kepada Kepala Seksi, laporan tersebut juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto yang diambil di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai pendukung informasi yang diberikan.

Pelaporan hasil kegiatan pengawasan juga tidak terlepas dari sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, hal ini dijelaskan oleh Bapak Aco (I_{4.2}) sebagai berikut :

“Saya buat laporan penjagaan berdasarkan kegiatan sehari-hari dan ada juga laporan kasus dibuatnya secara tertulis yang nanti akan dilaporkan ke balai. Begitu juga dengan sanksi, kita ada diberikannya itu mulai dari menegur sekali dua kali, kalau tidak mendengarkan maka barangnya langsung disita tergantung kegiatannya apa entah dia mancing entah bawa jebakan burung terus langsung dibawa kekantor (Sumber: Wawancara dengan Bapak Aco, hari Rabu, 27 April 2016 pukul 16.03 WIB di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Aco, dapat diketahui bahwa pelaporan kegiatan pengawasan berdasarkan kegiatan penjagaan sehari-hari dan kegiatan pemantauan untuk menemukan kasus pelanggaran yang diberikan sanksi ringan berupa teguran sampai dengan penarikan alat yang dibawa pelanggar masuk kedalam kawasan. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang didalamnya memuat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Pasal 50 yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan bentuk pengawasan dan pelaporannya, sistem perizinan untuk memasuki kawasan juga di berlakukan sebagai bukti legalitas seseorang untuk melakukan kegiatan di kawasan tertetu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ida (I₁) adalah sebagai berikut :

“Untuk memasuki kawasan konservasi harus menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi atau yang biasa disebut (SIMAKSI), nah hal ini sebagai bukti legalitas seseorang yang ingin melakukan aktivitas tertentu di kawasan konservasi karena kawasan konservasi sendiri sifatnya adalah untuk kegiatan wisata terbatas saja (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida, dapat diketahui bahwa SIMAKSI digunakan sebagai bukti legalitas bagi orang yang ingin memasuki kawasan konservasi seperti kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan hutan buru. Dengan adanya SIMAKSI ini maka pihak balai dapat mengetahui tujuan orang

yang ingin masuk ke dalam kawasan sekaligus membatasi kegiatan yang akan dilakukan.

Seperti apa proses pembuatan SIMAKSI diungkapkan oleh Bapak Bene (I₃) sebagai berikut :

“Simaksi dibuat secara manual kalau yang sistem onlinenya memang sedang ada gangguan jadi sekarang kebanyakan orang datang mengajukan proposal lalu simaksi dibuat nunggu dua sampai tiga hari untuk tanda tangan persetujuannya oleh kepala Balai, paling lama seminggu pembuatannya (Sumber: Wawancara dengan Bapak Bene, hari Senin, 18 April 2016 pukul WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Bene, dapat diketahui bahwa proses pembuatan SIMAKSI dapat dilakukan secara manual dengan membuat proposal kegiatan dan datang ke kantor BKSDA DKI Jakarta dan dapat pula dilakukan dengan sistem online melalui website BKSDA DKI Jakarta dengan persetujuan oleh Kepala Balai dengan proposal kegiatan sampai dengan terbit SIMAKSI dengan kawasan yang ingin dikunjungi.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Watri (I_{6.1}) terkait dengan proses untuk mendapatkan SIMAKSI adalah sebagai berikut :

“Untuk pembuatan SIMAKSI sendiri saya bawa surat izin penelitian, melampirkan proposal penelitian lengkap dengan estimasi waktu penelitian plus fotokopi KTP, satu sampai tiga hari SIMAKSInya bisa selesai dan langsung mulai penelitian di lokasi yang kita tuju (Sumber: Wawancara dengan Watri, hari Minggu, 18 September 2016 pukul 13.00 WIB).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Watri, dapat diketahui bahwa dalam proses untuk mendapat SIMAKSI adalah dengan membuat proposal penelitian dengan dilengkapi data diri dan dalam kurun waktu 3 hari dapat terselesaikan sehingga dapat bukti juga sebagai tiket masuk untuk ke kawasan yang ingin kita lakukan penelitian ataupun kunjungan terbatas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat kita ketahui bahwa proses pembuatan surat izin masuk kawasan konservasi / SIMAKSI adalah dengan pengajuan proposal yang meliputi kegiatan yang ingin dilakukan di kawasan konservasi, selain itu proses pembuatannya dapat berlangsung selama sehari-hari karena proposal kegiatan akan diperiksa oleh Kepala Balai sampai dengan tahap persetujuan dan sampai dengan terbit lembaran SIMAKSI yang dilengkapi dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh orang yang mengajukan proposal dan sebagai bukti legalitas untuk seseorang atau lebih yang ingin melakukan aktivitas di kawasan konservasi sehingga tidak mengurangi fungsi dari kawasan tersebut.

Evaluasi merupakan rangkaian dari tahap pengawasan yang dilakukan melalui pengukuran atas seluruh proses penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mempersiapkan kembali suatu perencanaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu terkait bagaimana proses evaluasi dilakukan dari pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, Ibu Ida (I₁) memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang telah dibuat yang nantinya akan dibahas secara bersama-sama oleh BKSDA DKI Jakarta, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan mengambil pelajaran dari pengelolaan kegiatan, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan, evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun dengan maksud untuk memberikan usulan atas kekurangan yang dihadapi secara teknis di lapangan (Sumber: Wawancara dengan Ibu Ida, hari Jumat, 4 Desember 2015 pukul 11.45 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan secara berkala setiap akhir tahun oleh BKSDA DKI Jakarta melalui rapat secara bersama-sama dengan memberikan masukan atau rekomendasi terhadap pengelolaan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rizky (I₂) adalah sebagai berikut :

“Setiap mau menjalankan kegiatan kita pasti rapat dan setiap akhir tahun kita selalu melakukan evaluasi dan monitoring, Kepala Balai juga selalu melakukan supervisi melalui Kepala Seksi atau beliau sendiri datang ke lapangan, setiap habis melakukan kegiatan kita selalu melaporkan ke Kepala Balai walaupun terkadang kita maunya rapat tetapi Kepala Balai waktunya tidak ada, jadi kita laporkan secara tertulis nanti beliau membaca dan nantinya di akhir tahun di evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan nantinya tahun depan apa yang akan direncanakan seperti itu (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizky, hari Senin, 18 April 2016 pukul 12.04 WIB di Kantor BKSDA DKI Jakarta Lantai 2).”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rizky, dapat diketahui bahwa evaluasi digunakan untuk menilai kegiatan yang dilakukan melalui laporan yang diberikan kepada pimpinan dan akan mengalami perbaikan jika terdapat kendala

dalam pengelolaannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan telah dilakukan dan mencapai hasil yang optimal dan berkembang kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan pada hasil kegiatan yang sebelumnya sudah melalui rapat untuk melaksanakan kegiatan, evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai pada kegiatan yang sudah berjalan, dan penilaian tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk penentuan kegiatan selanjutnya, dalam evaluasi terdapat beberapa masukan dan juga saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan agar dapat berkembang lebih baik lagi.

4.4 Pembahasan dan Temuan Lapangan

Pembahasan dan temuan lapangan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Manusia dengan lingkungan memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Manusia bergantung pada lingkungan yang memberikan sumber daya alam untuk bertahan hidup, hal tersebut tentunya diikuti dengan peran manusia yang harus memperhatikan kelestarian lingkungannya agar fungsi-fungsi lingkungan tersebut masih dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia secara berkala. Hutan konservasi atau kawasan konservasi merupakan kawasan dilindungi yang berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. kawasan konservasi di wilayah kerja BKSDA DKI Jakarta meliputi : Cagar Alam Pulau Bokor seluas 18,00 ha, Suaka Margasatwa Muara Angke seluas 25,02 ha, Suaka Margasatwa Pulau Rambut seluas 90,00 ha dan satu kawasan pelestarian alam yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 99,82 ha.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry yang meliputi : 1) *Planning*, 2) *Organizing*, 3) *Actuating*, 4) *Controlling*.

1) *Planning*

Berkenaan dengan perencanaan (*planning*) dalam manajemen pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Hal tersebut didasari pada Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke Periode 2016-2025 sebagai dasar hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal perencanaan terkait manajemen pengelolaan kawasan meliputi 3 (tiga) indikator yaitu ; 1) Tujuan 2) Rencana Kegiatan 3) Pihak terkait dalam Pengelolaan.

Terkait dengan indikator pertama mengenai Rencana pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke didasarkan pada rencana pengelolaan kawasan konservasi, peraturan perundangan terkait serta kebijakan pemanfaatannya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta telah membuat Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Muara Angke periode 2016-2025 selama 10 tahun.

Tujuan dari rencana pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke adalah terciptanya kawasan sebagai pusat pendidikan lingkungan yang ada di pesisir Jakarta. Arah pengelolaan kawasan ini tertuju sebagai penunjang kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dilakukan di kawasan-kawasan konservasi karena sifatnya sebagai wisata alam terbatas. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya untuk mencapai tujuan, kendala berupa faktor alam seperti bencana banjir yang bisa kapan saja membanjiri kawasan dan faktor manusia seperti membuang sampah sembarang dan polusi dari kegiatan pembangunan, upaya yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah III yakni mengembalikan kesesuaian fungsi kawasan dan rencana pengelolaan jangka panjang dibuat sebagai proyeksi perencanaan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan kawasan dan sekitarnya.

Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dibuat rencana kegiatan sebagai agenda perwujudan untuk menunjang pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke. Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang kurun waktu 10 tahun tersebut maka sebagai langkah awal untuk pengelolaan berkelanjutan maka dibuat berdasarkan pada blok-blok kawasan dimana setiap kawasan konservasi harus dibagi kedalam blok-blok pengelolaan melalui tahap penyusunan dan pemetaan, pematangan batas blok sampai dengan sosialisasi kawasan dengan tujuan untuk mempermudah Seksi Konservasi Wilayah III dalam mengelola kawasan sekaligus membatasi aktivitas manusia terhadap kawasan.

Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke memiliki 4 (empat) blok pengelolaan yang terdiri dari ; 1) Blok Perlindungan; 2) Blok Pemanfaatan; 3) Blok Rehabilitasi dan 4) Blok Khusus. Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke memuat penyusunan program dan paket pendidikan lingkungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang adalah 1) Penyusunan Modul Pendidikan Lingkungan untuk SM. Muara Angke. 2) Penyusunan Buku Pintar Konservasi (Ensiklopedia) SM. Muara Angke. 3) Pembuatan Film Dokumenter. 4) Promosi, Sosialisasi, Anjagsana ke Sekolah-sekolah, Universitas dan Media Massa. 5) Pembuatan Poster, Display dan Website tentang potensi SM. Mura Angke sebagai media pembelajaran. 6) Identifikasi spot-spot kawasan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembelajaran (misalnya spot pengamatan burung, spot feeding ground burung, spot pengolahan limbah/sampah plastik, spot pengamatan mangrove, spot pengamatan pasang surut air, dll). 7) Penyusunan paket-paket kegiatan pendidikan lingkungan.

Dengan adanya rencana kegiatan tersebut diharapkan proses pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk untuk Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke. Namun pada prosesnya pembuatan RPJP Kawasan SMMA mengalami keterlambatan dari yang seharusnya dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah sejak tahun 2011.

Sehingga pengelolaan sebelumnya hanya berdasarkan pada laporan kegiatan tahunan saja hal tersebut tentunya menghambat pengelolaan kawasan yang seharusnya sudah dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi jika memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke beberapa pihak ikut terlibat di dalamnya seperti Kelurahan, Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerjasama dalam pengelolaan dan juga mensosialisasikan kawasan kepada lingkungan sekitar, oleh karena itu pihak tersebut dapat saling memberi keuntungan bagi organisasinya masing-masing seperti BKSDA DKI Jakarta dalam pemberian perizinan untuk komunitas melakukan kegiatan ataupun LSM melakukan pengamatan sampai dengan hasil berupa data yang nantinya diberikan LSM kepada Balai guna menambah referensi untuk perkembangan kawasan.

2) *Organizing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi dan Sumber Daya Alam. Maka maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah organisasi pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Secara teknis

operasional Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga) Seksi Konservasi meliputi : Seksi Konservasi Wilayah I terdiri dari Wilayah : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi. Seksi Konservasi Wilayah II : meliputi Jakarta Barat dan Tangerang. Seksi Konservasi Wilayah III : meliputi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Seksi Konservasi Wilayah III merupakan jabatan struktural Eselon IV yang membawahi 7 jabatan non struktural terdiri dari : Penganalisis Data Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, Pengolah Bahan Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar di Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor, Pengolah Bahan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Penata Usaha Umum, Penata Administrasi Kepegawaian, Penata administrasi Keuangan, dan Juru Mudi Kapal. Seksi Konservasi Wilayah III merupakan perpanjangan tangan BKSDA DKI Jakarta yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKSDA DKI Jakarta di wilayah Jakarta Utara, kawasan konservasi Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Suaka Margasatwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan, setiap anggota organisasi akan diberikan tugas sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh masing-masing personil. Dalam lingkup Seksi Konservasi Wilayah III pembagian tugas dibagi secara bertahap mulai dari membuat perencanaan, pelaksana kegiatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan sampai pada laporan dan evaluasi. Karena setiap kegiatan

yang akan dilaksanakan sudah memiliki Norma Standar Pelaksana Kegiatan. Dengan adanya hal tersebut maka pembagian tugas secara jelas diharapkan agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan mempermudah bagi petugas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam melakukan pengelolaan Seksi Konservasi Wilayah III memiliki pola hubungan kerja baik didalam maupun diluar lingkungan kerjanya. Hubungan kerja didalam organisasi terdapat pada jabatan fungsional khusus yang dapat bergerak secara fleksibel dan spontan jika jasanya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Seksi Konservasi Wilayah lain ataupun sebaliknya. Hal ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Sedangkan hubungan kerja di luar organisasi terdapat pada interaksi secara rutin dengan pihak kelurahan maupun pihak pengembang perumahan untuk ikut serta dalam menjaga keberadaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Dalam pengelolaan kawasan, sumber daya dikerahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan terutama sumber daya manusia karena memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilakukan. Sumber daya manusia dalam lingkup Seksi Konservasi Wilayah III jumlahnya terbatas karena faktor keahlian, hal ini terlihat pada petugas polisi kehutanan yang memiliki tugas rangkap dan jumlah yang dimiliki saat ini belum cukup ideal.

1 kawasan konservasi minimal memiliki 4 petugas yang terdiri dari 2 orang Polisi Kehutanan, 1 orang Pengendali Ekosistem Hutan, dan 1 orang Penyuluh Kehutanan sedangkan petugas yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke hanya 2 orang terdiri dari 1 Polisi Kehutanan dan 1 Jurumudi Kapal serta petugas kebersihan yang berstatus sebagai pegawai honorer. Perekrutan menjadi terbatas disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil. oleh karena itu Seksi Konservasi Wilayah III lebih banyak melakukan perekrutan kepada relawan / kader konservasi yang ingin terlibat dalam melakukan pengelolaan serta kegiatan di kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta khususnya Suaka Margasatwa Muara Angke.

Dalam hal pengorganisasian Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta lebih meningkatkan pelatihan bagi petugas baik secara teori ataupun praktiknya di lapangan baik itu Diklat, Seminar / Workshop untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing petugas.

3) *Actuating*

Pergerakan merupakan fungsi manajemen yang paling dominan dalam prosesnya karena fungsi tersebut dapat berjalan setelah rencana, organisasi dan anggotanya ada. Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan jika manusia ikut berperan didalamnya. Tetapi bukan sembarang berperan melainkan diikuti secara teratur dengan memiliki suatu tujuan. Untuk menciptakan keteraturan tersebut

dibutuhkan kepemimpinan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam lingkup Seksi Konservasi Wilayah III pengarahan yang diberikan pimpinan kepada anggota organisasi berupa rapat kerja terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, rapat tersebut dibuat untuk menyamakan tujuan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk mengenalkan kawasan konservasi di wilayah Jakarta termasuk Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, maka Seksi Konservasi Wilayah III memiliki cara untuk mengkomunikasikannya dengan mengikuti pameran lingkungan, liputan di televisi dan pembuatan buku mengenai profil kawasan selain itu menjalin mitra dengan komunitas pecinta alam dan kader konservasi yang diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai kawasan khususnya bagi sekolah-sekolah yang ingin mengadakan kunjungan berbasis ilmu pengetahuan sehingga banyak masyarakat yang tahu akan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke sekaligus dapat melestarikan kawasan dengan mengikuti kegiatan yang bersifat positif.

Agar kawasan dapat bertahan sesuai fungsinya maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak terkait yang memiliki tujuan yang sama seperti kerjasama antara Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta dengan LSM IAR dimana kedua belah pihak terikat dengan nota persetujuan yang telah disepakati bersama untuk melakukan kegiatan yang hasilnya dapat memberi hubungan timbal balik bagi masing-masing organisasinya. Dimana keduanya berupaya untuk menjaga

keutuhan kawasan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat untuk dapat hidup berdampingan dengan kawasan. Namun kerjasama terikat yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah III jumlahnya terbilang sedikit karena baru satu LSM sedangkan yang lainnya hanya bersifat sementara.

Sarana prasarana yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke berfungsi sebagai penunjang dari jalannya kegiatan yang dilakukan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta saat ini masih minim, terdapat beberapa sarana yang masa pemakaiannya sudah tua sehingga perlu penggantian dan pemeliharaan secara rutin dan sebagian lagi dalam kondisi rusak. Walaupun kegiatan yang dilakukan di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke bersifat wisata terbatas namun hal tersebut akan berpengaruh pada kenyamanan pengunjung yang datang untuk melakukan observasi/penelitian. Oleh karenanya petugas Seksi Konservasi Wilayah III menjalin hubungan dengan pihak ketiga, Kerjasama yang terjalin dengan perusahaan dalam penguatan fungsi kawasan SMMA, untuk membantu dalam penyediaan barang dan jasa terkait hal yang dibutuhkan oleh kawasan disamping anggaran dari Pemerintah Pusat.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke diantaranya adalah mengikuti kegiatan penanaman di kawasan baik sekolah/universitas/perusahaan, melakukan aksi bersih sampah yang tergabung dalam kegiatan internal Balai, Kelurahan Angke dan LSM, hal ini diikuti oleh peneliti yang melakukan penelitian di kawasan sampai mendapat apresiasi menjadi kader konservasi dari pihak balai, namun kenyataannya masih terdapat kendala dalam bersosialisasi untuk sebagian masyarakat yang tinggal di perumahan elite yang notabene nya sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan jarang berinteraksi dengan sekitar. Walaupun penyuluhan dan sosialisasi dilakukan tetapi menjadi tidak menyeluruh.

4) *Controlling*

Pengawasan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan dan lain-lain kendala dimasa mendatang. Terkait dengan indikator pertama yakni bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah III terbagi dalam dua jenis kegiatan yaitu kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin oleh petugas Polisi Kehutanan dan kegiatan operasi yang dilakukan secara gabungan. Perbedaan keduanya adalah jika kegiatan patroli dilakukan tanpa adanya target operasi maka kegiatan operasi dilakukan berdasarkan kendala/masalah yang ditemukan selama kegiatan patroli itu dilakukan. Dalam hal ini semua pihak yang tergabung dalam melakukan

pengawasan dapat saling berintegrasi satu dengan lainnya terkait dengan pengamanan dan kelestarian kawasan. Walaupun masih terdapat kendala pada pengawasan di malam hari karena kurangnya jumlah petugas namun sudah ada perencanaan untuk melakukan perekrutan tenaga pengamanan hutan yang khusus melakukan pengamanan kawasan di malam hari.

Dari pengawasan patroli yang dilakukan maka hasilnya berupa laporan yang dibuat secara tertulis berupa penyampaian keterangan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan yang nantinya akan diserahkan kepada atasan langsung mengenai kegiatan selama satu hari sampai dengan satu bulan untuk mengetahui perkembangan pengawasan yang dilakukan. Dalam hal ini sistem pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan masing-masing dari setiap Seksi Konservasi Wilayah yang selanjutnya dari pimpinan Seksi tersebut melaporkan kepada Kepala Balai sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan internal. Selanjutnya Kepala Balai melaporkan hasil kinerja atas semua proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKSDA DKI Jakarta kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk membantu petugas dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diberlakukan sistem perizinan bagi siapa saja yang ingin masuk ke kawasan konservasi dengan membuat surat izin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI), dengan adanya SIMAKSI ini dapat menjadi bukti secara legal bagi seseorang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan dan membatasi kegiatan tersebut agar tidak mengganggu fungsi asli dari kawasan. Proses pembuatan SIMAKSI dilakukan secara manual dikarenakan penggunaan SIMAKSI secara online mengalami gangguan dan dalam masa perbaikan, langkah pembuatan cukup jelas dengan membuat surat izin penelitian dari lembaga terkait dengan proposal kegiatan sampai dengan mengisi data diri dengan tujuan datang ke kawasan konservasi yang dilengkapi fotokopi identitas sampai dengan tanda tangan di atas materai sebagai bukti sah dengan mengikuti peraturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan laporan-laporan yang telah dibuat selama kegiatan maka tahap selanjutnya berupa evaluasi yang dilakukan oleh Balai yang dilakukan setiap akhir tahun guna memeriksa dan menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan. Biasanya dalam evaluasi terdapat usulan-usulan dan rekomendasi yang akan menjadi perbaikan untuk perencanaan kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari semua proses penyelenggaraan kegiatan dengan maksud agar tujuan dapat dicapai secara efektif.

Tabel 4.4

Pembahasan dan Hasil Penelitian

No	Dimensi	Temuan Lapangan	Kategori
1	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) kawasan suaka margasatwa muara angke dibuat untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan arah menjadikan kawasan SMMA sebagai pusat pendidikan konservasi di wilayah DKI Jakarta dengan membuat paket pendidikan lingkungan. Namun pada prosesnya pembuatan RPJP kawasan mengalami keterlambatan dari yang seharusnya yang berakibat pada arah pengelolaan yang samar. pihak yang terlibat dalam pengelolaan yakni ada Lembaga Swadaya Masyarakat IAR dan Kelurahan Angke.	Belum Optimal
2	Pengorganisasi an (<i>Organizing</i>)	Seksi Konservasi Wilayah III mengelola 4 kawasan konservasi. Setiap petugas Seksi Konservasi Wilayah III memiliki pembagian tugas secara jelas sesuai dengan jabatan serta keahlian yang dimiliki. Dalam teknis kerja, dapat saling membantu satu sama lain pada setiap Seksi Konservasi Wilayah dikarenakan kekurangan jumlah pegawai akibatnya terdapat petugas yang memiliki beberapa pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang sama. Jumlah petugas Seksi Konservasi Wilayah III belum ideal, dikarenakan kekurangan tenaga fungsionalisasi khusus.	Belum Optimal
3	Pergerakan/ Pengarahan (<i>Actuating</i>)	Pengarahan diberikan melalui rapat kerja pimpinan dan anggota organisasi terkait dalam masalah pengelolaan Kawasan Suaka	Belum Optimal

		<p>Margasatwa Muara Angke. Interaksi untuk mengenalkan kawasan SMMA kepada masyarakat dilakukan dengan cara mengikuti pameran lingkungan, liputan di televisi, sampai dengan pembuatan buku dan poster kawasan konservasi sampai dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga namun belum menjalin kerjasama yang maksimal, dalam hal ini hanya ada 1 lsm dan 1 perusahaan yang terikat hubungan kerja dengan BKSDA DKI Jakarta. Sarana prasarana masih terbatas secara kuantitas dan kualitas serta perawatannya yang belum dilakukan secara rutin. Dukungan partisipasi belum menyeluruh dikarenakan terdapat kendala dalam sosialisasi kepada sebagian masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di perumahan elite.</p>	
4	Pengawasan (<i>Controlling</i>)	<p>Pengawasan dibagi kedalam dua jenis kegiatan terdiri dari Patroli dan Operasi, kegiatan patroli mengalami kendala pada pengawasan di malam hari dan hari libur. Laporan pengawasan dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada pimpinan di masing-masing kedudukan. SIMAKSI digunakan sebagai bukti legalitas bagi pengunjung yang masuk kedalam kawasan konservasi namun pada prosesnya terkadang pembuatan simaksi membutuhkan waktu cukup lama dan dilakukan secara manual karena sistem online simaksi mengalami gangguan. Evaluasi capaian kinerja setiap tahunnya mengalami perbaikan untuk penentuan pada kegiatan selanjutnya.</p>	Belum Optimal

(Sumber : Peneliti, 2016)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta maka peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti buat pada bab I sebelumnya yaitu Bagaimana Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini adalah sebagai berikut :

Pertama, pembuatan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke periode 2016-2025 dengan tujuan untuk menciptakan kawasan sebagai pusat pendidikan lingkungan dan wisata burung air di pesisir Jakarta, langkah awal pengelolaan kawasan dibuat berdasarkan blok-blok pengelolaan yang bertujuan untuk mengatur dan membagi kawasan sesuai dengan fungsinya, namun proses penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang mengalami keterlambatan dari yang seharusnya sudah dimuat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011.

Kedua, Struktur organisasi BKSDA DKI Jakarta dibagi kedalam 3 Seksi Konservasi Wilayah dan pembagian tugas diberikan sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh masing-masing personil. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam lingkup Seksi Konservasi Wilayah III belum ideal dan masih terbatas pada faktor keahlian yang berakibat adanya penugasan rangkap pada petugas yang memiliki jabatan fungsional khusus.

Ketiga, Upaya mengenalkan dan mensosialisasikan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh khususnya masyarakat yang tinggal di perumahan elite, selain itu jalinan kerjasama dengan pihak ketiga belum optimal karena jumlahnya masih sedikit serta perawatan sarana prasarana yang belum dilakukan secara rutin sehingga berakibat pada kondisinya yang rusak dan berpengaruh pada kenyamanan pengunjung yang datang ke kawasan.

Keempat, Pengawasan patroli oleh Polisi Kehutanan terkendala pada pengawasan yang dilakukan diluar jam operasional atau pada pengawasan di malam hari, maka simaksi diberlakukan sebagai bukti legalitas bagi siapa saja yang ingin memasuki kawasan konservasi.

5.2 Saran

1. Bagi pengelola khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJP melalui pembinaan teknis atau diklat yang bertujuan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mekanisme penyusunan RPJP itu sendiri dan mengoptimalkan potensi kawasan dengan mengkaji situasi terhadap status sumber daya alam dan pengembangan wisata alam karena letak Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke cukup strategis untuk bisa dikunjungi masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan dan pembinaan pada petugas secara optimal dan melakukan perekrutan bagi relawan di bidang kehutanan dan lingkungan serta penyediaan pemandu wisata sebagai penuntun pengunjung dalam memasuki Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.
3. Pembentukan dan pengembangan forum kerjasama dengan LSM yang berperan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, dengan Perguruan Tinggi yang berperan dalam menyediakan data informasi ilmiah mengenai sumber daya alam yang ada di kawasan, dengan Swasta yang berperan dalam melakukan promosi kawasan dan penunjang wisata.

Hal ini bertujuan untuk membagi tanggungjawab pengelolaan kepada semua pihak karena keberlanjutan Suaka Margasatwa Muara Angke serta kelestarian penghuninya bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi semua komponen masyarakat.

4. Meningkatkan pemantauan dan melakukan monitoring secara berkala, monitoring akan menghasilkan data yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi serta melakukan perbaikan pada sistem perizinan kawasan dengan waktu yang lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur Fauzan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2001. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Mas Agung.
- Handoko, Dr T Hani. 2013. *Manajemen. Edisi 2*. Yogyakarta : IKAPI BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen (Dasar Pengertian, Masalah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hermawan, M. Taufik dkk. 2014. *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1994. *Manajemen Organisasi*. Jakarta : PT. Widya Press Jakarta.
- Kordi, Gufron H. 2012. *Ekosistem Mangrove : Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Lexy, J Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : IKAPI. Gadjah Mada University Press.

- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media Group.
- Satori, Djaman & Aan, Komariah. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, P Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Peneltian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- ,2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George. 2008. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Terry, George dan Rue, Leslie. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 1983. *Unsur-unsur Administrasi: Suatu Kumpulan Karangan*. Yogyakarta : Supersukses.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen : teori, praktik,dan riset pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonsia.

B. Dokumen Lain

- Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Ensiklopedia Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Muara Angke Seri Fauna Tahun 2014.

C. Sumber Lainnya

Qurniadi, Evan. 2013. *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan*. Ilmu Administrasi Negara. Skripsi. Tidak diterbitkan.

Alfira, Rizky. 2014. *Identifikasi Potensi dan Pengembangan Ekowisata Mangrove pada Kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*. Ilmu Kelautan. Skripsi. Tidak diterbitkan.

http://ditjenphka.dephut.go.id/rencana_strategis_phka. Diakses pada tanggal 16 November 2015 pukul 20.15 WIB.

http://bksdadki.com/struktur_organisasi_bksda_dki_jakarta. Diakses pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 14.16 WIB.

http://bps.go.id/index.php/publikasi/932/statistik_lingkungan_hidup_2014. Diunduh pada tanggal 4 Agustus 2015 pukul 16.55 WIB.

http://www.jakarta.bps.go.id/publikasi/statistik_daerah_provinsi_dki_jakarta_2015. Diunduh pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 20.26 WIB.

http://www.jakutkota.bps.go.id/publikasi/statistik_daerah_kecamatan_penjaringan_2015. Diunduh pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 20.28 WIB.

http://www.jakutkota.bps.go.id/publikasi/statistik_daerah_kota_jakarta_utara_2015. Diunduh pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 20.34 WIB.

Gambaran Kondisi Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke :



Area Masuk Kawasan



Birdwatching



Speedboat Patroli



Pos Jaga



Satwa Monyet Ekor Panjang



Boardwalk



Bibit Tanaman di Kawasan SMMA



Papan Informasi Rusak



Sisi Boardwalk Rusak



Sampah di Perairan Kawasan



Perairan di Kawasan SMMA



Semak Belukar Kawasan SMMA

Kegiatan Wawancara Penelitian :



Wawancara dengan Ibu Ida selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III



Wawancara dengan Ibu Ida selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III



Wawancara dengan Bapak Rizky selaku Penyuluh Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah III



Wawancara dengan Bapak Bene selaku Pengolah Bahan dan Pelayanan Kawasan BKSDA DKI Jakarta



Wawancara dengan Merry selaku Lembaga Swadaya Masyarakat IAR



Wawancara dengan Bapak Jati selaku Polisi Kehutanan Kawasan SMMA



Wawancara dengan Bapak Aripin selaku Jurumudi Kapal di Kawasan SMMA



Wawancara dengan Novi selaku Peneliti di Kawasan SMMA



Wawancara dengan Dina selaku pengunjung Kawasan SMMA



Wawancara dengan Rosyid selaku pengunjung Kawasan SMMA



Menjelajah Kawasan SMMA



Sosialisasi Kawasan kepada Pengunjung



Wawancara dengan Bapak Iman selaku pengunjung Kawasan SMMA



Wawancara dengan Bapak Tanton selaku Polisi Kehutanan SM. P. Rambut

Kunjungan ke Suaka Margasatwa Pulau Rambut Kepulauan Seribu :



Papan Informasi Kawasan SM.P.Rambut



Sisi darat dan Pantai area SM.P.Rambut



Jalur Darat Kawasan SM. P. Rambut



Birdhiding SM.P.Rambut



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1093 /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

18 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta
Jl. Salemba Raya No. 9 - Jakarta Pusat
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Metta Miftahul Jannah
NIM : 6661110776

Semester : X
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Manajemen Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta

Data diperlukan : 1. Observasi awal mengenai pengelolaan kawasan konservasi
2. Profil Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke
3. Perkembangan pengelolaan kawasan SMMA 3 tahun terakhir

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1091 /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

18 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
Jl. Salemba Raya No. 9 – Jakarta Pusat
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Metta Miftahul Jannah
NIM : 6661110776

Semester : X
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Manajemen Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke
oleh Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam
DKI Jakarta

Data diperlukan : Wawancara Mengenai Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

Nomor : S. 507 /IV-K.9/kWS/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan P. 51/Menhut-II/2009;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. P. 7/IV-SET/2011 Tentang Tata Cara Masuk kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
 3. Surat Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Nomor : 1092/UN.43.6.1/PG/2016 Tanggal 18 Mei 2016 perihal izin Data.

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi kepada:

Nama : Metta Miftahul Jannah
Instansi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jumlah : 2 Orang
Tempat : SM. Pulau Rambut
Keperluan : Observasi
Waktu : 30 Mei 2016
Pendamping : 1 Satu Orang
Biaya : 40.000-

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum memasuki kawasan, wajib melapor kepada petugas Seksi Wilayah III KSDA setempat.
2. Didampingi petugas dari Seksi Wilayah III KSDA setempat dengan beban biaya ditanggung oleh pemegang SIMAKSI.
3. Menjaga ketenangan dan ketertiban serta menghindari terjadinya kebakaran hutan selama kegiatan berlangsung.
4. Segala resiko yang terjadi selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggunaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.
6. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal PHKA dan Logo Kementerian Kehutanan dalam film/video yang dibuat.
7. Menyampaikan kepada kami laporan hasil kegiatan dan copy film/Video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
8. SIMAKSI ini bukan merupakan ijin pengambilan/pengangkutan spesimen tumbuhan/satwa liar dari dalam kawasan dan berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp.6.000 dan menandatangani.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 2016



Metta Miftahul Jannah
085710433411



Kepala Balai ,
Ir. Awen Supranata
NIP. 19611116 198903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III
2. Lurah Pulau Untung Jawa
3. Pos Polisi Untung Jawa
4. Petugas

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Kisi-Kisi Wawancara Untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III DKI Jakarta

A. Perencanaan (*Planning*)

1. Apa tujuan dari perencanaan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
2. Apa saja bentuk program kerja dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
3. Seperti apa penerapan prosedur kegiatan dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
4. Apa potensi dominan yang dapat dimanfaatkan dari kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
7. Apa harapan perencanaan mendatang untuk pelestarian kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

B. Pengorganisasian (*Organizing*)

1. Bagaimana struktur organisasi yang ada pada BKSDA DKI Jakarta ?
2. Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
3. Bagaimana menciptakan pola hubungan kerja di lingkup BKSDA DKI Jakarta ?
4. Bagaimana jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

C. Pergerakan (*Actuating*)

1. Bagaimana kerjasama seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dengan LSM dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
2. Apa saja pengusaha seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dalam mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke?
3. Apa bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
4. Bagaimana pengarahan yang diberikan kepada petugas dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
5. Bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
6. Seperti apa perawatan sarana prasarana yang dilakukan petugas di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

D. Pengawasan (*Controlling*)

1. Bagaimana kegiatan pemantauan / patroli kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan di Suaka Margasatwa Muara Angke ?
3. Berapa kali kegiatan pengawasan dilakukan dalam satu bulan ?
4. Bagaimana koordinasi dalam melakukan pengawasan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
5. Bagaimana pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan tersebut ?
6. Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
7. Bagaimana menghadapi bentuk laporan yang berisi kritik dari pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
8. Bagaimana sistem perizinan memasuki kawasan konservasi SMMA ?
9. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar aturan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Kisi – Kisi Wawancara Untuk Pengunjung Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke saat ini ?
2. Apa saja yang ada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang anda ketahui ?
3. Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
4. Bagaimana kenyamanan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
5. Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini ?
6. Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
7. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
8. Seperti apa bentuk partisipasi anda sebagai pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
9. Apa yang harus dilakukan pihak pengelola untuk mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke lebih lanjut ?
10. Bagaimana harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

TRANSKRIP DATA

Perencanaan

Q I	Apa tujuan dari Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I₁	Mengenai perencanaan pengelolaan kawasan konservasi sendiri disusun secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang didalamnya itu terdapat rencana pengelolaan yang dilakukan untuk mengelola kawasan suaka alam melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pengendalian. Jadi rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa disusun berdasarkan aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. dengan melakukan upaya perlindungan dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu rencana pengelolaan suaka margasatwa ini juga sebagai pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan juga untuk keperluan wisata alam terbatas.
I₂	Arah pengelolaan suaka margasatwa muara angke itu adalah menjadikan suaka margasatwa muara angke ini sebagai pusat pendidikan konservasi terutama pada mangrove dan lahan basah di Jakarta, kawasan dapat menjadi media edukasi mengenai konservasi bagi kepentingan penelitian serta pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Jakarta. Selain itu kawasan ini bisa digunakan untuk wisata alam terbatas sehingga tidak menghilangkan fungsi dan status kawasannya walaupun jika dilihat kondisinya sekarang mengalami kendala dari faktor alam seperti banjir, faktor manusia seperti membuang sampah, dan polusi dari kegiatan pembangunan disekitar kawasan.
Q I	Apa saja Rencana Kegiatan dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I₁	Rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke sekarang berdasarkan blok blok kawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya dimana setiap kawasan konservasi itu harus dibagi kedalam blok-blok pengelolaan mulai dari

	<p>penyusunan dan pemetaan, pematangan batas blok sampai dengan sosialisasi blok, blok-blok pengelolaan itu tujuannya untuk memudahkan pengelolaan juga untuk membatasi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan. Untuk kajian pengelolaan diterapkan melalui analisis swot dengan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan keadaan kawasan mulai dari perumusan visi dan misi yang dilanjutkan dengan pembuatan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi tersebut.</p>
I ₂	<p>Dalam pedoman rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke untuk jangka waktu 10 tahun kedepan itu sebelumnya ada penetapan blok kawasan, baru setelah itu dibuat rencana pengelolaan dengan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misinya. Adapun program yang menjadi prioritasnya terdiri dari program paket pendidikan lingkungan, selain itu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana, pengawetan keanekaragaman hayati, pemanfaatan wisata alam terbatas, pengembangan koordinasi pengelolaan sampai dengan pengolahan data base potensi kawasan.</p>
Q I	<p>Mengapa dalam pembuatan Rencana Pengelolaan mengalami keterlambatan ?</p>
I ₁	<p>Kita memang terlambat untuk menyusun rencana pengelolaan harusnya begitu kawasan ditetapkan maka segera disusun rencana pengelolaan tetapi kita terlambat, jadi kita selama ini sebelum ada rencana pengelolaan pekerjaannya tidak fokus karena tidak tahu apa yang menjadi visi Suaka Margasatwa Muara Angke, dari tahun 2011 memang sudah ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan KSA dan KPA yang harus dibuat rencana pengelolaannya tapi terlambat jadi pengelolaan yang kemarin tidak tahu arahnya kemana, nah karena sekarang sudah ada rencana pengelolaan yang terbentuk jadi memiliki goal untuk 10 tahun lagi kawasan akan seperti apa, apa yang ingin dicapai dan step-step nya akan lebih jelas.</p>
Q I	<p>Apa potensi dominan yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?</p>
I ₁	<p>Potensi dominan yang ada di kawasan adalah mangrove itu sendiri karena letak</p>

	<p>kawasan dekat dengan perairan laut dan sungai tentunya kawasan ini memiliki peran penting sebagai pencegah banjir untuk daerah sekitar kawasan dan sumber kehidupan bagi nelayan yang mencari nafkah di perairan sekitar kawasan dan sebagai habitat satwa yang memang disekitar mangrove itu sendiri.</p>
I ₂	<p>Potensi dominan yang ada di suaka margasatwa muara angke adalah kesatu lokasinya strategis mudah untuk diakses secara fisik, kalau secara ekologi bisa dibilang sangat potensial untuk studi riset karena tinggal itu saja yang statusnya kawasan konservasi di Jakarta, selanjutnya masih banyak jenis satwa yang ada di kawasan terutama burung dan monyet, suasana di kawasan juga terasa nyaman dan tenang dapat dilihat bahwa viewnya itu berbeda seperti tidak berada di Jakarta.</p>
I ₃	<p>Rata-rata yang kekawasan itu biasanya untuk penelitian kalau yang komersil kayanya gak ada, saat ini memang untuk pendidikan konservasi saja, anak-anak sekolah biasanya datang untuk observasi terkait tugas sekolah mereka. potensi lebih ada di mangrovenya untuk mencegah abrasi dari pantai utara Jakarta.</p>
Q I	<p>Siapa saja pihak yang terlibat dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?</p>
I ₁	<p>Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat ada yang bersifat insidental seperti pendidikan lingkungan, penanaman, dan bersih sampah. Selain itu yang rutin turut serta mengelola mengenai monitoring satwa monyet ekor panjang adalah LSM IAR. Kami juga bekerjasama dengan pihak kelurahan Angke dan juga beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.</p>
I ₂	<p>Kalau pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke ya sudah pasti pihak Balai KSDA DKI Jakarta, kalau eksternalnya ada masyarakat, dari kelurahan ada Pak Lurah yang mengkoordinir untuk melaksanakan tugas kebersihan setiap minggu di suaka margasatwa muara angke, yang kedua ada dari LSM IAR yang melaksanakan program mitigasi konflik satwa, selain itu dari pihak swasta juga ada yakni perusahaan untuk penguatan fungsi suaka margasatwa muara angke, ia banyak membantu dalam alat alat kebersihan, untuk masyarakat sekitar kalau kita</p>

	mengadakan kegiatan kita selalu mengundang masyarakat untuk hadir, terus masyarakat yang lain diluar suaka margasatwa muara angke juga ada seperti komunitas-komunitas biasanya, ada komunitas Transformasi Hijau Indonesia mereka sering mengadakan kegiatan di suaka margasatwa muara angke ada juga Forum Komunikasi Kader Konservasi kegiatannya adalah pengamatan burung dan bersih sampah.
I ₅	Bentuk kerja yang dilakukan IAR secara teknis melakukan sendiri, kegiatannya meliputi pengambilan data, hasil dan laporan kegiatan yang berlangsung di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, kalau BKSDA bertindak sebatas perizinan untuk mengadakan kegiatan di Kawasan.

Pengorganisasian

Q I	Bagaimana struktur organisasi di Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta ?
I ₁	Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta didalamnya membawahi tiga seksi konservasi wilayah, kalau seksi konservasi wilayah I itu wilayah kerjanya meliputi wilayah Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, seksi konservasi wilayah II meliputi wilayah Tangerang dan Jakarta Barat, dan seksi konservasi wilayah III itu meliputi wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu. Dan Suaka Margasatwa Muara Angke ada di daratan Jakarta Utara.
I ₂	Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dibagi dalam tiga seksi pengelolaan, seksi konservasi wilayah namanya, nah suaka margasatwa muara angke ini terdapat dalam lingkup seksi konservasi wilayah III termasuk cagar alam pulau bokor, suaka margasatwa pulau rambut dan taman wisata angke kapuk juga, kebetulan seksi wilayah III kebagian jatah empat kawasan konservasi dalam pengelolaannya.
Q I	Bagaimana pembagian tugas kepada petugas dalam pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I ₁	Setiap personel petugas yang ada pada seksi konservasi wilayah III sudah memiliki tugasnya masing-masing, ada yang bertindak merencanakan kegiatan di

	<p>kawasan, ada yang bertugas pengamanan di kawasan ada yang melakukan pendataan isi kawasan seperti satwa dan tumbuhan yang nantinya akan dibahas bersama sama di kantor untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi kawasan sampai dengan pada tahap evaluasi dan pelaporan.</p>
I ₂	<p>Setiap kegiatan yang berhubungan dengan kawasan konservasi sudah ada standarnya masing-masing yang diberi nama Norma Standar Pelaksanaan Kegiatan dan itu dibagi-bagi secara spesifik tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.</p>
Q I	<p>Bagaimana hubungan kerja pada setiap Seksi Wilayah Konservasi BKSDA DKI Jakarta ?</p>
I ₁	<p>Kegiatan internal dari pihak BKSDA DKI Jakarta yakni seperti polisi kehutanan melakukan patroli kawasan dan bersih sampah , kalau dengan pak lurah melakukan kegiatan penanaman serta sosialisasi kawasan kepada masyarakat, sedangkan dengan lembaga swadaya masyarakat itu kegiatannya monitoring dan pendataan kawasan lalu dengan pihak pengembang perumahan pantai indah kapuk (PIK) adalah pemasangan atribut yang berhubungan dengan kawasan.</p>
I ₂	<p>Hubungan kerja dilihat dari struktur organisasi, masing-masing seksi itu berjalan sendiri, anggaran dari balai, kepala balai yang mengatur anggaran dan perencanaan, untuk pelaksanaan seksi konservasi tergantung daerahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika seksi wilayah III kekurangan sumber daya itu bisa menarik lagi dari seksi yang lain seperti jabatan fungsional yang gak terbatas sama wilayah kerja karena sistemnya keahlian. Fungsional khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan ada tiga yang dibina yakni Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan.</p>
Q I	<p>Bagaimana jumlah sumber daya manusia di Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta ?</p>
I ₁	<p>Jumlah sumber daya manusia di BKSDA DKI Jakarta terutama pada seksi wilayah III sebenarnya masih belum cukup, terlebih lagi dengan adanya rangkap jabatan dari polisi kehutanan. Jumlah SDM polhut di kawasan SMMA saat ini hanya ada 2 orang padahal idealnya dalam satu kawasan minimal ada 4 orang yang terdiri dari</p>

	2 orang polisi kehutanan 1 orang PEH dan 1 orang penyuluh kehutanan.
I ₂	BKSDA DKI Jakarta kekurangan sumber daya manusia dilapangan baik secara kualitas dan kuantitas ya, perhitungannya untuk wilayah DKI Jakarta, pengelolaan BKSDA itu kan satu wilayah DKI Jakarta itu kurang lebih hanya 130 orang dan harus dibagi-bagi untuk satu wilayah DKI Jakarta, sementara kebijakan dari Menpan sendiri adanya moratorium PNS, jadi di BKSDA DKI Jakarta masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi kepada pegawai yang ada.
I _{4.1}	Kalau kendala sebenarnya banyak misalnya gak ada temennya kalau mau patroli malam, terus anggota kami sedikit, ini satu kawasan ini minimal enam orang termasuk petugas kebersihan, jadi kalau petugasnya banyak saya bisa melakukan shift tiga kali bisa pagi, siang dan malam , makanya sepintar-pintarnya kami membagi petugas di lapangan.

Pergerakan

Q I	Seperti apa bentuk pengarahan yang diberikan Kepala Seksi kepada petugas dalam pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke?
I ₁	Dalam pengelolaan kawasan sendiri dimulai dengan menyusun rencana kegiatan dengan berbagai masalah yang dihadapi kawasan, saya memberikan pengarahan melalui rapat dengan petugas di seksi III dengan harapan bahwa semua pekerjaan dapat berjalan baik sesuai rencana. tidak jarang juga lembaga swadaya masyarakat yang memiliki ikatan kerja dengan kami akan dilibatkan untuk dapat membantu kami dalam proses pengelolaan di lapangan, selain itu kami juga mensosialisasikan kepada kelurahan agar dapat secara langsung mengikuti kegiatan yang kami adakan di kawasan.
I ₂	Bentuk pengarahannya biasanya memang melalui rapat kerja, dalam rapat tersebut kami berkomunikasi mengenai hal yang berkaitan dengan tugas kami di masing-masing jabatan yang dimiliki. Seperti saya selaku penyuluh kehutanan itu jabatannya fungsional khusus, atasan langsung saya adalah Kepala Seksi yang nantinya saya diberi semacam kontrak kerja yang disepakati bersama dan target

	yang harus saya capai dalam satu tahun, melalui standar kinerja pegawai atau SKP dan nantinya akan dievaluasi.
Q I	Apa saja pengusahaan Seksi Konservasi Wilayah III dalam mengenalkan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I₁	Selain kami bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, kami mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini dengan mengikuti pameran lingkungan dan liputan-liputan di media televisi, kami juga membuat buku mengenai profil kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, brosur kawasan dan stiker kawasan konservasi yang nantinya dapat kami jadikan media komunikasi kepada masyarakat. Selain itu kami juga mengikuti acara-acara seminar yang diadakan oleh pusat untuk dapat saling berbagi informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi.
I₂	Cara mengenalkan kawasan suaka margasatwa muara angke kepada masyarakat dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk memberitahu kalau masih ada kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta dan bagaimana kita menjaga kawasan tersebut, kalau untuk brosur dan stiker itu biasanya digunakan pada saat pameran, liputan berita dll.
Q I	Bagaimana hubungan kerja sama Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta dengan LSM ?
I₁	Kami melakukan kegiatan kerjasama dengan LSM inisiasi alam rehabilitasi (IAR) yang dimana kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke mengenai mitigasi satwa monyet ekor panjang serta hubungan timbal baliknya bagi masyarakat sekitar kawasan.
I₅	Hubungan kerjasama BKSDA DKI Jakarta dengan IAR memang ada, kami diberi tugas untuk migitasi monyet ekor panjang, jadi kawasan konservasi ini bersebelahan dengan permukiman penduduk, karena di kawasan ini terdapat monyet ekor panjang jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan monyet ekor panjang ini keluar dari kawasan masuk ke permukiman penduduk. Ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat sekitar dan pemerintah, karena monyet ekor panjang bisa mengganggu masyarakat sekitar, bisa mengambil sampah-sampah

	<p>makanan di sekitar perumahan masyarakat, atau bisa menyakiti masyarakat sendiri. Jadi tugas kami disini membantu penanganan konflik monyet ekor panjang dengan manusia atau masyarakat sekitar kawasan.</p>
<p>Q I</p>	<p>Bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?</p>
<p>I₂</p>	<p>Kalo untuk fasilitas pengunjung sebenarnya kan SM. Muara Angke bukan tempat wisata dan kita tidak mengarah kesitu. Karena kalau aturan nya kan harus pakai simaksi berapa orang yang ke kawasan tujuannya harus jelas, tapi kalau ditanya fasilitas untuk wisata dengan status kawasan konservasi saya rasa cukup.</p>
<p>I₅</p>	<p>Fasilitas yang ada di kawasan Suaka Margasatwa sendiri setiap tahunnya pasti ada perbaikan tergantung dana yang disediakan oleh pusatnya. Yang paling utamanya ada pada boardwalk / jembatan karena untuk pengunjung dapat melihat dan menyusuri kawasan selain itu ada pos jaga untuk petugas melakukan penjagaan kawasan tetapi masih kurang nyaman kalau dilihat tetapi mungkin kalau sudah terbiasa ya gak jadi masalah besar.</p>
<p>I_{4.1}</p>	<p>Sarpras disini sebetulnya dilengkapi cuma kadang kadang begini ya kita sudah mengajukan tapi dananya dari sana gak ada, kalau saya minta bantuan ke perumahan saya koordinasi dalam pembuatan papan-papan dipinggir jalan tentang kawasan SM. Muara Angke, terus untuk penanaman dikawasan saya ngumpulin LSM atau anak-anak sekolah yang mau menanam kita sediakan lokasinya dan pembayarannya tetap dilakukan dikantor jadi tugas saya seperti menyalurkan dan membina untuk kepentingan kawasan dan lingkungan.</p>
<p>I_{6.1}</p>	<p>Jembatan pengamatan masih sangat kurang. Akses hanya setengah dari keseluruhan jembatan dan tidak adanya pengaman di kanan dan kiri jembatan. Karena hal tersebut menjadikan kawasan ini tidak aman untuk dikunjungi oleh anak-anak bahkan orang dewasa.</p>
<p>I_{7.3}</p>	<p>Sarana dan prasarana menurut saya sudah lumayan baik di banding tahun sebelumnya sudah ada beberapa perbaikan jembatan-jembatan yang bisa dilalui oleh pengunjung yang ingin observasi ke kawasan ini. selain itu sarana lain masih bisa dikembangkan seharusnya seperti papan-papan informasi mengenai isi dari</p>

	kawasan konservasi itu sendiri contohnya jenis-jenis satwa, tanaman, dan burung-burung.
Q I	Bagaimana kenyamanan selama berada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan keadaan sekitarnya?
I_{6.2}	Nyaman sih, saya neliti disini kurang lebih 3 bulan dan hampir 2 bulan saya disini gak ngalamin kejadian yang merugikan saya, saya bisa keliling kawasan tanpa didampingi lagi karena satwanya juga udah kaya kenal sama saya.
I_{7.1}	Agak kurang nyaman, karena kondisi disini yang saya bayangkan masih suasana alam tapi kenyataannya banyak sekali perubahan dari fungsi asli suaka margasatwa yang seharusnya. Kalo untuk suaka margasatwa di daerah DKI Jakarta kondisinya bisa dikatakan banyak mengalami perubahan dari kondisi alaminya, dan mengalami pencemaran lingkungan di sekitar kawasan suaka margasatwanya dan keadaan sekitar banyak permukiman-permukiman kumuh nelayan yang letaknya disebrang sungai padahal ini merupakan kawasan konservasi seharusnya harus bersih dari hal-hal itu takut mengganggu satwa-satwa yang ada di kawasan Suaka Margasatwa ini.
I_{7.2}	Kalo disini agak kurang nyaman yah soalnya kecium bau gak sedap dari sampah yang ada disini dari airnya yang kotor. Kalau dibilang bagus aslinya bagus ya ka, cuma kalau dari depan itu kaya tempat ini terpencil gitu kurang terlihat aja gitu, padahal kita lihat banyak gedung megah tapi gak terpikir gitu ada Suaka Margasatwa dan disini sampah disekitarnya masih banyak juga jadi kelihatan lingkungannya kurang terjaga.
I₈	Kawasannya kelihatan seperti hutan saja, pohonnya lebat ada binatangnya juga kadang suka banyak monyet kalau mau sore, monyetnya pada turun nyari makan, suami saya kalau nyari ikan ini ya disekitaran sungai angke terus sampe ke laut.
Q I	Seperti apa bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I₁	Biasanya sekolah atau lsm mengikuti kegiatan berupa penanaman tumbuhan kegiatan bersih sampah sampai pada sosialisasi dengan pihak kelurahan, selain itu biasanya perusahaan ikut turut serta dalam pengadaan perlengkapan yang

	menyangkut kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.
I _{6.1}	Bentuk partisipasi yang saya lakukan yakni ikut membantu menjaga kebersihan kawasan dan kebetulan saya didaulat untuk menjadi duta konservasi kawasan mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke.
I _{6.2}	Saya sebagai peneliti di kawasan ini tugas saya mengamati perilaku satwa yang saya teliti, keadaan sekitarnya seperti apa dan kalau laporan saya selesai mungkin bisa berguna juga buat data di balai, selama saya neliti disini saya bantu-bantu petugas dalam kebersihan disini.
I _{4.1}	Penyuluhan untuk bersih sampah biasanya koordinasi sama kelurahan kalau untuk masyarakat sekitar kawasan agak susah soalnya kan samping-samping kawasan ini perumahan elite dan susah ketemu sama yang punya rumah paling ada asisten rumah tangganya aja, malah yang bisa diajak ngumpul ya nelayan sekitar kawasan.

Pengawasan

Q I	Bagaimana pengawasan yang dilakukan di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I ₁	Pengawasan rutin dilakukan setiap jam kerja oleh Polisi Kehutanan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, sedangkan pihak balai melakukan pengawasan setiap sebulan sekali terlebih jika ada kegiatan operasi maka tidak hanya balai, pihak lain seperti TNI AL dan Polisi juga turut serta dalam melakukan pengawasan di kawasan untuk mencegah terjadinya pencurian dan penyelundupan satwa dan tumbuhan secara illegal.
I ₂	Kegiatan pengawasan di kami itu ada yang namanya patroli, patroli dilakukan setiap hari oleh polisi kehutanan yang laporannya ditulis setiap hari dan diserahkan ke kantor, ada juga operasi yang itu biasanya kalau ada kasus di suaka margasatwa kita kerjanya gabungan. nah kalau perbedaan antara patroli dan operasi, kalau patroli itu tanpa target operasi seperti jalan menyusuri kawasan mengambil data, kalau operasi dari setiap laporan patroli ditemukan beberapa kendala atau masalah maka operasi itu berupa tindakannya.

I _{4.1}	<p>Patroli kawasan saya lakukan tidak mengenal waktu bisa siang bisa malam, kalau jam operasionalnya dari senin sampai jumat, kadang saya masih nemuin orang-orang yang mancing atau mengambil ikan secara liar di malam hari di kawasan SM. Muara Angke makanya malam hari saya juga patroli untuk menghindari adanya kejahatan-kejahatan lainnya dan Saya patroli itu minimal lima kali bahkan sabtu minggu walaupun tidak ada kaitan kerja alias libur, saya tetap patroli karena pada hari-hari libur itu banyak orang yang suka masuk ke kawasan tanpa izin, nah kalau patroli itu kewajiban kita sehari-hari kalau kawasannya ingin bagus dan tidak dijamah orang maka harus patroli, kalau operasi itu dilakukan secara mendadak sesuai laporan jika ada pelanggar yang masuk kedalam kawasan SM. Muara Angke tanpa izin maka kegiatan itu akan kita sapu dan langsung kita tangkap.</p>
I _{4.2}	<p>Untuk pengaman kawasan sendiri ada patroli kawasan, patroli ada dua jalur bisa melalui jalur darat yaitu jalan di sepanjang boardwalk terus kalau jalur air naik speedboat, seperti itu patroli harian yang saya lakukan di kawasan ini, Setiap hari kerja dari hari senin sampai jumat jamnya dari jam 08.00 sampai jam 16.00 tugasnya yaitu patroli, penyuluhan, koordinasi dan juga pelaporan kegiatan pengawasan.</p>
<p style="text-align: center;">Q /\ I</p>	<p style="text-align: center;">Bagaimana pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan ?</p>
I ₁	<p>Setiap hari petugas yang bekerja melaporkan kegiatannya ke kantor selama berjaga di kawasan sampai dengan satu bulan aktivitasnya di kawasan sampai dengan bulan-bulan berikutnya, setelah itu laporan dibuat setiap bulannya secara tertulis yang nantinya akan dilaporkan kepada saya selaku kepala seksi, lalu nantinya laporan tersebut akan diperiksa oleh kepala balai baru setelah itu kita adakan rapat evaluasi.</p>
I _{4.1}	<p>Laporan saya buat langsung kepada Kepala Seksi, setiap bulan kita buat laporan untuk kejadian apa-apanya kita tulis, yang masuk ke kawasan SM. Muara Angke berapa orang nanti kita laporkan ke kantor, laporannya bulanan dibuat secara tertulis kita fotoin juga ada foto-fotonya kalau untuk laporan mengenai pelanggar yang masuk kawasan tanpa izin itu biasanya kita diberitahu oleh petugas keamanan setempat jadi kita bekerjasama untuk menindak orang-orang yang</p>

	melanggar.
I _{4.2}	Saya buat laporan penjagaan berdasarkan kegiatan sehari-hari dan ada juga laporan kasus dibuatnya secara tertulis yang nanti akan dilaporkan ke Balai. Begitu juga dengan sanksi, kita ada diberikannya itu mulai dari menegur sekali dua kali, kalau tidak mendengarkan maka barangnya langsung disita tergantung kegiatannya apa entah dia mancing entah bawa jebakan burung terus langsung dibawa ke kantor.
Q I	Bagaimana sistem perizinan memasuki Kawasan Konservasi ?
I ₁	Untuk memasuki kawasan konservasi harus menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi atau yang biasa disebut (SIMAKSI), nah hal ini sebagai bukti legalitas seseorang yang ingin melakukan aktivitas tertentu di kawasan konservasi karena kawasan konservasi sendiri sifatnya adalah untuk kegiatan wisata terbatas saja.
I ₃	Simaksi dibuat secara manual kalau yang sistem onlinenya memang sedang ada gangguan jadi sekarang kebanyakan orang datang mengajukan proposal lalu simaksi dibuat nunggu dua sampai tiga hari untuk tanda tangan persetujuannya oleh kepala Balai, paling lama seminggu pembuatannya.
I _{6.1}	Untuk pembuatan SIMAKSI sendiri saya bawa surat izin penelitian, melampirkan proposal penelitian lengkap dengan estimasi waktu penelitian plus fotokopi KTP, satu sampai tiga hari SIMAKSInya bisa selesai dan langsung mulai penelitian di lokasi yang kita tuju.
Q I	Bagaimana proses evaluasi pada kegiatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
I ₁	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang telah dibuat yang nantinya akan dibahas secara bersama-sama oleh BKSDA DKI Jakarta, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan mengambil pelajaran dari pengelolaan kegiatan, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan, evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun dengan maksud untuk memberikan usulan

	atas kekurangan yang dihadapi secara teknis di lapangan.
I ₂	Setiap mau menjalankan kegiatan kita pasti rapat dan setiap akhir tahun kita selalu melakukan evaluasi dan monitoring, Kepala Balai juga selalu melakukan supervisi melalui Kepala Seksi atau beliau sendiri datang ke lapangan, setiap habis melakukan kegiatan kita selalu melaporkan ke Kepala Balai walaupun terkadang kita maunya rapat tetapi Kepala Balai waktunya tidak ada, jadi kita laporkan secara tertulis nanti beliau membaca dan nantinya di akhir tahun di evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan nantinya tahun depan apa yang akan direncanakan seperti itu.

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Ida Harwati, S.Hut., M.Eng

Jabatan : Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta

Umur : 38 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana perencanaan yang dibuat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta untuk Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Mengenai perencanaan pengelolaan kawasan konservasi sendiri itu disusun secara teknis yang dimana mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang didalamnya itu terdapat rencana pengelolaan yang dilakukan untuk mengelola kawasan suaka alam dengan melalui tahap-tahap kegiatan yakni perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pengendalian.

Metta Miftahul J : Apa Tujuan dari rencana pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Jadi rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa disusun berdasarkan aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis, juga sosial budaya. dengan melakukan upaya perlindungan dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu rencana pengelolaan suaka margasatwa ini ditujukan sebagai pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, penunjang ilmu

pengetahuan dan pendidikan, dan juga untuk keperluan wisata alam terbatas.

Metta Miftahul J : Apa saja bentuk program dan kegiatan untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke sekarang dibuat berdasarkan blok blok kawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya dimana setiap kawasan konservasi itu harus dibagi kedalam blok-blok pengelolaan mulai dari tahap penyusunan dan pemetaan, pematangan batas blok sampai dengan sosialisasi blok, blok-blok pengelolaan itu memiliki tujuan untuk memudahkan pengelolaan dan untuk membatasi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan. Untuk kajian pengelolaan diterapkan melalui analisis swot dengan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan keadaan kawasan mulai dari perumusan visi dan misi yang dilanjutkan dengan pembuatan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi tersebut.

Metta Miftahul J : Bagaimana penerapan prosedur kegiatan dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Untuk penerapan prosedur kegiatan sebenarnya setiap kegiatan sudah memiliki perencanaannya sendiri-sendiri tergantung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.

Metta Miftahul J : Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Ibu Ida Harwati** : Pihak Balai bekerja sama dengan LSM, ada yang bersifat insidental seperti pendidikan lingkungan, kegiatan penanaman, dan aksi bersih sampah. Kalau yang rutin melakukan monitoring satwa monyet ekor panjang ada LSM IAR. Kami juga bekerja sama dengan pihak keluarahan Angke dan juga beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke.
- Metta Miftahul J** : Apa potensi dominan yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Ibu Ida Harwati** : Untuk potensi dominan yang ada di kawasan adalah dari mangrovenya itu sendiri karena letak kawasan dekat dengan perairan laut dan sungai tentunya kawasan ini memiliki peran penting sebagai pencegah banjir untuk daerah sekitar kawasan dan dapat juga sebagai sumber kehidupan bagi nelayan yang mencari nafkah di perairan sekitar kawasan.
- Metta Miftahul J** : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Ibu Ida Harwati** : Faktor pendukung untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke adalah ikut andilnya pemerintah setempat dalam menjaga kebersihan di lingkungan Suaka Margasatwa Muara Angke khususnya rutin dalam aksi bersih sampah. Kalau faktor penghambatnya adalah kawasan tercemar oleh polusi sekitar kawasan belum lagi kalau terjadi banjir maka sampah bisa masuk lebih banyak ke kawasan dan keadaan tumbuhan di kawasan saat ini banyak dimasuki oleh tumbuhan liar.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana koordinasi seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dalam manajemen pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Ibu Ida Harwati** : Kegiatan internal dari pihak BKSDA DKI Jakarta yakni seperti polisi kehutanan melakukan patroli kawasan dan bersih sampah, kalau dengan pak lurah melakukan kegiatan penanaman serta sosialisasi kawasan kepada masyarakat, sedangkan dengan lembaga swadaya masyarakat itu kegiatannya monitoring dan pendataan kawasan lalu dengan pihak pengembang perumahan pantai indah kapuk (PIK) adalah pemasangan atribut yang berhubungan dengan kawasan.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana struktur organisasi yang ada pada BKSDA DKI Jakarta ?
- Ibu Ida Harwati** : Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Balai dan membawahi tiga seksi konservasi wilayah, kalau seksi konservasi wilayah I itu wilayah kerjanya meliputi wilayah Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, seksi konservasi wilayah II meliputi wilayah Tangerang dan Jakarta Barat, dan seksi konservasi wilayah III meliputi wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu. Dan Suaka Margasatwa Muara Angke ada di daratan Jakarta Utara.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab BKSDA DKI Jakarta dalam pengelolaan kawasan SMMA ?
- Ibu Ida Harwati** : Sebenarnya setiap personil petugas yang ada pada seksi konservasi wilayah III sudah memiliki tugasnya masing-masing, ada yang bertindak merencanakan kegiatan di kawasan, ada yang bertugas pengamanan di kawasan ada yang melakukan pendataan isi kawasan seperti satwa dan tumbuhan yang selanjutnya akan dibahas bersama-sama di kantor untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi kawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Jumlah sumber daya manusia di BKSDA DKI Jakarta terutama pada seksi wilayah III sebenarnya masih belum cukup, terlebih lagi dengan adanya rangkap jabatan dari polisi kehutanan. Jumlah SDM polhut di kawasan SMMA saat ini hanya ada 2 orang padahal idealnya dalam satu kawasan minimal ada 4 orang yang terdiri dari 2 orang polisi kehutanan 1 orang PEH dan 1 orang penyuluh kehutanan.

Metta Miftahul J : Bagaimana perizinan memasuki kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Untuk memasuki kawasan konservasi harus menggunakan surat izin memasuki kawasan konservasi atau yang biasa disebut dengan (SIMAKSI), nah simaksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti legalitas seseorang yang ingin melakukan kegiatan tertentu di kawasan karena memang kawasan konservasi sendiri sifatnya adalah untuk kegiatan penelitian dan wisata tetapi sifatnya terbatas.

Metta Miftahul J : Bagaimana kerjasama seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dengan LSM dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Kami melakukan kegiatan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat inisiasi alam rehabilitasi (IAR) yang dimana kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, mereka memiliki tugas mengenai mitigasi satwa monyet ekor panjang serta seperti apa feedbacknya bagi masyarakat sekitar kawasan.

Metta Miftahul J : Apa saja perusahaan seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dalam mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke?

Ibu Ida Harwati : Selain kami bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, kami mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini dengan mengikuti pameran lingkungan dan liputan-liputan di media televisi, kami juga membuat buku mengenai profil kawasan, brosur dan stiker kawasan, selain itu kami juga mengikuti acara seminar yang diadakan oleh pusat untuk dapat saling berbagi informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi.

Metta Miftahul J : Apa saja bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Biasanya sekolah atau LSM mengikuti kegiatan berupa penanaman tumbuhan kegiatan bersih sampah sampai pada sosialisasi dengan pihak Kelurahan, selain itu biasanya perusahaan ikut turut serta dalam pengadaan perlengkapan yang menyangkut kawasan, tapi kalau berbicara soal masyarakat yang ada di lingkungan perumahan elite agak sulit untuk mengkoordinir kehadiran warganya untuk hadir dalam kegiatan yang kami lakukan.

Metta Miftahul J : Seperti apa pengarahan yang diberikan kepada petugas dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Dalam melakukan pengelolaan kawasan sendiri dimulai dengan menyusun rencana kegiatan yang meliputi berbagai masalah di kawasan, saya memberikan pengarahan melalui rapat dengan petugas di seksi III dengan harapan bahwa semua pekerjaan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana. Selain itu tidak jarang juga LSM yang memiliki ikatan kerja dengan kami

dilibatkan dengan tujuan untuk dapat membantu dalam proses pengelolaan secara teknis di lapangan, selain itu kami mensosialisasikan kepada Kelurahan agar dapat langsung mengikuti kegiatan yang kami adakan di kawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Sarana prasarana yang ada di kawasan SM. Angke diantaranya boardwalk, pos jaga, menara pandang, cuma kondisinya memang sedang dalam perbaikan, kalau untuk bangunan kosong itu milik Dinas Pertanian dan Kelautan yang sudah tidak digunakan lagi sehingga seolah-olah tidak terurus, akan tetapi dalam waktu dekat sudah ada rencana serah terima aset dari Dinas kepada Balai.

Metta Miftahul J : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Pengawasan rutin dilakukan setiap jam kerja oleh Polisi Kehutanan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, sedangkan pihak balai melakukan kawasan setiap beberapa sebulan sekali terlebih jika ada kegiatan operasi maka tidak hanya balai, pihak lain seperti TNI juga turut serta dalam melakukan pengawasan di kawasan untuk mencegah terjadinya pencurian dan penyelundupan satwa secara illegal.

Metta Miftahul J : Bagaimana pelaporan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Setiap hari petugas yang bekerja melaporkan kegiatannya ke kantor selama berjaga di kawasan sampai dengan waktu satu bulan mereka melakukan aktivitasnya di kawasan sampai dengan bulan-bulan kedepan, setelah itu laporan dibuat setiap bulannya secara tertulis yang nantinya akan dilaporkan kepada saya selaku Kepala Seksi, lalu nantinya laporan tersebut akan diperiksa oleh Kepala Balai, dan baru setelah itu kita lanjutkan dengan mengadakan rapat evaluasi.

Metta Miftahul J : Bagaimana proses evaluasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan ?

Ibu Ida Harwati : Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang telah dibuat yang nantinya akan dibahas secara bersama-sama oleh BKSDA DKI Jakarta, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan mengambil poin-poin pelajaran dari pengelolaan kegiatan, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan, evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun dengan maksud untuk memberikan usulan atas kekurangan yang dihadapi secara teknis di lapangan.

Metta Miftahul J : Apa yang menjadi kendala dalam penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ida Harwati : Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rencana ini memang terlambat menyusun rencana pengelolaan harusnya begitu kawasan ditetapkan maka segera disusun rencana pengelolaan tetapi kita terlambat, jadi kita selama ini sebelum ada rencana pengelolaan pekerjaannya tidak fokus karena tidak tahu apa yang menjadi visi Suaka Margasatwa Muara Angke, dari tahun 2011 memang sudah ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan KSA dan KPA yang harus dibuat rencana pengelolaannya tapi terlambat jadi pengelolaan yang kemarin

tidak tahu arahnya kemana, nah karena sekarang sudah ada rencana pengelolaan yang terbentuk jadi memiliki goal untuk 10 tahun lagi kawasan akan seperti apa, apa yang ingin dicapai dan step-step nya akan lebih jelas

Metta Miftahul J : Apa harapan Ibu untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke untuk masa mendatang ?

Ibu Ida Harwati : Harapan saya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan Kawasan Konservasi lainnya adalah supaya kawasan ini berkembang kepada arah yang lebih baik , pemerintah pusat juga selalu mensupport kegiatan yang ada di kawasan serta masyarakat bisa lebih peduli terhadap keadaan kawasan beserta isinya.

**Kepala Seksi Konservasi Wilayah III
Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta**



Ida Harwati, S.Hut., M.Eng

NIP.197706082003122005

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Rizki Prima, S.Hut

Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pertama Koordinator Penyuluh Kehutanan

Umur : 31 Tahun

Metta Miftahul J : Apa Tujuan dari rencana pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Arah pengelolaan suaka margasatwa muara angke itu adalah menjadikan suaka margasatwa muara angke menjadi pusat pendidikan konservasi terutama mangrove dan lahan basah di Jakarta, kawasan dapat menjadi media edukasi mengenai konservasi bagi kepentingan penelitian serta pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Jakarta. Selain itu kawasan ini bisa digunakan untuk wisata alam terbatas sehingga tidak menghilangkan fungsi dan status kawasannya, dan juga memperbaiki kawasan suaka margasatwa sendiri dari ancaman sampah dan banjir.

Metta Miftahul J : Apa saja bentuk program dan kegiatan untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Dalam pedoman rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke untuk jangka waktu 10 tahun kedepan itu sebelumnya ada penetapan blok kawasan, baru setelah itu dibuat rencana pengelolaan dengan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misinya. Adapun program yang menjadi prioritasnya terdiri dari program paket pendidikan lingkungan, selain itu yang termuat dalam RPJP

ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana, pengawetan keanekaragaman hayati, pemanfaatan wisata alam terbatas, pengembangan koordinasi pengelolaan sampai dengan pengolahan data base potensi kawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana penerapan prosedur kegiatan dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Setiap kegiatan yang berhubungan dengan kawasan konservasi sudah ada standarnya masing-masing yang diberi nama Norma Standar Pelaksanaan Kegiatan atau NSPK dan itu dibagi-bagi secara spesifik tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.

Metta Miftahul J : Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Kalau pengelolaan kawasan suaka margasatwa muara angke ya sudah pasti pihak Balai KSDA DKI Jakarta, kalau eksternalnya ada masyarakat, dari kelurahan ada Pak Lurah yang mengkoordinir untuk melaksanakan tugas kebersihan setiap minggu di suaka margasatwa muara angke, yang kedua ada dari LSM IAR yang melaksanakan program mitigasi konflik satwa, selain itu dari pihak swasta juga ada yakni perusahaan untuk penguatan fungsi suaka margasatwa muara angke, ia banyak membantu dalam alat alat kebersihan, untuk masyarakat sekitar kalau kita mengadakan kegiatan kita selalu mengundang masyarakat untuk hadir, terus masyarakat yang lain diluar suaka margasatwa muara angke juga ada seperti komunitas-komunitas biasanya, ada komunitas Transformasi Hijau Indonesia mereka sering mengadakan kegiatan di suaka margasatwa muara angke ada juga Forum Komunikasi Kader

Konservasi kegiatannya adalah pengamatan burung dan bersih sampah.

Metta Miftahul J : Apa potensi dominan yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Potensi dominan yang ada di suaka margasatwa muara angke kesatu lokasinya strategis mudah untuk diakses secara fisik, kalau secara ekologi bisa dibilang sangat potensial untuk studi riset karena tinggal itu saja yang statusnya kawasan konservasi di Jakarta, selanjutnya masih banyak jenis satwa yang ada di kawasan terutama burung dan monyet, suasana di kawasan juga viewnya seperti tidak berada di Jakarta.

Metta Miftahul J : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Faktor pendukung dari kebijakan pemerintah daerah sekarang sudah mendukung dan mengarah ke lingkungan. Faktor penghambat yang pasti ada di pembatasan penganggaran sehingga dengan minimnya anggaran akan menghambat juga jalannya kegiatan yang akan dilakukan nantinya, faktor lingkungan seperti sampah-sampah yang ada dikawasan, dana, sumber daya manusia di lapangan sangat minim secara kualitas maupun kuantitas.

Metta Miftahul J : Bagaimana hubungan kerja pada setiap Seksi Wilayah Konservasi ?

Bapak Rizki : Hubungan kerja dapat dilihat dari struktur organisasi, masing-masing seksi itu berjalan sendiri, anggaran dari balai kepala balai yang mengatur anggaran dan perencanaan, untuk pelaksanaan seksi konservasi tergantung daerahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika seksi wilayah III

kekurangan sumber daya itu bisa menarik lagi dari seksi yang lain seperti jabatan fungsional yang gak terbatas sama wilayah karena sistemnya keahlian. Fungsional khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan ada tiga yang dibina yakni Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan.

Metta Miftahul J : Bagaimana struktur organisasi yang ada pada BKSDA DKI Jakarta ?

Bapak Rizki : Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dibagi dalam tiga seksi pengelolaan, seksi konservasi wilayah namanya nah suaka margasatwa muara angke terdapat dalam lingkup seksi konservasi wilayah III termasuk cagar alam pulau bokor, suaka margasatwa pulau rambut dan taman wisata angke kapuk, kebetulan seksi wilayah III sebagian jatah dalam pengelolaan kawasan-kawasan tersebut.

Metta Miftahul J : Bagaimana jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : BKSDA DKI Jakarta kekurangan sumber daya manusia di lapangan baik secara kualitas dan kuantitas ya, perhitungannya untuk wilayah DKI Jakarta itu kurang lebih hanya 130 orang dan harus dibagi-bagi untuk satu wilayah DKI Jakarta, sementara kebijakan dari Menpan sendiri adanya moratorium PNS, jadi di BKSDA DKI Jakarta masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi kepada pegawai yang ada.

Metta Miftahul J : Apa saja pengusaha seksi wilayah III BKSDA DKI Jakarta dalam mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa Muara angke ?

- Bapak Rizki** : Kalau bahasa saya bilangnya sih sosialisasi, cara mengenalkan kawasan suaka margasatwa muara angke kepada masyarakat dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk memberitahu kalau masih ada kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta dan bagaimana kita menjaga kawasan tersebut, kalau untuk brosur dan stiker itu biasanya digunakan pada saat pameran, liputan berita dll.
- Metta Miftahul J** : Seperti apa pengarahan yang diberikan kepada petugas dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Rizki** : Bentuk pengarahannya biasanya memang melalui rapat kerja, dalam rapat tersebut kami berkomunikasi mengenai hal yang berkaitan dengan tugas kami di masing-masing jabatan yang dimiliki. Seperti saya selaku penyuluh kehutanan itu jabatannya fungsional khusus, atasan langsung saya adalah Kepala Seksi yang nantinya saya diberi semacam kontrak kerja yang disepakati bersama dan target yang harus saya capai dalam satu tahun, melalui standar kinerja pegawai atau SKP dan nantinya akan dievaluasi.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Rizki** : Kalo untuk fasilitas pengunjung sebenarnya kan SM. Muara Angke bukan tempat wisata dan kita tidak mengarah kesitu. Karena kalau aturannya kan harus pakai SIMAKSI berapa orang yang ke kawasan apa tujuannya dan tujuannya harus jelas, tetapi kalau ditanya fasilitas untuk wisata dengan statusnya sebagai kawasan konservasi saya rasa cukup.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Kegiatan pengawasan di kami itu ada yang namanya patroli, patroli dilakukan setiap hari oleh polisi kehutanan yang laporannya ditulis setiap hari dan diserahkan ke kantor, ada juga operasi, operasi itu biasanya kalau ada kasus di suaka margasatwa kita kerjanya gabungan. Nah kalau perbedaan antara patroli dan operasi, kalau patroli itu tanpa target operasi seperti jalan menyusuri kawasan mengambil data, kalau operasi itu dari setiap laporan patroli ditemukan beberapa kendala atau masalah maka operasi itu berupa tindakannya.

Metta Miftahul J : Bagaimana pelaporan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Rizki : Adanya laporan setiap hari yang dibuat oleh Polisi Kehutanan karena Fungsional Khusus itu sistem evaluasinya melalui SKP atau standar kinerja pegawai, jadi laporannya itu setiap hari melakukan apa saja dibuat secara tertulis dan setiap bulan mereka melaporkan, tercapai atau tidak kinerja yang diharapkan.

Metta Miftahul J : Bagaimana proses evaluasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan ?

Bapak Rizki : Setiap mau menjalankan kegiatan kita pasti rapat dan setiap akhir tahun kita selalu melakukan evaluasi dan monitoring, Kepala Balai juga selalu melakukan supervisi melalui Kepala Seksi atau beliau sendiri datang ke lapangan, setiap habis melakukan kegiatan kita selalu melaporkan ke Kepala Balai walaupun terkadang kita maunya rapat tetapi Kepala Balai waktunya tidak ada, jadi kita laporkan secara tertulis nanti beliau membaca dan nantinya di akhir tahun di evaluasi apa saja

yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan nantinya tahun depan apa yang direncanakan seperti itu.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke untuk masa mendatang ?

Bapak Rizki : Harapan saya semakin kesini semakin baik, untuk masyarakat semakin sadar kalau itu kawasan Suaka Margasatwa jadi mengerti etika memasuki kawasan harus ada SIMAKSI, tidak membuang sampah sembarangan dan semoga kawasan SM. Muara Angke dapat menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan yang paling penting untuk mengenalkan kawasan tidak hanya memberi tahu tetapi mengajak serta masyarakat agar mereka dapat merasakan sendiri bagaimana suasana di kawasan tersebut.

**Penyuluh Kehutanan Pertama Koordinator Penyuluh Kehutanan
Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta**



Rizki Prima, S.Hut.,

NIP. 198503112009121001

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Benediktus Sarpumpwain

Jabatan : Pengolah Bahan dan Pelayanan Kawasan

Umur : 40 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana prosedur mengurus simaksi di BKSDA DKI Jakarta ?

Bapak Bene : SIMAKSI dibuat secara manual kalau yang sistem onlinenya memang sedang ada gangguan jadi sekarang kebanyakan orang datang mengajukan proposal lalu simaksi dibuat nunggu dua sampai tiga hari untuk tanda tangan persetujuannya oleh kepala Balai, paling lama seminggu pembuatannya.

Metta Miftahul J : Bagaimana jika ada pengunjung yang tidak memakai simaksi masuk ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Bene : Kan ada petugas kita polisi kehutanan yang standby dikawasan, kalau mereka belum tahu aturannya biasanya dianjurkan datang ke kantor langsung karena memang tidak bisa masuk kalau tidak ada simaksinya.

Metta Miftahul J : Bagaimana kegiatan pemantauan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dari BKSDA DKI Jakarta ?

Bapak Bene : Kalau yang rutin dan wajib itu petugas Polisi Kehutanan dan Penyuluh Ekosistem Hutan. Kalau untuk pengelolaan kawasan lebih ke seksi wilayah III kalau di BKSDA nya hanya membantu terkait perizinannya.

Metta Miftahul J : Bagaimana kerjasama BKSDA DKI Jakarta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat ?

- Bapak Bene** : Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat jarang paling banyak itu dari mahasiswa atau pelajar. ada juga LSM IAR yang masih bekerjasama disini, tahun kemarin juga ada dari perusahaan yang mengadakan kegiatan penanaman di Suaka Margasatwa Muara Angke.
- Metta Miftahul J** : Apa potensi yang dominan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Bene** : Rata-rata yang kekawasan itu biasanya untuk penelitian kalau yang komersil kayanya gak ada , saat ini memang untuk pendidikan konservasi saja, anak-anak sekolah biasanya datang untuk observasi terkait tugas sekolah mereka. potensi lebih ada di mangrovenya untuk mencegah abrasi dari pantai utara Jakarta.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana laporan pengunjung yang datang ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Bene** : Kita buat per bulan rekapannya terus nanti dilaporkan ke Pusat , nanti pemeriksaan per tahunnya di kantor Pusat dan rata-rata laporan pengunjung yang datang mulainya dari pertengahan bulan.

**Pengolah Bahan dan Pelayanan Kawasan
BKSDA DKI Jakarta**



Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Resijati Wasito

**Jabatan : Polhut Penyelia Kawasan SM. Muara Angke dan TWA Angke
Kapuk**

Umur : 57 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana kegiatan pemantauan / patroli kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Patroli kawasan saya lakukan tidak mengenal waktu bisa siang bisa malam, kalau jam operasionalnya dari senin sampai jumat, kadang saya masih nemuin orang-orang yang mancing atau mengambil ikan secara liar di malam hari di kawasan SM. Muara Angke makanya malam hari saya juga patroli untuk menghindari adanya kejahatan-kejahatan lainnya.

Metta Miftahul J : Berapa kali kegiatan pengawasan dalam satu bulan ?

Bapak Jati : Saya patroli itu minimal lima kali bahkan sabtu minggu walaupun tidak ada kaitan kerja alias libur, saya tetap patroli karena pada hari-hari libur itu banyak orang yang suka masuk ke kawasan tanpa izin, nah kalau patroli itu kewajiban kita sehari-hari kalau kawasannya ingin bagus dan tidak dijamah orang maka harus patroli, kalau operasi itu dilakukan secara mendadak sesuai laporan jika ada pelanggar yang masuk kedalam kawasan SM. Muara Angke tanpa izin maka kegiatan itu akan kita sapu dan langsung kita tangkap.

Metta Miftahul J : Siapa saja pihak pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan di Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Disekitar lingkungan ada satpam-satpam perumahan, pemulung sekitar yang biasanya saya dapat informasi-informasi dari mereka jika ada yang melanggar di kawasan jadi saya berkoordinasi dengan lingkungan setempat yang ada disini.

Metta Miftahul J : Bagaimana pelaporan mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan ?

Bapak Jati : Laporan saya buat langsung kepada Kepala Seksi, setiap bulan kita buat laporan untuk kejadian apa-apanya kita tulis, yang masuk ke kawasan SM. Muara Angke berapa orang nanti kita laporkan ke kantor, laporannya bulanan dibuat secara tertulis kita fotoin juga ada foto-fotonya kalau untuk laporan mengenai pelanggar yang masuk kawasan tanpa izin itu biasanya kita diberitahu oleh keamanan setempat jadi kita bekerjasama untuk menindak orang-orang yang melanggar.

Metta Miftahul J : Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Kalau kendala sebenarnya banyak misalnya gak ada temennya kalau mau patroli malem soalnya udah pada jatahnya tidur, terus anggota kami sedikit jadi masih kurang banyak, ini satu kawasan ini minimal enam orang termasuk petugas kebersihan, kadang saya pagi-pagi juga membersihkan kawasan padahal bukan tugasnya Polhut sebenarnya, jadi kalau petugasnya banyak saya bisa melakukan shift tiga kali bisa pagi, siang dan malam , makanya sepintar-pintarnya kami membagi petugas di lapangan dan waktu untuk patroli dan semacamnya.

Metta Miftahul J : Adakah pendampingan setiap masyarakat yang berkunjung ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Harusnya didampingin soalnya kan kawasan ini sebenarnya tidak aman dan kenapa orang gak boleh sembarangan masuk kawasan karena didalam kawasan ini banyak hewan buas seperti ular, biawak dan lainnya makanya keselamatan juga penting untuk saya jaga jangan sampai ada korban yang kenapa-kenapa di kawasan SM. Muara Angke.

Metta Miftahul J : Bagaimana menghadapi bentuk laporan yang berisi kritik dari pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Saya justru lebih suka dikritik pengunjung karena untuk kemajuan di kawasan ini apa yang bagus untuk kawasan ini seperti apa modelnya, kalau ada yang kritik masalah sampah saya jelaskan sebenarnya kawasan ini bukan tempat sampah memang karena pada saat banjir jadi sampah dari sungai masuklah kekawasan, dan tugas saya adalah membersihkan sampah-sampah tersebut dan ekspose ke televisi untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya akan membahayakan kawasan ini juga seperti itu.

Metta Miftahul J : Bagaimana perawatan kelengkapan sarana prasarana di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Sarpras disini sebetulnya dilengkapi cuma kadang kadang begini ya kita sudah mengajukan tapi dananya dari sana gak ada, kalau saya minta bantuan ke perumahan saya koordinasi dalam pembuatan papan-papan dipinggir jalan tentang kawasan SM. Muara Angke, terus untuk penanaman dikawasan saya ngumpulin LSM atau anak-anak sekolah yang mau menanam kita sediakan lokasinya dan pembayarannya tetap dilakukan

dikantor jadi tugas saya seperti menyalurkan dan membina untuk kepentingan kawasan dan lingkungan.

Metta Miftahul J : Apakah penyuluhan sering di lakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan bagaimana partisipasi masyarakat sekitar kawasan ?

Bapak Jati : Penyuluhan untuk bersih sampah biasanya koordinasi sama kelurahan kalau untuk masyarakat sekitar kawasan agak susah soalnya kan samping-samping kawasan ini perumahan elite dan susah ketemu sama yang punya rumah paling ada ART nya aja, malah yang bisa diajak ngumpul ya nelayan sekitar kawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar aturan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati : Kalau bicara pelanggaran tahun ini jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya, kalau dulu banyak orang yang mancing dari ujung ke ujung kawasan seperti teguran sekali dua kali dan kalau sudah tiga kali itu kita tangkap dan di proses, sekarang Alhamdulillah saya koordinasi dengan pihak pengembang perumahan untuk membuat pagar akhirnya diikuti itu karena saya berhubungan baik dengan orangnya. Terkadang apa yang saya butuhkan untuk kawasan belum terpenuhi oleh penyedia dananya.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda terhadap kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Jati

: Jadi target kita karena ini kawasan konservasi adalah menjaga agar kelestariannya tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya bagaimana satwa yang ada di dalam merasa nyaman dan untuk kawasan wisata disini terbatas dan yang diutamakan adalah segi edukasinya.

**Polhut Penyelia Kawasan
SM. Muara Angke dan TWA Angke Kapuk**



Resjati Wasito

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Aripin

**Jabatan : Juru Mudi Kapal di Kawasan SM. Muara Angke dan TWA
Angke Kapuk**

Umur : 38 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana kegiatan pemantauan / patroli kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Aripin : untuk pengamanan kawasan sendiri ada patroli kawasan, patroli ada dua jalur bisa melalui jalur darat yaitu jalan di sepanjang boardwalk terus kalau jalur air naik speedboat, seperti itu patroli harian yang saya lakukan di kawasan ini.

Metta Miftahul J : Berapa kali kegiatan pengawasan dilakukan dalam satu bulan

Bapak Aripin : Setiap hari kerja dari hari senin sampai jumat jamnya dari jam 08.00 sampai jam 16.00 tugasnya yaitu patroli, penyuluhan, koordinasi dan juga pelaporan kegiatan pengawasan.

Metta Miftahul J : Siapa saja pihak pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan di Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Aripin : Polisi kehutanan kawasan, kadang orang kantor juga datang untuk mengevaluasi keadaan kawasan, kelurahan juga ikut dalam bersih sampah disini.

Metta Miftahul J : Bagaimana pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan ?

Bapak Aripin : Saya buat laporan penjagaan sehari-hari dan ada juga laporan kasus dibuatnya secara tertulis yang nanti akan dilaporkan ke balai.

- Metta Miftahul J** : Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Aripin** : Kalau kendala dari laut atau darat belum ada , tetapi kalau ada pemburuan liar dikawasan ya ditindak langsung supaya satwanya tidak diburu terus dan dijual.
- Metta Miftahul J** : Adakah pendampingan setiap masyarakat yang berkunjung ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Aripin** : Kalau ada simaksi dan tujuan jelas maka didampingi oleh petugas keamanan. Kalau gak punya simaksi ya gak boleh masuk cuma boleh sampai batas pagar ke boardwalk.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana menghadapi bentuk laporan yang berisi kritik dari pengunjung kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Aripin** : Kalau kritik kayanya belum ada soalnya rata-rata yang kesini itu punya tujuan yaitu meneliti kawasan atau ngambil data dikawasan.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana perawatan kelengkapan sarana prasarana di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Bapak Aripin** : Perawatan kaya biasa kalau alat” kebersihan sama kapal dicuci terus pinggiran boardwalk dibersihkan kalau banyak sampah daun kering ada petugas yang bersih-bersih juga kok disini.
- Metta Miftahul J** : Apakah penyuluhan sering di lakukan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan bagaimana partisipasi masyarakat sekitar kawasan ?
- Bapak Aripin** : Ada penyuluhan ke masyarakat sama kelurahan setempat atau ke pengunjung seperti sekolah-sekolah yang mau datang sebelum masuk kan didepan diberitahu terlebih dahulu tentang sejarah dan fungsi kawasan, partisipasi ya kalau mereka mau mengadakan kegiatan dikawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar aturan di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Aripin : Sanksi ada , diberikannya itu mulai dari menegur sekali dua kali, kalau tidak mendengarkan maka barangnya langsung disita tergantung kegiatannya apa entah dia mancing entah bawa jebakan burung terus langsung dibawa kekantor.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda terhadap kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Aripin : Harapan saya buat kawasan ini supaya fasilitas makin baik, isi kawasan beragam terus banyak juga pengunjung agar kawasan ini juga dikenal banyak orang.

**Juru Mudi Kapal Kawasan
SM. Muara Angke dan TWA Angke Kapuk**



Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Merryana Elmita

Jabatan : Anggota LSM IAR

Umur : 25 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana hubungan kerjasama BKSDA DKI Jakarta dengan LSM dalam mengelola kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Merryana : Hubungan kerjasama BKSDA DKI Jakarta dengan IAR yakni kami diberi tugas untuk mitigasi monyet ekor panjang, jadi kawasan konservasi ini bersebelahan dengan permukiman penduduk, karena di kawasan ini terdapat monyet ekor panjang jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan monyet ekor panjang ini keluar dari kawasan masuk ke permukiman penduduk. Ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat sekitar dan pemerintah karena monyet ekor panjang bisa mengganggu masyarakat sekitar, bisa mengambil sampah-sampah makanan di sekitar perumahan masyarakat, atau bisa menyakiti masyarakat sendiri. Jadi tugas kami disini membantu penanganan konflik monyet ekor panjang dengan manusia atau masyarakat sekitar kawasan.

Metta Miftahul J : Apa saja usaha yang dilakukan BKSDA DKI Jakarta dalam menjaga kelestarian kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Merryana** : Kalo untuk usaha menjaga kelestarian sendiri disini peran IAR itu tadi mengatasi konflik antara monyet ekor panjang dengan masyarakat sekitar. Permasalah dari monyet ekor panjang itu sendiri pasti akan mengganggu kesejahteraan bagi monyet itu sendiri sebagai salah satu satwa di kawasan konservasi.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana bentuk kerja BKSDA DKI Jakarta dengan LSM untuk menjaga kelestarian kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Merryana** : Kalo bentuk kerja yang dilakukan disini IAR secara teknis bekerja sendiri, kegiatan yang dilakukan meliputi pengambilan data, hasil, dan laporan kegiatan yang berlangsung di Kawasan SM. Muara Angke, kalau BKSDA bertindak hanya sebatas perizinan untuk mengadakan kegiatan di kawasan.
- Metta Miftahul J** : Apa peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Merryana** : Kalo peran serta masyarakat sendiri di dalam kegiatan yang kita jalankan sebenarnya tidak ada peran masyarakat dalam kegiatan kita, lebih ke output kegiatan yang kita hasilkan seperti dalam mitigasi konflik monyet ekor panjang tersebut artinya ada pihak-pihak tertentu yang bersinggungan dengan masalah tersebut termasuk dari masyarakatnya sendiri, jadi karena masyarakat itu sendiri yang terkena dampak tersebut maka dari itu mereka kami ikut sertakan dalam penanganan contohnya seperti edukasi, pemasangan papan peringatan untuk tidak memberi makan monyet ekor panjang, selain itu kita juga menanyakan kepada masyarakat tentang persepsi monyet ekor panjang itu sendiri apakah sebagai hama, hewan peliharaan, atau satwa pengganggu. Jadi kita melibatkan

masyarakat hanya sebatas sasaran dari penanganan dari konflik monyet ekor panjang.

Metta Miftahul J : Media komunikasi apa yang digunakan BKSDA DKI Jakarta dan LSM untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Merryana : Kebetulan sekali kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke di sekelilingnya merupakan perumahan elite dan cukup sulit untuk memberi informasi kepada masyarakat sendiri untuk diajak berdiskusi. Karena dari beberapa masyarakat sendiri ada yang menyatakan bahwa monyet tersebut bukan menjadi masalah untuk mereka dan akhirnya mereka tidak memperdulikan keadaan tersebut.

Tapi dalam beberapa tahun ini kami mendapatkan kesempatan dari masyarakat untuk membuka diri dalam penanganan konflik monyet ekor panjang sendiri.

Metta Miftahul J : Bagaimana perawatan fasilitas sarana dan prasarana di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Merryana : Fasilitas yang ada di kawasan Suaka Margasatwa sendiri setiap tahunnya pasti ada perbaikan tergantung dana yang disediakan oleh pusatnya. Yang paling utamanya ada pada boardwalk / jembatan karena untuk pengunjung dapat melihat dan menyusuri kawasan selain itu ada pos jaga untuk petugas melakukan penjagaan kawasan tetapi masih kurang nyaman kalau dilihat tetapi mungkin kalau sudah terbiasa ya gak jadi masalah besar.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan satwa di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Merryana

: Kalo untuk keberadaan satwa sendiri saya tidak berani mengatakan bahwa kawasan tersebut sudah sesuai dengan fungsi sebagai kawasan konservasi, karena saya sendiri tidak mengambil data tentang hal tersebut. Namun menurut persepsi saya sendiri di kawasan tersebut perlu ada pengkajian kembali, karena ketika berbicara fungsi kita harus lihat dari segi keanekaragamannya apakah satwa disana masih menggunakan kawasan SMMA sebagai habitat atau apakah masih berfungsi selayaknya kawasan konservasi.

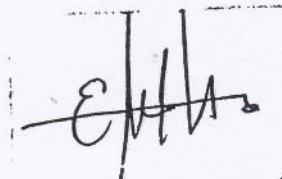
Metta Miftahul J

: Bagaimana harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Merryana

: Saya berharap lanjut atau tidaknya kerjasama dengan LSM , kawasan itu tetap terjaga keberadaannya dan peningkatan perawatan terhadap isi yang ada di dalam kawasan serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan yang sudah ada sejak lama.

Anggota LSM IAR



Merryana Elmita

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Watri

Jabatan : Peneliti di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 26 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Tanggapan Anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Watri : Sumber daya alam yang terdapat disana berada pada kondisi yang cukup baik, namun fasilitas pendukung bagi pengunjung masih kurang.

Metta Miftahul J : Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Watri : Kawasan ini menjadi salah satu dari sedikitnya mangrove di DKI Jakarta dengan tekanan yang terus menerus dari wilayah laut dan juga wilayah darat.

Metta Miftahul J : Seperti apa keadaan satwa dan tumbuhan yang anda lihat di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Watri : Menurut saya keduanya masih masuk ke dalam kondisi yang baik.

Metta Miftahul J : Bagaimana kenyamanan anda melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Watri : Saya merasa cukup nyaman selama penelitian di SM. Muara Angke.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Watri** : Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai kawasan yang bersebelahan dengan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke belum sepenuhnya mendukung keberadaannya. Rumah-rumah nelayan yang berada di sepanjang aliran Sungai Angke memberikan pengaruh dengan adanya akses penghuninya untuk memanfaatkan kawasan tanpa izin pengelola.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Watri** : Menurut saya jembatan pengamatan masih sangat kurang. Akses hanya setengah dari keseluruhan jembatan dan tidak adanya pengaman di kanan dan kiri jembatan. Karena hal tersebut menjadikan kawasan ini tidak aman untuk dikunjungi oleh anak-anak bahkan orang dewasa.
- Metta Miftahul J** : Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Watri** : Sangat tertarik.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana proses pembuatan SIMAKSI yang anda lakukan ?
- Watri** : Untuk pembuatan SIMAKSI sendiri, saya bawa surat izin penelitian, dan melampirkan proposal penelitian lengkap dengan estimasi waktu penelitian plus fotokopi KTP, satu sampai tiga hari SIMAKSI-nya bisa selesai dan langsung mulai penelitian di lokasi yang kita tuju.
- Metta Miftahul J** : Seperti apa bentuk partisipasi anda selama melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Watri** : Bentuk partisipasi yang saya lakukan yakni ikut membantu menjaga kebersihan kawasan dan kebetulan saya didaulat untuk menjadi duta konservasi kawasan mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Watri : Adanya pengelolaan mandiri dengan tetap mempertahankan status kawasan sebagai Suaka Margasatwa. Melalui pengelolaan mandiri masalah pendanaan untuk perbaikan sarana dan prasarana serta penjagaan kawasan akan menjadi lebih baik lagi.

**Peneliti di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**

Watri

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Novi

Jabatan : Peneliti di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 21 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Tanggapan Anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Novi : Kalau menurut saya kawasannya masih bagus terlihat suasana alamnya dan sarana prasarana yang ada di SM. Muara Angke sudah baik cuma belum merata saja.

Metta Miftahul J : Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Novi : Tujuan saya kesini adalah untuk penelitian tentang perilaku monyet ekor panjang terhadap kawasan sekitarnya, tentang habitat, makanannya, kualitas air sungainya sehingga berpengaruh pada perilaku si monyet tersebut.

Metta Miftahul J : Apa saja yang ada didalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang anda ketahui ?

Novi : Didalam kawasan ada berbagai macam satwa dan tumbuhan, satwa paling banyak yakni monyet ekor panjang.

Metta Miftahul J : Seperti apa keadaan satwa dan tumbuhan yang anda lihat di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Novi : Satwanya baik kalau monyet disini selain jumlahnya banyak badannya juga besar-besar kalau buat tumbuhan bakaunya masih ada tapi ada juga tumbuhan liarnya yang masuk ke kawasan.

- Metta Miftahul J** : Bagaimana kenyamanan anda melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Novi** : Nyaman sih, saya neliti disini kurang lebih 3 bulan dan hampir 2 bulan saya disini gak ngalamin kejadian yang merugikan saya, saya bisa keliling kawasan tanpa didampingi lagi karena satwanya juga udah kaya kenal sama saya.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Novi** : Sekitar kawasan ada perumahan PIK ada rumah nelayan ada ruko-ruko dan di jalan raya sudah banyak kendaraan yang melintas kemungkinan buat melihat papan nama kawasan sepertinya kelihatan.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Novi** : Sarana prasarana disini ada yang terlihat baik ada juga yang gak, kelihatan dari bangunan yang udah lama, jembatan untuk pejalan kaki sudah lumayan, hanya saja papan informasi mengenai kawasan dan isinya masih kurang.
- Metta Miftahul J** : Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Novi** : Karena saya penelitian disini saya merasa tertarik untuk datang lagi untuk melihat perkembangan monyet ekor panjang dikawasan ini nantinya kayak apa dan gimana.
- Metta Miftahul J** : Seperti apa bentuk partisipasi anda sebagai pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Novi** : saya sebagai peneliti di kawasan ini memiliki tugas seperti saya mengamati soal perilaku satwa yang saya teliti disini, keadaan sekitarnya seperti apa dan kalau laporan saya sudah selesai mungkin bisa berguna juga buat data di balai, selama

saya neliti disini saya bantu-bantu petugas dalam kebersihan disini.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Novi : Harapan saya untuk kawasan ini agar tetap lestari dengan apapun yang ada didalam SM. Muara Angke dan sarana prasarana juga dibenahi lagi agar terlihat lebih bagus lagi dan membuat peneliti lainnya nyaman berada disini.

**Peneliti di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**



Novi

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Dina

Keterangan : Pengunjung di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 17 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Tanggapan Anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Dina : Kalo untuk suaka margasatwa di daerah DKI Jakarta kondisinya bisa dikatakan banyak mengalami perubahan dari kondisi alaminya, dan mengalami pencemaran lingkungan di sekitar kawasan suaka margasatwanya.

Metta Miftahul J : Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Dina : Dalam rangka observasi, ada tugas sekolah tentang geografi dan sosiologi yaitu mengamati kehidupan sosial disekitar kawasan SM. Muara Angke.

Metta Miftahul J : Apa saja yang ada didalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang anda ketahui ?

Dina : Banyak satwa-satwa endemik, serta satwa-satwa burung di kawasan Suaka Margasatwa juga masih banyak berterbangan di sekitar kawasan, selain itu ada juga keberadaan ular dan monyet juga masih berkeliaran di sekitar kawasan.

Metta Miftahul J : Bagaimana kenyamanan anda melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Dina** : Agak kurang nyaman, karena kondisi disini yang saya bayangkan masih suasana alam tapi kenyataannya banyak sekali perubahan dari fungsi asli suaka margasatwa yang seharusnya.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Dina** : Keadaan sekitar banyak permukiman-permukiman kumuh nelayan yang letaknya disebrang sungai padahal ini merupakan kawasan konservasi seharusnya harus bersih dari hal-hal itu takut mengganggu satwa-satwa yang ada di kawasan Suaka Margasatwa ini.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Dina** : Sejauh ini saya lihat ada dua kapal yang digunakan untuk keliling kawasan bagi pengunjung, jika kondisi pengunjung yang datang untuk observasi banyak tentu tidak akan bisa menampung pengunjung yang datang. Selain itu keberadaan tempat sampah yang tersedia masih jarang.
- Metta Miftahul J** : Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Dina** : Sampai saat ini saya belum tertarik untuk berkunjung kembali.
- Metta Miftahul J** : Seperti apa bentuk partisipasi anda sebagai pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Dina** : Kalo saya datang kesini lebih untuk penelitian tentang warga sekitar kawasan Suaka Margasatwa jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari keberadaan kawasan Suaka Margasatwa disini karena daerah DKI Jakarta harus lebih banyak kawasan konservasi seperti ini.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Dina : Harapan saya semoga kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ini dapat terus ada sampai generasi ke generasi berikutnya dan dirawat agar tumbuhan atau satwanya bisa terus hidup tanpa tercemar.

**Pengunjung/Pelajar di Kawasan
Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**



Dina

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Rosyid

Keterangan : Pengunjung di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 17 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Tanggapan Anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Rosyid : Kalau dibilang bagus aslinya bagus ya ka, cuma kalau dari depan itu saya ngerasa tempat ini kayak terpencil gitu dan kurang terlihat aja gitu, padahal kita lihat banyak gedung megah tapi gak terpikir gitu ada Suaka Margasatwa dan disini saya lihat sampah disekitarnya masih banyak juga jadi kelihatan lingkungannya kurang terjaga.

Metta Miftahul J : Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Rosyid : saya datang berkunjung kesini untuk melakukan observasi tentang keadaan sosial nelayan yang ada di sekitar kawasan ini berhubungan sama tugas yang ada di sekolah.

Metta Miftahul J : Apa saja yang ada didalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang anda ketahui ?

Rosyid : Ada rumah-rumah nelayan, ada satwa nya juga kebanyakan monyet sih yang saya lihat terus tumbuhannya mangrove sama pohon pinus ka.

Metta Miftahul J : Bagaimana kenyamanan anda melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

- Rosyid** : Kalo disini agak kurang nyaman yah ka soalnya kecium bau gak sedap dari sampah-sampah yang ada disini terus dari airnya yang kotor.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Rosyid** : Sekitar kawasan dikelilingi sama perumahan elite/megah dan ada juga rumah-rumah nelayan di gigir sungai, jadi kawasan ini ditengah-tengah bisa dibilang buat nyeimbangin sekitarnya mungkin.
- Metta Miftahul J** : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Rosyid** : Sarananya sih kurang lengkap yah kalau menurut saya soalnya masih terbatas dan kecil, untuk pemandunya sih sudah bagus karena kita diajak keliling kawasan dan diberitahu informasi tentang kawasan ini.
- Metta Miftahul J** : Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Rosyid** : Tertarik , karena saya melihat dari kondisi sekitar sini ada kawasan ditengah-tengah perumahan megah dan rumah nelayan kayak ada kesenjangan sosial gitu.
- Metta Miftahul J** : Seperti apa bentuk partisipasi anda sebagai pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Rosyid** : Tugas dari sekolah saya itu bagaimana kita melihat gejala sosial di sekitar kawasan Suaka Margasatwa ini gimana kondisi lingkungan yang ada.
- Metta Miftahul J** : Apa harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?
- Rosyid** : Menurut saya sih bagaimana cara mengenalkan kawasan Suaka Margasatwa itu sendiri keluar karena menurut saya

kurang terlihat, selain itu untuk perawatan lingkungan diperbaiki dan sarana nya juga, kalau satwa harusnya lebih banyak lagi soalnya saya cuma melihat beberapa saja.

**Pengunjung/Pelajar di Kawasan
Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**



Rosyid

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Iman

Keterangan : Pengunjung di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 36 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Tanggapan Anda mengenai kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Bapak Iman : Kondisi saat ini saya melihat sebenarnya bagus masih ada tempat seperti ini, walaupun menurut saya masih kurang banyak keberadaan kawasan suaka margasatwa di daerah DKI Jakarta. Apalagi kawasan ini cukup baik karena adanya hutan-hutan bakau, apalagi Jakarta mempunyai masalah mengenai banjir dan hutan bakau ini mempunyai peran dalam sirkulasi air, dan menghalau air laut agar tidak terjadi abrasi dan apabila ada banjir bisa diatasi oleh hutan bakau.

Keberadaan kawasan ini juga bisa dilihat gap antara kawasan perumahan mewah dan keberadaan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Muara Angke.

Metta Miftahul J : Apa tujuan anda mengunjungi kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Sebenarnya tujuan kita kesini merupakan observasi, kami mengajak anak-anak untuk melakukan observasi yang hubungannya dengan sosial, seperti pengaruh sosial nya contohnya kita masuk ke dalam kawasan ini kita melihat perumahan mewah, dan juga ada perkampungan nelayan diseberang kawasan Suaka Margasatwa dan anak-anak

diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Dan tadi anak-anak dibawa dengan kapal melihat sekeliling kawasan konservasi dan sampai pada kawasan reklamasi pantai yang saat ini sedang hangat diperbincangkan sehingga anak-anak menjadi tahu mengenai dampak reklamasi bagi masyarakat sekitar. Selain aspek ekologisnya anak-anak dapat tahu aspek sosialnya dari kunjungan saat ini.

Metta Miftahul J : Apa saja yang ada didalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang anda ketahui ?

Bapak Iman : Beberapa hewan endemik yang berada di kawasan ini seperti biawak, ikan-ikan di sekitar sungai, dan beberapa jenis burung-burung, serta ada ular dan lain-lain. Cukup menarik memang karena kita hanya bisa melihat jenis satwa-satwa ini di tempat seperti ini yang jarang kita temui.

Metta Miftahul J : Bagaimana kenyamanan anda melakukan penelitian di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Menurut saya nyaman, kawasan ini juga baru direnovasi ya. Saya tahun lalu kesini masih ada beberapa kerusakan di jembatan dan saat ini sudah di renovasi sehingga kita bisa mengakses lebih jauh kawasan ini, di banding tahun-tahun lalu kondisi pepohonan saat ini juga lebih padat.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan sekitar kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Keadaan sekitar kawasan dapat kita lihat sebelum masuk kawasan dapat kita jumpai perumahan mewah dan ada juga keberadaan kampung nelayan. Didalam kawasan dapat kita temui satwa-satwa langka dan beberapa tanaman-tanaman dan pohon-pohon bakau yang sangat jarang kita temui di daerah DKI Jakarta seperti ini.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Sarana dan prasarana menurut saya sudah lumayan baik di banding tahun sebelumnya karena kelihatannya sudah ada beberapa perbaikan seperti jembatan-jembatan yang bisa dilalui oleh pengunjung yang ingin observasi ke kawasan ini. selain itu sarana lain masih bisa dikembangkan seharusnya seperti papan-papan informasi mengenai isi dari kawasan konservasi itu sendiri contohnya jenis-jenis satwa, tanaman, dan burung-burung.

Metta Miftahul J : Apakah anda tertarik untuk berkunjung kembali ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Saya tertarik untuk berkunjung kembali untuk waktu yang akan datang, mudah-mudahan kedepannya ada kemajuan dari kawasan ini bisa menjadi lebih baik agar kita bisa lebih mengenal lebih jauh tentang kawasan konservasi dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar dan masyarakat.

Metta Miftahul J : Seperti apa bentuk partisipasi anda sebagai pengunjung di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

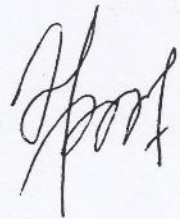
Bapak Iman : Sebenarnya tujuan kita kesini untuk observasi kalo untuk partisipasi lebih untuk menjaga keberadaan kawasan ini karena kawasan konservasi lebih dibatasi untuk berkunjung bagi masyarakat kecuali dalam rangka penelitian. Sehingga kawasan ini dapat berfungsi sebagai kawasan konservasi yang semestinya.

Metta Miftahul J : Apa harapan anda kedepannya untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Bapak Iman : Untuk keberadaan kawasan ini tetap dilestarikan. Tantangan nya untuk pengelola kawasan ini adalah sampah karena ini

merupakan daerah pesisir pada saat musim hujan sampah terbawa ke kawasan ini. Pemerintah harus lebih cekatan dalam mengatasi masalah sampah yang masuk kekawasan ini, karena sampah dapat mengganggu nafas dari hutan bakau yang ada disini. Pada dasarnya kawasan Suaka Margasatwa dapat diminimalisir pengaruh dari manusianya terutama yang deskriptif yang dapat merusak kawasan ini.

**Pengunjung/Guru di Kawasan
Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**



Bapak Iman

Member Check

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Ratna

Keterangan : Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke

Umur : 32 Tahun

Metta Miftahul J : Bagaimana Ibu melihat kondisi Suaka Margasatwa Muara Angke Saat Ini ?

Ibu Ratna : Kawasannya kelihatan seperti hutan saja, pohonnya lebat ada binatangnya juga kadang suka banyak monyet kalau mau sore, monyetnya pada turun nyari makan.

Metta Miftahul J : Apa saja yang ada didalam Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke yang Ibu ketahui ?

Ibu Ratna : Hewannya ada monyet, burung-burung, uler terus ikan juga , suami saya kalau nyari ikan ini ya disekitaran sungai angke terus sampe ke laut.

Metta Miftahul J : Bagaimana keadaan di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ratna : Saya tinggalnya diseberang kawasan kan ya , dipinggir sungai kadang sih hewannya suka pada kemari tapi karena udah kebiasa jadi saya gak ngerasa keganggu gitu.

Metta Miftahul J : Apakah ibu sering ikut penyuluhan yang diberikan oleh petugas di Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke ?

Ibu Ratna : Suka , suka ikut kadang suami aja yang kesana kadang saya juga , dikasih penyuluhannya soal kebersihan , kan sampah

banyak juga tuh di sungai jadi kalo lagi nyari ikan ya sambil bersihin juga mba.

Metta Miftahul J : Apa harapan Ibu untuk kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke kedepannya ?

Ibu Ratna : Harapan saya mudah-mudahan kawasannya ada terus , jadi bersih biar tumbuhannya banyak hewannya banyak , sampahnya berkurang biar ikan di sungainya pada hidup.

**Masyarakat di sekitar Kawasan
Suaka Margasatwa Muara Angke
Jakarta Utara**

Ibu Ratna

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Konsevasi Wilayah III BKSDA DKI Jakarta

Nama dan Uraian Tugas Seksi Konservasi Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam
DKI Jakarta

A. Jabatan Struktural

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengelolaan kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- b. Membagi tugas pelaksanaan pengelolaan kawasan (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Membimbing bawahan dalam penyelesaian pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Mengevaluasi hasil pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan,

pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

- e. Memantau, mencermati dan memeriksa pelaksanaan dan hasil pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- f. Mengoreksi surat dan draft dalam rangka pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- g. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- h. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan

pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

- i. Memberikan saran dan telaahan kepada pimpinan berupa usulan dan konsep pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- j. Membina bawahan lingkup Seksi Konservasi Wilayah termasuk Pejabat Fungsional.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

B. Jabatan Non Struktural

1) Penganalisis Data Pengawetan tumbuhan dan Satwa Liar

Uraian tugas:

- a. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengawetan tumbuhan dan satwa liar untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan.
- b. Mengumpulkan data dan informasi serta permasalahan pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja.

- c. Memilah permasalahan pengawetan tumbuhan dan satwa liar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian.
- d. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap diokumen pengawetan tumbuhan dan satwa liar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah dokumen pengawetan tumbuhan dan satwa liar tersebut sudah memenuhi persyaratan.
- e. Membuat konsep pemecahan masalah terkait pengawetan tumbuhan dan satwa liar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan.
- f. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan berkas atau dokumen pengawetan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakan pimpinan.
- g. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkn atasan baik secara tertulis maupun lisan.

2) Pengolah Bahan Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar

Uraian Tugas:

- a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah bahan dan daya pengawetan tumbuhan dan satwa liar.
- b. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data pengawetan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk.

- c. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis bahan dan data pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis bahan dan data pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang akan diperoleh.
- d. Mencatat perkembangan dan permasalahan bahan dan data pengawetan tumbuhan dan satwa liar secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahan.
- e. Mengolah dan menyajikan bahan dan data pengawetan tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut.
- f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

3) Pengolah Bahan Pengembangan dan Pemanfaatan SDAH dan E

Uraian Tugas:

- a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja.

- c. Menganalisa bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan diolah.
- d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan diolah.
- e. Mencatat perkembangan dan permasalahan bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahan.
- f. Mengolah dan menyajikan bahan dan data pemanfaatan dan pelayanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut.
- g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4) Penata Usaha Umum

Uraian Tugas :

- a. Menerima dan memeriksa surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempelajari penatausahaan surat dan kehumasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Menata penatausahaan surat dan kehumasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- d. Mengkonsultasikan kendala proses penatausahaan surat dan kehumasan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan penatausahaan surat dan kehumasan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan obyek kerja sebagai bahan perbaikan selanjutnya.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

5) Penata Administrasi Kepegawaian

Uraian Tugas :

- a. Menerima dan memeriksa administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut.
- b. Mempelajari dan memproses administrasi kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan.

- c. Menata administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- d. Mengkonsultasikan kendala proses administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan obyek kerja sebagai bahan perbaikan selanjutnya.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- g. Melaporkan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tertulis.

6) Penata Usaha Keuangan

Uraian tugas :

- a. Menerima dan memeriksa administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
- b. Mempelajari dan memproses administrasi keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Menata administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- d. Mengkonsultasikan kendala proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan.

- e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan administrasi keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan obyek kerja sebagai bahan perbaikan selanjutnya.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

7) Pengemudi / Jurumudi Kapal

Uraian tugas :

- a. Menyiapkan, memeriksa dan mengecek keadaan mesin, bahan bakar minyak pelumas, air accu, peralatan dan perlengkapan kapal agar dapat diketahui kondisi mesin dan kesiapan kapal untuk dipergunakan.
- b. Membersihkan kapal sebelum dan sesudah dipergunakan agar dapat dipelihara kebersihannya dengan baik.
- c. Menyampaikan tentang keadaan dan kondisi kapal kepada atasan untuk menerima perintah lebih lanjut.
- d. Mempersiapkan dan mengemudikan kapal sesuai kebutuhan dan keperluan.
- e. Menegemudikan kapal dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab sesuai perintah dan petunjuk dari atasan.
- f. Mengamankan, merawat dan memelihara kapal.
- g. Melaporkan apabila terjadi kerusakan mesin atau kehilangan peralatan atau perlengkapan kapal kepada atasan.
- h. Memperbaiki kapal terlebih dahulu apabila terjadi kerusakan sebelum dibawa ke bengkel.

- i. Menyimpan dengan baik peralatan dan perlengkapan perbengkelan agar terjamin keamanannya.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

C. Jabatan Fungsional

1) Pengendali Ekosistem Hutan

Uraian Tugas :

- a. Pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) , Kawasan pelestarian alam (KPA) dan Taman buru (TB)
- b. Pengelolaan keanekaragaman hayati
- c. Pemanfaatan keanekaragaman hayati
- d. Pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dan cinta alam
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang kehutanan
- g. Pengembangan teknologi tepat guna dibidang pengendalian ekosistem hutan
- h. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan
- i. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis dibidang pengendalian ekosistem hutan
- j. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain dibidang pengendalian ekosistem hutan.
- k. Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan
- l. Peran serta dalam seminar / lokakarya dibidang kehutanan

- m. Melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 86/Kpts-II/2004 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Polisi Kehutanan

Uraian Tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan hutan.
- b. Pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan imbingan masyarakat.
- c. Pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi.
- d. Pelaksanaan penyidikan
- e. Sebagai saksi / saksi ahli
- f. Pelaksanaan gelar perkara
- g. Penanggulangan gangguan satwa dan biota air
- h. Penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi
- i. Pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
- j. Pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan
- k. Pelaksanaan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa
- l. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kepolisian kehutanan
- m. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain dibidang kepolisian kehutanan

- n. Perumusan sistem kepolisian kehutanan
- o. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dibidang kepolisian kehutanan.
- p. Melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 41 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 347/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli

Uraian Tugas :

- a. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan
- b. Penyusunan Program Penyuluhan kehutanan
- c. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan
- e. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan
- f. Penerapan metode penyuluhan kehutanan
- g. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran
- h. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan
- i. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
- j. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan

- k. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen penyuluhan kehutanan
- l. Pengembangan aspek teknis. Metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan
- m. Membuat karya tulis /karya ilmiah dibidang penyuluhan kehutanan
- n. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang penyuluhan kehutanan
- o. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan
- p. Membuat buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dibidang penyuluhan kehutanan
- q. Mengajar/melatih dibidang penyuluhan kehutanan
- r. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang Penyuluhan kehutanan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil

Uraian Tugas :

- a. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan
- b. Penyusunan Program Penyuluhan kehutanan
- c. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan
- e. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan
- f. Penerapan metode penyuluhan kehutanan
- g. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran
- h. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan

- i. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
- j. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan
- k. Membuat karya tulis ilmiah dibidang penyuluhan kehutanan
- l. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang penyuluhan kehutanan
- m. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan
- n. Membuat buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dibidang penyuluhan kehutanan
- o. Mengajar/melatih dibidang penyuluhan kehutanan
- p. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang Penyuluhan kehutanan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Potensi Kawasan Konservasi Lahan Basah

Sub Seksi Konservasi Wilayah III

No	Nama dan Fungsi Kawasan	Surat Keputusan		Luas (Ha)			Potensi
		SK	Tanggal	Darat	Laut	Total	
1	SM. Pulau Rambut	SK.220/Kpts-II/2000	02/08/2000	45 Ha	45 Ha	90 Ha	- 55 Jenis Burung - Pengamatan Satwa - Pantai/Alam BawahLaut - Jungle Tracking
2	SM. Muara Angke	SK.220/Kpts-II/2000	02/08/2000	25,02 Ha		25,02 Ha	-Bird Watching -Boardwalk -Monyet ekor panjang
3	CA. Pulau Bokor	SK.220/Kpts-II/2000	02/08/2000	18 Ha		18 Ha	-Monyet ekor Panjang -Botani
4	TWA Angke Kapuk	SK.220/Kpts-II/2000	02/08/2000	99,82 Ha		99,82 Ha	-Wisata Mangrove

Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

Seksi Konservasi Wilayah III

No	Jenis Jabatan										Jumlah			Ket
	Struktural						Fungsional Umum		Fungsional					
	III A		IV A		IV B		L	P	L	P	L	P	Total	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total		
1	-	1	-	-	-	-	3	5	15	1	18	7	25	-

Sebaran PNS/CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Seksi Konservasi Wilayah III

No	Tingkat Pendidikan												Jumlah		
	S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	-	1	3	2	-	-	15	4	-	-	-	-	18	7	25

Prasarana SM. Muara Angke

Seksi Konservasi Wilayah III

No	Jenis Prasarana (Jumlah)							Keterangan
	Pos Jaga	Birdwatching	Papan Larangan	Papan Informasi	Menara Pengintai	Jembatan / Boardwalk	Speed boat	
1	1 Unit	3 Buah	2 Buah	6 Buah	1 Buah	850 m ²	1 Unit	SM. Muara Angke

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM

DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perlu membagi kawasan dalam zona atau blok wilayah kerja pengelolaan kawasan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. bahwa pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam saat ini belum mampu mengadopsi kebutuhan di masyarakat yang menyangkut perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam belum sepenuhnya mampu memfasilitasi perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
4. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

5. Ekosistem . . .

5. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.
6. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
7. Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
8. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
9. Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
10. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
11. Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
12. Pengawetan (preservasi) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
13. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
14. Pemanfaatan . . .

14. Pemanfaatan kondisi lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA.
15. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
16. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
17. Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
19. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
20. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan KSA dan KPA.
21. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 2

Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. penetapan . . .

- a. penetapan KSA dan KPA;
- b. penyelenggaraan KSA dan KPA;
- c. kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA;
- d. daerah penyangga;
- e. pendanaan; dan
- f. pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KSA DAN KPA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) KSA terdiri atas:
 - a. cagar alam; dan
 - b. suaka margasatwa.
- (2) KPA terdiri atas:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya; dan
 - c. taman wisata alam.

Pasal 5

- (1) KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Suatu wilayah ditetapkan sebagai KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 6

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. mempunyai . . .

- b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Pasal 7

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah;
- b. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu; dan/atau
- d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa.

Pasal 8

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;

b. memiliki . . .

- b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Pasal 9

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;
- b. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa; dan
- c. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah.

Pasal 10

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Pasal 11

Penunjukan dan penetapan suatu wilayah yang memenuhi kriteria sebagai KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KSA DAN KPA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan KSA dan KPA kecuali taman hutan raya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk taman hutan raya, penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan taman hutan raya oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (5) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pengawetan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. evaluasi kesesuaian fungsi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Perencanaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi . . .

- a. inventarisasi potensi kawasan;
- b. penataan kawasan;
- c. penyusunan rencana pengelolaan.

Paragraf 2
Inventarisasi Potensi Kawasan

Pasal 15

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh unit pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi potensi diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3
Penataan Kawasan

Pasal 16

- (1) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. penyusunan zonasi atau blok pengelolaan;
 - b. penataan wilayah kerja.
- (2) Zonasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan taman nasional.
- (3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional.

Pasal 17

- (1) Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan zonasi atau blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Zonasi pengelolaan pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona rimba;
 - c. zona pemanfaatan; dan/atau
 - d. zona lain sesuai dengan keperluan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Blok pengelolaan pada KSA dan KPA selain taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok lainnya.
- (2) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Penataan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembagian wilayah kerja ke dalam unit pengelola dan seksi wilayah kerja;
 - b. pembagian . . .

- b. pembagian seksi wilayah kerja ke dalam unit yang lebih kecil.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada batas wilayah administratif pemerintahan daerah dan/atau keragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disusun oleh unit pengelola.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan KSA dan KPA terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka pendek.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan jangka panjang paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. strategi;
 - d. kondisi . . .

- 12 -

- d. kondisi saat ini;
 - e. kondisi yang diinginkan;
 - f. zona dan blok;
 - g. sumber pendanaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rencana pengelolaan jangka pendek disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 24

- (1) Perlindungan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
 - b. melakukan penjagaan kawasan secara efektif.
- (3) Pelaksanaan perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawetan

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pengelolaan . . .

- 13 -

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor hidupan liar;
- c. pemulihan ekosistem;
- d. penutupan kawasan.

Paragraf 2
Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Beserta Habitatnya

Pasal 26

- (1) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - b. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan habitat dan populasi;
 - e. penyelamatan jenis; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan Koridor Hidupan Liar

Pasal 27

- (1) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.
- (2) Pengelolaan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh para unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada wilayah bukan kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh kepala unit pengelola kawasan dengan kepala satuan kerja perangkat daerah setempat.
- (2) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para kepala unit pengelola kawasan yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Paragraf 4
Pemulihan Ekosistem

Pasal 29

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mekanisme alam;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Mekanisme alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami di lokasi tersebut.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi dan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Badan usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek;
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat; dan
 - d. menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5

Penutupan Kawasan

Pasal 31

Dalam hal terdapat kondisi kerusakan yang berpotensi mengancam kelestarian KSA dan KPA dan/atau kondisi yang dapat mengancam keselamatan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa, unit pengelola KSA atau KPA dapat melakukan penghentian kegiatan tertentu dan/atau menutup kawasan sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Kelima

Pemanfaatan KSA dan KPA

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan pada semua KSA dan KPA.
 - (2) Kegiatan . . .

- 16 -

- (2) Kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA.
- (3) Kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA terdiri atas:
 - a. pemanfaatan kondisi lingkungan; dan
 - b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Paragraf 2
Pemanfaatan Cagar Alam

Pasal 33

Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

Paragraf 3
Pemanfaatan Suaka Margasatwa

Pasal 34

Suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

Paragraf 4
Pemanfaatan Taman Nasional

Pasal 35

- (1) Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. penelitian . . .

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- (2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Paragraf 5

Pemanfaatan Taman Hutan Raya

Pasal 36

- (1) Taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

(2) Pemanfaatan . . .

- (2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Paragraf 6

Pemanfaatan Taman Wisata Alam

Pasal 37

Taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- e. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Paragraf 7

Izin Pemanfaatan KSA dan KPA

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan KSA dan KPA wajib membayar iuran dan pungutan.
- (2) Iuran . . .

- (2) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iuran izin usaha; dan
 - b. pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan.
- (3) Iuran dan pungutan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi izin rehabilitasi dan izin restorasi.
- (5) Pungutan atas hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan setiap tahun atau setiap kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan KSA dan KPA untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA dan KPA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam Evaluasi Kesesuaian Fungsi

Pasal 41

- (1) KSA dan KPA dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian fungsi KSA dan KPA.
- (3) Evaluasi kesesuaian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi KSA dan KPA diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

- (1) Hasil evaluasi kesesuaian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA.
- (2) Tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemulihan ekosistem dan/atau perubahan fungsi KSA dan KPA.
- (3) Perubahan fungsi KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KSA DAN KPA

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. penguatan fungsi KSA dan KPA; dan
 - b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V

DAERAH PENYANGGA

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.
- (2) Daerah . . .

- (2) Daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak.

Pasal 45

- (1) Daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan batas daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga;
 - b. rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan; dan
 - c. pembinaan fungsi daerah penyangga.
- (5) Pembinaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
 - b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
 - c. peningkatan produktivitas lahan.
- (6) Rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengacu kepada rencana pengelolaan KSA dan KPA yang bersangkutan dan rencana pembangunan daerah.

- 22 -

Pasal 46

Pengelolaan daerah penyangga yang merupakan lahan yang telah dibebani hak dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6).

Pasal 47

Tata cara penetapan dan pengelolaan daerah penyangga diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pengelolaan KSA dan KPA bersumber pada APBN atau APBD dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan desa konservasi;
 - b. pemberian . . .

- b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam;
 - c. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh kepala unit pengelola sesuai dengan rencana pengelolaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan hak kepemilikan atas KSA dan KPA dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

Masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; dan
- d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Pemerintah dapat mengusulkan suatu KSA atau KPA sebagai warisan alam dunia (*world heritage site*), cagar biosfer, atau sebagai perlindungan tempat migrasi satwa internasional (*ramsar site*) kepada lembaga internasional yang berwenang untuk ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh lembaga internasional yang bersangkutan.

BAB X . . .

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) KSA dan KPA yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai KSA dan KPA atau ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan penyangga, tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (3) Kerjasama pengelolaan KSA dan KPA yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

I. U M U M

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan.

Hingga saat ini, pengelolaan KSA dan KPA belum sepenuhnya efektif, antara lain dengan adanya berbagai konflik sosial yang berhubungan dengan belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan KSA dan KPA karena peraturan pemerintah yang telah ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Lingkungan strategis dimaksud antara lain perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, pemekaran wilayah, pesatnya perkembangan teknologi transportasi yang berhubungan dengan mobilitas manusia, pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berhubungan dengan meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, perubahan paradigma pengurusan hutan dari berbasis kayu ke berbasis jasa ekosistem, serta perubahan paradigma pengelolaan konservasi dari seluruhnya dikelola oleh pemerintah menjadi pengelolaan bersama para pihak, serta pergeseran yang mengedepankan aspek ekologi ke aspek ekonomi, dan sosial budaya.

Memperhatikan perkembangan di atas, maka dipandang perlu mengatur kembali pengelolaan KSA dan KPA, dengan memperhatikan prinsip tata pemerintahan yang baik, serta harmonisasi berbagai aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Unit pengelola dapat berbentuk kesatuan pengelolaan hutan atau balai atau unit pelaksana teknis daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Konsultasi publik dalam pelaksanaan penyusunan zona atau blok pengelolaan melibatkan masyarakat adat dan/atau lokal, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan para pihak terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona lain” adalah zona yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan KSA atau KPA.

Zona lain antara lain: zona perlindungan bahari, zona koleksi tumbuhan dan/atau satwa, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, dan sejarah, serta zona khusus.

Zona perlindungan bahari merupakan bagian dari kawasan untuk wilayah perairan laut yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem, serta sistem penyangga kehidupan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti.

Zona koleksi tumbuhan dan/atau satwa merupakan bagian dari kawasan taman hutan raya yang terutama diperuntukkan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa.

Zona tradisional merupakan bagian dari KPA yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Zona rehabilitasi merupakan bagian dari KPA yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.

Zona religi, budaya, dan sejarah merupakan bagian dari KPA yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan/atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

Zona khusus merupakan bagian dari KPA yang diperuntukkan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis (*sensitivity of ecology*), urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan, berturut-turut adalah zona: inti, perlindungan, rimba, pemanfaatan, koleksi, dan lain-lain.

Selain hal tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor: keterwakilan (*representation*), keaslian (*originality*) atau kealamian (*naturalness*), keunikan (*uniqueness*), kelangkaan (*rarity*), laju kepunahan (*rate of exhaustion*), keutuhan satuan ekosistem (*ecosystem integrity*), keutuhan sumber daya/kawasan (*intactness*), luasan kawasan (*area/size*), keindahan alam (*natural beauty*), kenyamanan (*amenity*), kemudahan pencapaian (*accessibility*), nilai sejarah/ arkeologi/keagamaan (*historical/archeological/religious value*), dan ancaman manusia (*threat of human interference*), sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian secara ketat atas populasi flora fauna serta habitat terpenting.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “blok lainnya” adalah blok yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan KSA atau KPA.

Blok lainnya antara lain: blok perlindungan bahari, blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya, dan sejarah, dan blok khusus.

Blok perlindungan bahari merupakan bagian dari kawasan untuk wilayah perairan laut yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem, serta sistem penyangga kehidupan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian.

Blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa merupakan bagian dari kawasan taman hutan rakyat yang terutama diperuntukkan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

Blok . . .

Blok tradisional merupakan bagian dari KPA yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Blok rehabilitasi merupakan bagian dari KPA yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.

blok religi, budaya, dan sejarah merupakan bagian dari KPA yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya, dan/atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.

Blok khusus merupakan bagian dari KPA yang diperuntukan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
"Unit yang lebih kecil" misalnya resor wilayah pengelolaan KSA atau KPA.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.

Ayat (2)

Perlindungan dilakukan dengan tujuan:

- a. terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- b. menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
- c. menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan KSA dan KPA;
- d. menjamin keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai perlindungan hutan.

Pasal 25

Pengawetan dilaksanakan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan kerusakan kawasan/ekosistem.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “hidupan liar” adalah *wildlife* atau satwa liar yang hidup di luar KSA dan KPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pemulihan ekosistem dilakukan setelah melalui suatu pengkajian dan studi mendalam bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya, serta dalam pelaksanaannya harus menggunakan komponen spesies asli setempat yang diarahkan untuk mampu mengembalikan struktur, fungsi, dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna memperkuat sistem pengelolaan kawasan yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam antara lain: berupa penutupan kawasan atau perlindungan proses alam terhadap intervensi aktifitas manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kegiatan pemulihan ekosistem berupa restorasi oleh badan usaha dilakukan untuk tujuan percepatan tercapainya keseimbangan alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Kegiatan pemanfaatan dimaksudkan untuk mendukung fungsi kawasan secara optimal dengan tetap mempertahankan kelangsungan potensi, daya dukung, serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam termasuk kegiatan wisata alam terbatas bagi kepentingan peningkatan kesadartahuan.

Huruf c
Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon merupakan jasa KSA dan KPA untuk menyerap unsur karbon yang dilepas ke udara dan menyimpannya sehingga unsur karbon tersebut terikat di dalam dan/atau di atas permukaan tanah yang dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Huruf d
Kegiatan penunjang budidaya dilakukan dengan menggunakan tumbuhan dan satwa liar atau bagian dari tumbuhan dan satwa liar sebagai bibit atau bahan induk untuk dikembangkan.

Kegiatan . . .

Kegiatan tersebut dilakukan melalui eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, koleksi, evaluasi, serta dokumentasi data dan informasi status.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan, dan sifat kelianan alam di KSA dan KPA.

Pemanfaatan energi air, panas, dan angin merupakan pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa angin, dan jasa panas yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan.

Pemanfaatan energi antara lain berupa pemanfaatan energi air untuk *microhydro*, pemanfaatan energi angin untuk pemutar kincir angin, pemanfaatan energi panas matahari untuk pembangkit listrik (*solar cell*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepentingan koleksi termasuk dalam mengintroduksi jenis tumbuhan untuk dikembangkan di dalam kawasan

Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dilakukan melalui penanaman berbagai jenis flora dan pelepasan fauna yang menjadi ciri khas dan kebanggaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dilaksanakan melalui pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penangkaran terbatas dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Tidak dikenakan iuran dan pungutan terhadap izin rehabilitasi dan izin restorasi tidak menghilangkan kewajiban membayar iuran dan pungutan apabila pemegang izin memanfaatkan kondisi lingkungan seperti penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan untuk wisata alam” adalah peraturan pemerintah mengenai pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar” adalah peraturan pemerintah mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai tata cara perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan lembaga pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan” adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas, dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga KSA dan KPA dari segala bentuk gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak, antara lain adalah hak kepemilikan atas tanah, hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang diakui keberadaannya berdasarkan peraturan daerah atau izin usaha pemanfaatan hutan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD
	14/12-15	Acc Laporan - pengumpul	
	15/12	ACC Laporan	Y. F.
	16/12	Acc Laporan	Y. F.
	17/12	Acc Laporan	Y. F.
	17/11	Tambahkan analisis Pd Bab II. ttp fungs. Manajemen	Y. F.
	17/11	Uraian: Bab II penutup pembahasan Bab II Rapat Abstract	Y. F.
	19/12	Uraian: Laporan ACC S.D.A.N.G	Y. F.
	20/11	Lampiran ke laporan - indikator	Y. F.

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD
	19/12	19/12 2016	
	26/12	26/12 2016	
	2/1	2/1 2017	
		- wawancara ditubek baru	
		- Data pelaksanaan pembangunan	
		ACC sedang diripin	
			Y. F.

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD

Serang,20.....
Ketua Prodi

Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197905252005012001

CATATAN :








1. Kartu ini narap dibawa setiap kali bimbingan dan diperlihatkan ketika pendaftaran skripsi
2. Syarat Sidang Skripsi:
 1. ACC Sidang Dosen Pembimbing 1 & 2
 2. Mengisi form pendaftaran sidang & pernyataan orisinalitas skripsi
 3. Mengisi form biodata pembuatan ijazah dan transkrip nilai
 4. Surat Bebas SPP dari BAUK
 5. Melampirkan Ijazah SMA
 6. Transkrip Nilai Sementara
 7. Foto Hitam Putih 4x6 (3 lbr), 3x4 (3 lbr), foto berwarna 3x4 (1 lbr)
 8. Soft Cover Skripsi 3 buah (ttt pembimbing 1 & 2 serta dekan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Metta Miftahul J
 NIM : 60661110776
 JUDUL SKRIPSI :
 PEMBIMBING I : Bapak Dr. Suwab Amiruddin H.Si
 PEMBIMBING II : Ibu. Steward S.Sos H.Si.

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DAFTAR HADIR
MENYAKSIKAN SIDANG SKRIPSI
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NO	NAMA/NIM PESERTA SIDANG	TANGGAL	JUDUL SKRIPSI	TANDA TANGAN KETUA PENGUJI
1	Ratu Melda S 6661103054	21 September 2016	" <u>Peran</u> Kinerja Pelayanan Badan Perusfakakan dan Arrip Daerah Provinsi Banten"	
2	Hta. Paterhati 6661103098	18 Januari 2016	" <u>Peran</u> Penerapan E-government dalam Pelayanan Akademik di UNTIRTA"	
3	Nurul Fithi S 6661110940	18 Januari 2016	" <u>Koordinasi</u> BLHD dan DISPERINDAS dalam Mendorong Pergerakan Pergerakan dan Plastik di Kec. Teparakta Kab. Tanggarang"	
4	Affifatur Nisa 6661090710	29 Februari 2016	" <u>Peran</u> Pemerintah Kota Cirebon dalam Merga toa, Dampak sosial Atas. Pembangunan PT. Krakatau Posco studi. Kec. Ciwandan"	
5	Dedi Setiadi 6661100794	29 Februari 2016	" <u>Disciplin</u> Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perindustrian. Pendaopangan dan Koperasi Kota Cirebon"	
6	Melda Istiani 6661121409	24 Januari 2017	" <u>Tingkat</u> Pengelolan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Padesbang"	
7	Mareta Das 6661120072	24 Januari 2017	" <u>Manajemen</u> Aset Daerah Dalam Penyerahan Aset Tetap Kabupaten Serang kepada Kota Serang, Provinsi Banten"	

Ketua Prodi Ilmu Adm. Negara

Rahmawati, M.Si

(Mareta Das)



Identitas Pribadi

Nama : Metta Miftahul Jannah
NIM : 6661110776
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang , 01 Maret 1993
Alamat : Poris Indah Jl. Intan V Blok D No. 787 RT 004
RW 007, Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh
Tangerang – Banten , 15148

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : MT. Turmudzi Thahier
Nama Ibu : Ecih Sukaesih

Pendidikan

SD (2000-2006) : SDN Poris Gaga I – Tangerang
SMP (2006-2009) : SMPN 45 – Jakarta Barat
SMA (2009-2011) : SMAN 33 – Jakarta Barat
Perguruan Tinggi (S1) : Administrasi Negara UNTIRTA